

Masrizal, MA

PENGENDALIAN MASALAH SOSIAL MELALUI KEARIFAN LOKAL



Pengantar :
Prof. Bahrein T. Sugihen, M.A., Ph.D.
Prof. Dr. Ir. H. Hasanuddin, M.S.

Masrizal, S.Sos.I, MA

**PENGENDALIAN MASALAH SOSIAL
MELALUI KEARIFAN LOKAL**

PENGANTAR:

Prof. Dr. Bahrein T. Sugihen

Prof. Dr. Hasanuddin

Syiah Kuala University Press

**Pengendalian Masalah Sosial
Melalui Kearifan Lokal**

Dimensi
14,8 x 21, v+128 hal

Penulis
Masrizal, S.Sos.I, MA

Pengantar
Prof. Dr. Bahrein T. Sugihen
Prof. Dr. Hasanuddin

Editor
Sabirin, M.Si

Design/Layout
Tubin

Penerbit
Percetakan & Penerbit Syiah Kuala University Press
Darusalam, Banda Aceh

ISBN : 978-602-1270-22-6

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mereproduksi sebagian atau seluruh isi buku
ini dalam bentuk dan tujuan apapun tanpa izin tertulis
dari penerbit
Dilarang memperjualbelikan buku ini dalam keadaan
rusak dan mengedarkannya dalam bentuk jilid atau
sampul lain

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. Bahren T. Sugihen, MA
(Guru Besar Sosiolog Unsyiah)

Pengendalian masalah sosial melalui kearifan local merupakan hal yang penting, karena menyangkut kepentingan masyarakat, sebelum suatu kebijakan sosial di implementasikan sesuai dengan harapan masyarakat. Buku ini diawali oleh penulis sebagai buku ajar bagi mahasiswa Prodi Sosiologi FISIP Unsyiah dan Prodi Pengembangan masyarakat islam dan konsentrasi Kesejahteraan Sosial UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam mempelajari mata kuliah masalah sosial dan kebijakan Sosial. Namun sekarang buku ini tidak hanya digunakan untuk kalangan kampus tapi juga telah dirubah menjadi buku teks yang dapat digunakan bagi pembaca yang memiliki keminatan dibidang sosial.

Buku ini bertujuan untuk membantu mereka yang berminat mempelajari dan ingin memahami kebijakan Sosial. Beberapa konsep, teori dan model dalam permasalahan sosial diperkenalkan dalam membantu mendeskripsikan, menjelaskan, dan menganalisis proses pembuatan dan penetapan kebijakan sosial. Buku ini menjadi penting dalam konteks bagaimana kita seharusnya memahamai proses kebijakan sosial sebagai sesuatu yang berpengaruh secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Disamping itu buku ini juga secara spesifik melihat bagaimana model kebijakan sosial dan kebijakan public dalam perspektif Islam.

Disamping itu Buku ini memberikan gambaran kepada pembaca bagaimana upaya pengendalian masalah sosial melalui kearifan local. Dalam kajian ini yang menarik untuk kita simak dari berbagai pendekatan sosiologis yang dirangkum diawali melalui penelitian yang akademik yang dilakukan sendiri oleh si penulis. Hal ini dapat kita lihat pada Bab III dan IV, karena itu buku ini sangat berguna bagi mereka yang ingin mendalami ilmu kemasyarakatan, terutama mahasiswa yang menekuni bidang Sosiologi, Pekerja Sosial, Pengembangan Masyarakat Islam serta analis sosial perlu untuk menyimak lebih dalam apa yang telah ditawarkan dari berbagai analisis sosial yang digambarkan seperti analisis Pohon, Analisis SWOT, Analisis Aktor dan berbagai pendekatan lainnya.

Buku ini tidak hanya bermanfaat sebagai rujukan dalam dunia akademik, tetapi juga masyarakat luas yang punya kepedulian sosial dalam melihat maraknya permasalahan sosial yang terjadi dewasa ini. Akhirnya, saya mengucapkan selamat kepada penulis semoga, karya ini menjadi sesuatu hal yang bermanfaat bagi si pembacanya, dan terus memberikan dampak positif terhadap dunia akademik, khususnya mereka yang mengkaji tentang permasalahan sosial.

Darussalam, Januari 2015

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. Ir. H. Hasanuddin, M.S.

(Ketua Lembaga Penelitian Universitas Syiah Kuala Banda Aceh)

Ketika penulis menghubungi saya agar memberikan kata pengantar, saya meresponnya dengan baik, karena niat dan kesempatan untuk menulis buku teks tidak semua orang memiliki waktu, karena kesibukannya. Untuk itu saya memberikan apresiasi kepada penulis, dan ketika saya membaca judul buku mengenai "Pengendalian Masalah Sosial Melalui Kearifan Lokal" saya tertarik untuk memberikan masukan karena buku ini adalah membahas realitas permasalahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya melihat masalah Aceh dan umumnya Indonesia. Menariknya lagi, kajian yang dibahas merupakan karya yang dilahirkan dari sebuah penelitian ilmiah yang berhubungan langsung dengan disiplin ilmu penulis, yakni Sosiologi.

Selanjutnya saya melihat untuk konteks Aceh, buku yang berkenaan dengan tema masalah sosial masih langka untuk ditulis, dan mungkin karena kajian ini berkembang di barat sehingga banyak hal yang menyebabkan ketertarikan ilmuwan Indonesia untuk menulisnya, lebih banyak tulisan dalam bentuk terjemahan yang dibuat oleh kalangan sosiolog Indonesia dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia.

Dalam buku ini dijelaskan tentang apa itu masalah sosial, bagaimana pengendalian masalah sosial ini dilakukan oleh tokoh masyarakat di tingkat gampong (desa), dan teori sosiologi serta analisis pendekatan masalah sosial yang ditawarkan sangat memudahkan bagi pembaca, dan juga memberikan masukan kepada pemerintah dalam pengambilan keputusan dalam bidang sosial yang diarahkan kepada kebijakan sosial atau kebijakan publik dalam perspektif Islam, apalagi Provinsi Aceh satu-satunya di Indonesia telah menjalankan Syariat Islam sudah sepatutnya memberikan kebijakan dalam perspektif Islam. Karena itu, saya sangat mengapresiasi usaha penulis, semoga karya ini terus dikembangkan dan semakin banyak juga penulis lain yang menulis hal yang serupa seiring di Aceh khususnya kajian ilmu sosial terus berkembang, misalnya di UIN Ar-Raniry memiliki Prodi Kesejahteraan Sosial, Universitas Iskandar Muda

(UNIDA) ada Prodi Sosiatri atau sekarang berubah namanya menjadi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, serta di Universitas Malikussaleh (Unimal) ada Prodi Sosiologi. Khusus untuk Unsyiah, sebagai sebuah universitas Jantung Hate Rakyat Aceh, Prodi Sosiologi telah ada sejak tahun 2007 berada di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Selanjutnya, hampir semua universitas di Aceh telah menggalakkan lahirnya Prodi Ilmu-ilmu Sosial, mengingat permasalahan sosial yang kompleks terus terjadi, apalagi pasca konflik dan gempa tsunami di Aceh, yang membutuhkan lahirnya sosiolog-sosiolog atau pekerja sosial dalam penanganannya.

Demikian, sekedar pengantar semoga bermanfaat, tiada gading yang tak retak, begitupun buku ini, Anggap saja kekurangan yang ada, justru peluang bagi pembaca untuk berpartisipasi dan berkontribusi. Wassalam.

Banda Aceh, Januari 2015

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Pengalaman membina mata kuliah masalah sosial dan melakukan penelitian yang berhubungan dengan masalah sosial dan memberikan materi presentasi pada beberapa pelatihan dan workshop dengan instansi pemerintah dan swasta maka terasa perlu kiranya menuliskannya kedalam satu buku yang dapat dimanfaatkan untuk karya akademik untuk mengenalkan konsep, prosedur menganalisa dengan pendekatan Kajian Sosiologi.

Buku Pengendalian masalah sosial melalui kearifan lokal ini pada awalnya merupakan bahan ajar dalam bentuk modul yang dicetak sendiri oleh penulis yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan mata Kuliah Masalah Sosial di Prodi Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, dan Mata Kuliah Kebijakan dan Perencanaan Sosial di Prodi Pengembangan Masyarakat Islam dan Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Ar-Raniry, Mempertimbangkan sebagai bagian dari karya akademik maka akhirnya penulis memberanikan diri dari bahan ajar menjadi buku teks yang mampu memberikan nuansa tersendiri, baik dari segi substansial, struktur maupun gaya penulisan. Sebagai substansial dilakukan penyesuaian dengan menambah kajian hasil penelitian dengan pendekatan kearifan local ke Acehan yang relevan sebagai kajian Sosiologi. Penyesuaian dalam hal struktur, terutama dilakukan untuk lebih focus memisahkan topic-topik inti yang sebelumnya terangkum dalam bab tersendiri. Sedangkan dari segi penulisan diarahkan gaya penulisan-nya pada penulisan populer agar lebih Komunikatif, meskipun belum semua tersentuh.

Kehadiran buku ini adalah untuk menambah khazanah pengetahuan bagi para mahasiswa, peneliti pemula yang tertarik dengan kajian masalah sosial, lembaga terkait, untuk mengkaji lebih lanjut sistem pemecahan masalah sosial berbasis kearifan local. Dalam Buku ini Penulis menggambarkan tentang teori dan analisa yang digunakan dalam memecahkan permasalahan sosial yang dihadapi dan juga membahas tentang hasil temuan penelitian tentang penanganan masalah sosial dengan pemcahannya menggunakan pendekatan penyelesaian berbasis masyarakat lokal.

Kepada pihak penerbit, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaanya menerbitkan buku ini, ucapan terima kasih juga buat Prof Hasanuddin dan Prof Bahren T. Sugihen yang telah bersedia memberikan kata pengantar dalam buku ini, saudara Sabirin sebagai editor, kepada kolega, khususnya dosen dan civitas akademik FISIP Unsyiah dan dosen UIN Ar-Raniry yang telah ikut mendorong dan turut memberikan masukan, Saudara Tubin sebagai Layout, dan tak terhingga juga kepada Ibunda Mariana, Istri tercinta Ewi Mauliza dan ananda Daffa Maulana, yang ikut mendukung penulis untuk penyelesaian buku ini. Kepada para pembaca, dengan rendah hati saya akan menyambut dengan baik setiap koreksi atau saran-saran perbaikan terhadap buku, baik berkenaan dengan ruang lingkup, sistematisa-tika maupun isinya.

Banda Aceh, Januari 2015

Masrizal, S.Sos.I, MA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB 1 MASALAH SOSIAL	1
BAB II PENGENDALIAN MASALAH SOSIAL.....	11
BAB III PENANGANAN MASALAH SOSIAL MELALUI KEARIFAN LOKAL	15
BAB IV TOKOH INFORMAL DALAM PENANGANAN BENCANA.....	41
BAB V KEBIJAKAN PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN SO- SIAL DALAM ISLAM (SEBUAH TEORI DAN ANA- LISA)	61
BAB VI MEDIA DAN PERUBAHAN SOSIAL	77
BAB VII HUBUNGAN PEKERJA SOSIAL DAN PEMBER- DAYAAN MASYARAKAT	89
BAB VIII PENANGGULANGAN PENGANGGURAN DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN SOSIAL	103

BAB 1 MASALAH SOSIAL

A. DEFENISI MASALAH SOSIAL

Masalah sosial (problema sosial) merupakan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat, bersifat sosial dan berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan (Soerjono Soekanto, 2006:310). Selanjutnya Coleman, J.W and Cressey, 1984, menjelaskan bahwa Masalah sosial dalam perspektif sosiologis sering disebut sebagai problem sosial (*social problems*) Masalah sosial merupakan suatu gejala (fenomena) sosial yang mempunyai dimensi atau aspek kajian yang sangat luas atau kompleks, dan dapat ditinjau dari berbagai perspektif (sudut pandang atau teori). Suatu fenomena atau gejala kehidupan dikatakan sebagai masalah sosial (*social problems*) adalah apabila: *Pertama*, sesuatu yang dilakukan seseorang itu telah melanggar atau tidak sesuai dengan nilai-norma yang dijunjung tinggi oleh kelompok; *kedua*, sesuatu yang dilakukan individu atau kelompok itu telah menyebabkan terjadinya disintegrasi kehidupan dalam kelompok; dan *Ketiga*, sesuatu yang dilakukan individu atau kelompok itu telah memunculkan kegelisahan, ketidakbahagiaan individu lain dalam kelompok (Coleman, J.W and Cressey, 1984).

Sedangkan Weinberg dalam Soetomo (2009), Masalah sosial adalah kondisi yang dinyatakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh kalangan yang signifikan, dimana mereka sepakat dibutuhkannya suatu tindakan untuk merubah situasi tersebut. Seperti halnya Situasi yang dinyatakan, Kalangan yang signifikan dan Kebutuhan akan tindakan pemecahan

Objek kajian studi masalah sosial itu begitu kompleks, sehingga analisis tentang suatu fenomena sosial dikatakan sebagai masalah (problem) dapat ditinjau dari beragam perspektif (beragam teori), misalnya sesuatu dikatakan problem menurut teori fungsional struktural akan berbeda dengan teori konflik, atau teori interaksionis simbolik, atau teori integrasi. Sedangkan Paritlo dalam Soetomo (1995), untuk dapat memahami pengertian masalah sosial perlu diperhatikan empat hal, yaitu: (1) masalah itu bertahan untuk suatu periode waktu tertentu; (2) dirasakan dapat menyebabkan beragam kerugian secara fisik dan non fisik pada individu dan kelompok; (3) merupakan pelanggaran terhadap nilai atau standar sosial atau sendi-sendi kehidupan masyarakat; dan (4) menuntut adanya usaha untuk dicari pemecahannya.

Beragamnya pengertian atau definisi tentang masalah sosial (social problems) yang dikemukakan oleh para ahli di atas memperkaya wawasan kita bahwa masalah sosial merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang sifatnya ada yang disebabkan oleh individu dan juga dipengaruhi oleh orang lain atau sistem. Misalnya masalah sosial yang diakibatkan oleh individu, yakni seorang pencuri yang selalu merugikan orang lain atau semacamnya, dalam hal ini Sehingga Sosiolog melihat pada konteks masalah sosial seperti kejahatan, kemiskinan, Korupsi, perceraian, pelanggaran dan yang sedang marak-maraknya terjadi di Indonesia dewasa ini seperti tawuran antar pelajar, trafficking dan lain-lain.

Untuk melihat dan memberikan penangan yang serius terhadap permasalahan sosial ini akan dibahas lebih terarah pada sub bab tentang tahapan-tahapan analisis masalah sosial. Sehingga kita dapat memahami lebih lanjut bagaimana melihat sebuah masalah tersebut dilihat pada konteks individu, kelompok dan lain sebagainya.

B. TAHAPAN-TAHAPAN ANALISIS MASALAH SOSIAL

Hatma Indra Jaya (2008), menjelaskan ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan sebelum menganalisis masalah sosial, persiapan berikut: *pertama*, tahap persiapan sebelum berangkat, mencari key mental, mencari tahu budaya wilayah setempat serta mencari person (orang yang berpengaruh) mencari dan menafsirkannya secara ogرافي gampang/desa. *Kedua*, tahap mengenal situasi dan

dengan masuk kedalam tahap menganalisa masalah dan analisa potensi untuk selanjutnya masuk dalam tahapan rancangan perubahan sosial.

Dalam memahami tahapan analisa masalah sosial banyak hal yang sebenarnya yang perlu kita perhatikan sebelum betul-betul memberikan solusi pemecahan masalah sosial. Dikarenakan dalam menganalisa itu sendiri perlu adanya aktifitas yang memuat tentang mengurai masalah tersebut secara mendalam, membedakan, memilih dan memilih mana yang lebih dikatakan sesuatu hal dikatakan masalah sosial, dan kemudian kita mampu dengan benar-benar menafsirkannya sebagai sebuah masalah sosial. Disamping itu juga sebagai seorang sosiolog atau tenaga pendamping sosial (pekerja sosial) kita sangat dituntut untuk mendiskusikan apa yang kita dapatkan dalam lapangan dan juga mengkritisi elemen-elemen yang terlibat. Dalam menganalisis masalah sosial seorang sosiolog atau pekerja sosial perlu memahami secara mendalam tentang melakukan pendekatan jenis analisa datanya, biasanya analisa data dapat kita lakukan dengan pendekatan kuantitatif maupun dengan pendekatan kualitatif.

Pada pendekatan kuantitatif kita dituntut mampu membaca angka-angka yang telah diterbitkan oleh lembaga terkait, misalnya oleh badan pusat statistik (BPS) atau instansi lain yang telah lebih dahulu mengumpulkan masalah tersebut. Contohnya data tentang jumlah penduduk miskin dan pelaku kriminal dan lain-lain. Dimana pada tahap ini dituntut untuk membaca data mentah, kemudian menyederhanakannya, dan terakhir membuat analisisnya. Sedangkan pada pendekatan kualitatif seorang pekerja sosial harus mendatangi lokasi yang teridentifikasi melakukan masalah sosial tersebut dengan terlebih dahulu mengumpulkan data masalahnya melalui koran atau media televisi sebelum melakukan analisis. Sebagai seorang Sosiolog atau pekerja sosial apabila sudah mendapatkan data melalaui dua pendekatan tersebut maka dituntut untuk action data, dimana data yang didapatkan kemudian dikomunikasikan dengan lembaga yang terkait dalam menangani masalah sosial, sehingga data tersebut mampu memberikan solusi terhadap masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat.

C. TEKNIK ANALISIS MASALAH SOSIAL

Berbicara tentang teknik analisis masalah sosial seorang sosiolog atau pekerja sosial mesti mampu mengurai masalah sosial tersebut sederhana mungkin sehingga mampu melihat teknik mana yang tepat untuk dipilih dalam menganalisis masalah tersebut, berikut dijelaskan beberapa teknik analisis masalah sosial yang digunakan oleh Hatma Indra Jaya dalam menganalisis masalah sosial. Pertama dengan analisis statistika sosial (analisis aktor), kedua analisis dinamika sosial (analisis proses dan analisis historis), ketiga analisis jalur (analisis pohon), keempat analisis SWOT, dan terakhir analisis kesadaran.

1. Analisis Statistika Sosial (analisis aktor)

Analisis social model statistika sering juga disebut dengan analisis struktur social dalam kajian Sosiologi atau dalam kajian Disiplin ilmu Kesejahteraan Sosial disebut dengan analisis actor, karena kajiannya focus pada pendiskripsian peran actor dan melihat asal struktur sosialnya dalam melihat masalah social. Di samping itu kajian analisis actor dalam pandangan Aguste Comte mampu menjawab persoalan social masyarakat karena kajian ini melihat dua hal, yakni aspek statika social dan dinamika social. Selanjutnya dalam pandangan Karl Marx Analisis actor ini lebih banyak perannya diambil oleh intelektual, karena mereka memahami dengan betul strategi dalam memecahkan persoalan social yang dihadapi, hal ini seperti yang digambarkannya dalam penelitiannya tentang kaum buruh (proletar) dan borjuis dalam dunia industri. Dimana ia menggambarkan bahwa kaum borjuis selalu menindas atau mengeksploitasi kelompok proletar dalam teorinya hubungan kelas-kelas sosial. Dalam kajian ini hal yang perlu diperhatikan adalah :

- a. Buat ringkasan ide utama dari sebuah kejadian masalah sosialnya
- b. Arahkan tujuannya setelah dikaji masalahnya
- c. Identifikasi siapa saja actor yang terlibat
- d. Pastikan semua actor tersebut berperan sesuai dengan kecakapannya (keahliannya).
- e. Arahkan kajian memahami aktorinya tidak hanya melihat sisi positif dari apa yang dilakukan tapi lihat juga sisi

pemanfaatan dari penyelesaian masalah sosialnya, seperti pandangan marx melihat actor yang mencari kepentingan atau keuntungan dari masalah social tersebut.

- f. Buat perencanaan social yang matang dengan memberikan model penyelesaian yang tidak hanya sementara tapi permanen.
- g. Lakukan monitoring dan evaluasi pada setiap apa yang telah dicapai dengan terus berbenah apa yang menjadi kekurangan dari penyelesaian.

2. Analisis Dinamika Sosial

Seorang Sosiolog atau Pekerja Sosial harus mampu memahami apa yang dimaksud dengan dinamika social. Dinamika social adalah proses perubahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat baik itu dari aspek nilai, budaya, perilaku individu, maupun kelompok atau institusi. Perubahan sosial atau dinamika social ini perubahannya ada yang bersifat lambat dan ada juga yang cepat. Misalnya sesuatu yang lambat, seperti mengubah perilaku kebiasaan seseorang dari suatu hal yang tidak pernah dia lakukan kesuatu hal yang baru. Sedangkan perubahan yang cepat adalah pengenalan terhadap alat teknologi yang saat diukur tingkat efisiennya waktunya lebih dibandingkan dengan sebelumnya. Namun tidak besar kemungkinannya juga banyak persoalan yang dihadapi dalam memahami perubahan sosial yang cepat, seperti rasa tanggung jawab dan penghormatan terhadap orang lain sering diabaikan atau sering di isitahkan dalam kajian sosiologi atau psikologi disebut dengan anomi (melupakan yang lama dan belum memastikan yang baru tersebut sesuatu yang harus dilakukan).

Untuk melakukan analisis dinamika sosial kita perlu memahami yang namanya sejarah (histori) karena kajian ini mampu mengartikan si analisisnya untuk mengkaji dan memahami sumber utama perubahan yang terjadi. Sedangkan untuk melihat arah perubahan sosial tidak dapat digeneralisir tetapi perubahan tersebut berjalan secara linier, yakni lurus bertahap dan juga sebaliknya. Seperti halnya ada muncul istilah disorder (fenomena yang menyimpang dari kebiasaan masyarakat) baik dilihat dari segi budaya maupun norma yang berlaku dalam masyarakat. Seperti makan menggunakan tangan kiri, makan

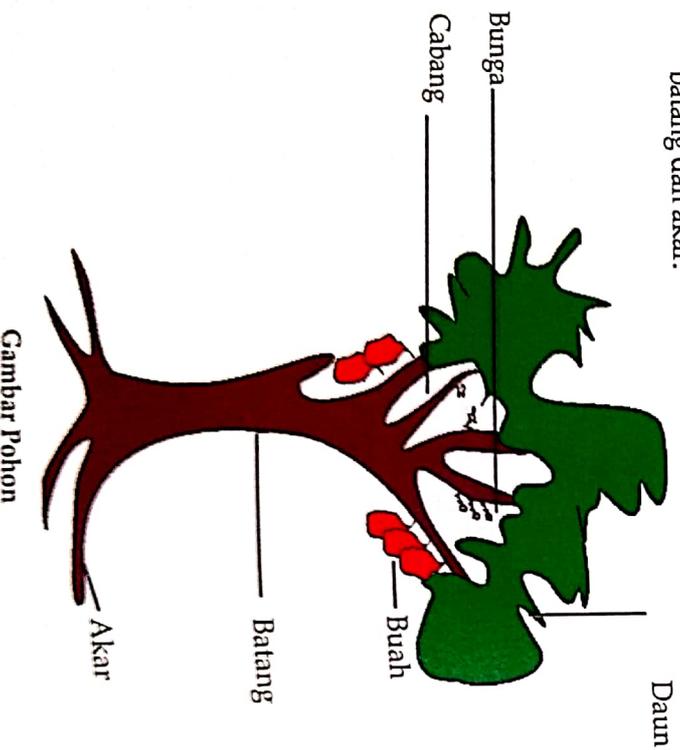
sambil berdiri, berpakaian tidak menutup aurat.

Pada tahapan ini yang perlu dilihat adalah :

- Menentukan persoalan utama yang akan dilihat
- Lakukan diskusi rutin dengan masyarakat
- Amati perkembangannya
- Membuat kesimpulan sementara
- Mengatasi persoalan sembari mempertanyakan langkah yang telah dipilih.

3. Analisis Pohon (analisis jalur)

Analisis pohon ini adalah bentuk analisis yang sering digunakan oleh sosiolog atau disiplin ilmu sosial lainnya dalam memecahkan persoalan yang dihadapi. Analisis pohon mempunyai asumsi dasar bahwa setiap masalah mempunyai keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, bahkan dapat dikatakan mengalami ketergantungan (interdependence) antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi dalam memahami masalah sosial ada yang disebut dengan analisis dalam pengkajiannya yang dilihat dari bagian daun, bunga, cabang, buah, batang dan akar.



Melihat analisa pohon ini dituntut bagi seorang analis untuk memahami dengan benar bagaimana keterkaitan antara daun, batang, cabang, dan bunga. Pada analisis ini dijelaskan bahwa daun masalah mengalami ketergantungan dengan akar masalah, namun akar masalah tidak bergantung dengan daun dan batang. Sehingga menyelesaikan masalah pada level daun tidak menjawab permasalahan secara keseluruhan. Seperti halnya kita memangkas daun dari pohon tersebut, maka akan tumbuh dari batang rantingnya dan daun bermasalah lagi, begitu juga dengan batang, sehingga pohon tersebut tidak akan mati. Untuk itu pada analisis Pohon ini dijelaskan bahwa jika permasalahan diselesaikan melalui akar maka akan mati dan hilang pohon tersebut. Maka pada tahap analisa pohon ini diperlukan kejelian seorang analis dalam mencari akar dari suatu masalah. Analisa Pohon ini membuktikan bahwa apabila akar telah dimusnahkan atau mati dan hilang, maka secara otomatis bunga, daun, buah, dan batang tidak akan tumbuh kembali. Biasanya analisa pohon ini digunakan untuk menjawab konflik-konflik sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya konflik yang dilatarbelakangi oleh: tawuran, SARA, Narkoba, persaingan politik, konflik lahan, Agama dan konflik sosial lainnya.

4. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah alat analisis yang digunakan oleh banyak lembaga sosial, baik itu lembaga pemerintah maupun swasta (CSO/LSM). SWOT adalah singkatan dari *Strengths* (Kelebihan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunity* (peluang) dan *Threat* (ancaman). Dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi maka perlu dirincikan kembali masing-masing hal yang ada di dalam pemahaman terhadap SWOT itu sendiri.

Strength (kekuatan/potensi) yang dimaksud dalam analisa ini adalah kekuatan atau potensi yang dimiliki oleh individu, kelompok atau organisasi tersebut, misalnya: ketersediaan uang, tenaga (*resources*) dan lahan. *Weakness* (Kelemahan), merupakan sesuatu titik kelemahan yang dimiliki secara internal oleh individu, kelompok atau organisasi, misalnya, kualitas Sumberdaya manusia yang masih rendah, kurangnya motivasi untuk merancang sesuatu program dan menyelesaikan sesua-

tu persoalan. *Opportunity*, (Peluang) dalam tahap ini peluang yang dimaksud adalah sesuatu yang datang dari luar yang kemudian individu, kelompok atau organisasi memiliki kesempatan untuk merancang dan melaksanakannya. Terakhir *Threat* (ancaman), melihat ancaman yang muncul, biasanya ancaman ini datangnya dari luar individu, kelompok atau organisasi. Pada analisis ini seorang analis dituntut memahami siapa lawan dan saingan.

Disamping ke empat model analisis di atas diperlukan juga menggali strategi lain yang menjadi tolak ukur utama dalam pemecahan masalah sosial, seperti menggunakan model analisis capacity building organisasi masyarakat lokal. Dimana model ini dianggap mampu menjawab persoalan sosial yang dihadapi oleh masyarakat karena model ini mencoba menggali potensi yang dimiliki langsung oleh masyarakat setempat, seperti pengetahuan mereka terhadap persoalan yang dihadapi, seperti halnya masalah kemiskinan. Sebuah organisasi akar rumput (ditingkat gampong) yang bergerak pada bidang pemberdayaan perempuan dan anak yang disebut dengan organisasi Balee Inong (BI) yang ada di Kota Banda Aceh menggali potensi pemecahan masalah sosial dengan melihat tiga model, yakni model pertama, mengidentifikasi, pada tahap utama ini kelompok Balee Inong mengidentifikasi apa saja penyebab yang dihadapi oleh kelompok dan anggota masyarakatnya yang dalam istilah disiplin ilmu Pekerjaan Sosial disebut dengan PMKS (penyandang masalah kesejahteraan Sosial)

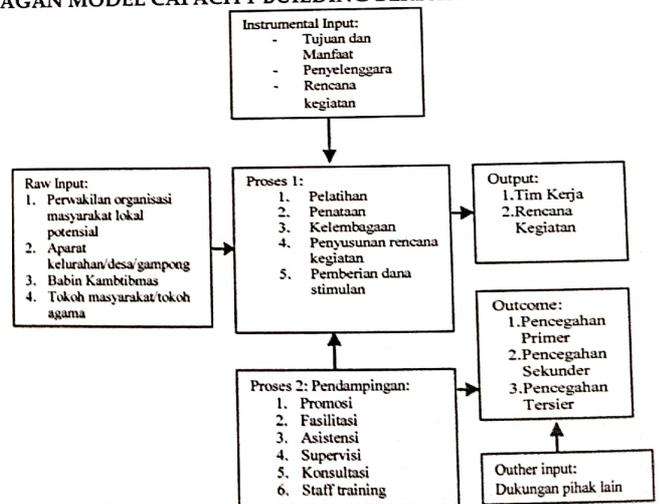
Kedua, mensosialisasikan, pada langkah ini, setelah masyarakat mengidentifikasi masalahnya kemudian mensosialisasikan kepada kelompok dan anggota masyarakatnya strategi apa yang akan dipilih dalam memecahkan masalahnya. Ketiga, atau yang terakhir, proses pembinaan. Pada tahap ini ketika sudah diidentifikasi, disosialisasikan, dan selanjutnya perlu ada pembinaan, dalam tahap ini organisasi BI tersebut mencari dukungan kepada lembaga-lembaga atau instansi pemerintah yang bergerak pada bidang pemberdayaan perempuan dan anak, kemudian mendapatkan pelatihan-pelatihan baik yang langsung mendapatkan praktiknya. Ketiga model tersebut digali dari masyarakat sendiri dan masyarakat sendiri yang menjadi ujung tombak pertama dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi, yang dalam istilah mereka disebut dengan capacity building ISP-BI (identifikasi, Sosialisasi dan Pembinaan) yang sejak tumbuhnya lembaga

akar rumput ini didampingi oleh *Women's Development Centre* (WDC) Kota Banda Aceh, dengan kekuatan penuh dari pemerintah Kota Banda Aceh dan Lembaga asing, yakni *Ford Foundation* dengan dimediasi oleh SAPA (*Strategic Alliance for Poverty Alleviation*)

Konsep *capacity building* dalam mengorganisasikan masyarakat lokal dengan menggunakan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konteks membangun kapasitas masyarakat untuk membuat keputusan yang kolaboratif dan tersosialisasikan, dengan mendukung tim kerja dan menghargai serta mengembangkan bentuk-bentuk upaya lokal dan swadaya dalam masyarakat dalam menanggulangi masalah sosial.

Belajar dari unsur-unsur konsep model *capacity building* yang dikembangkan oleh Warren (1978) dalam Dwi Yuliani, dkk, yang mengatakan bahwa penyebab terjadinya masalah sosial dalam masyarakat karena tidak terbangunnya fungsi-fungsi sosial masyarakat, seperti fungsi sosialisasi, kontrol sosial dan partisipasi sosial. Berikut digambarkan Badan Bagan Model Capacity Building berbasis masyarakat lokal.

BAGAN MODEL CAPACITY BUILDING BERBASIS MASYARAKAT



BAB II PENGENDALIAN SOSIAL

A. Defenisi Pengendalian Sosial

Bruce J. Cohen mendefenisikan Pengendalian sosial adalah cara-cara atau metode yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak kelompok atau masyarakat luas tertentu. Selanjutnya Horton mengatakan bahwa Pengendalian sosial adalah segenap cara dan proses yang ditempuh oleh sekelompok orang atau masyarakat, sehingga para anggotanya dapat bertindak sesuai harapan kelompok atau masyarakat. Joseph S. Roucek, Pengendalian sosial adalah suatu istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana ataupun tidak terencana yang mengajarkan, membujuk atau memaksa individu untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kelompok.

Peter L. Berger, mengatakan bahwa Pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan oleh masyarakat untuk menertibkan anggota-anggotanya membangkang. Sedangkan Rifhi Siddiq, mendefenisikan Pengendalian sosial adalah suatu cara maupun metode yang dilakukan kepada individu ataupun kelompok agar perilaku dan tindakannya sesuai dengan nilai dan norma sosial yang dianut masyarakat tersebut. Soetandyo Wignyo Subroto, Pengendalian sosial adalah sanksi, yaitu suatu bentuk penderitaan yang secara sengaja diberikan oleh masyarakat.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian sosial adalah proses yang digunakan oleh seseorang atau kelompok orang untuk mempengaruhi, mengajak, dan memaksa individu atau masyarakat agar berperilaku sesuai dengan norma dan

nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga terwujud apa yang menjadi impian masyarakat yang sesuai dengan harapan.

B. TEORI MASALAH SOSIAL

Dalam mempelajari masalah sosial mahasiswa atau kelompok masyarakat di tuntut untuk memahami beberapa konsep yang relevan dalam menangani masalah sosial, berikut dijelaskan beberapa teori yang digunakan sebagai berikut:

a. Labelling

Edwin M. Lemert mengatakan bahwa teori labeling ini adalah teori tentang dimana seseorang menjadi menyimpang karena proses labelling berupa julukan, cap atau etiket yang ditujukan pada seseorang oleh masyarakat. Mula-mula sifat penyimpangannya primer, tetapi adanya julukan membuat pelaku mengidentifikasi dirinya sesuai dengan julukan tersebut.

b. Fungsional Struktural

Emile Durkheim, Menyatakan bahwa tercapainya kesadaran moral dari semua anggota masyarakat karena faktor keturunan, perbedaan lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Artinya kejahatan itu selalu ada, sebab orang yang berwatak jahat pun akan selalu ada. Bahkan Durkheim berpandangan bahwa kejahatan itu perlu agar moralitas dan hukum dapat berkembang secara normal. Selanjutnya pandangan Talcot Parson tentang teori Fungsional, dalam memahami fenomena sosial, antara lain: (1) konsep kultur, dipandang sebagai sistem simbol yang terpola, teratur yang menjadi orientasi para individu untuk bertindak, berprilaku, bersosialisasi dalam sistem sosial. Jadi, kultur akan menjadi faktor eksternal untuk menekan pola tindakan individu dalam kelompok; (2) konsep sistem. Sistem memiliki properti keteraturan dan bagian-bagian yang saling tergantung. Sistem cenderung bergerak ke arah mempertahankan keteraturan diri atau keseimbangan hidup dalam kelompok (integrasi sosial).

Sistem bergerak dalam proses perubahan yang teratur (evolusi); (3) konsep integrasi. Persyaratan kunci bagi terpeliharanya integrasi sosial di dalam sistem sosial adalah proses internalisasi dan sosialisasi. Dalam proses sosialisasi, nilai dan norma

diinternalisasikan (norma dan nilai menjadi bagian dari 'kesadaran' aktor), sehingga aktor mengabdikan pada kepentingan sistem sebagai suatu kesatuan. Individu atau aktor biasanya menjadi penerima pasif dalam proses sosialisasi. Dan terakhir (4) konsep perubahan sosial. Teori ini memandang bahwa: (a) proses perubahan yang terjadi akan mengarah pada keseimbangan (equilibrium) dalam sistem sosial, apabila ada konflik internal, perlu dicari upaya-upaya untuk tetap terjaga keseimbangan dalam sistem; (b) perubahan evolusi masyarakat adalah mengarah kepada 'peningkatan kemampuan adaptasi', menuju keseimbangan hidup; dan (c) apabila terjadi perubahan struktural, maka akan terjadi perubahan dalam kultur normatif sistem sosial bersangkutan (perubahan sistem nilai-nilai terpenting) (Sztompka, P. 1993; Ritzer dan Goodman, 2003).

c. Differential Association (kelompok yang berbeda)

Edward H. Sutherland memandang bahwa perilaku menyimpang bersumber dari pergaulan yang berbeda, artinya seorang individu mempelajari perilaku menyimpang dari interaksinya dengan seorang individu yang berbeda latar belakang asal, kelompok dan budaya. Misalnya seseorang yang ingin berprofesi sebagai perampok maka ia mempelajari (berinteraksi) cara-cara merampok dengan teman-temannya yang terlebih dahulu jadi perampok

d. Konflik

Konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan. Dalam pandangan ini, pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan dialami (Pace & Faules, 1994:249). Dari defenisi ini dapat dijelaskan bahwa konflik tersebut adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (baik perorangan maupun kelompok) yang memiliki (atau merasa memiliki) tujuan yang tidak selaras. Dan untuk menganalisisnya seorang Sosiolog atau analis dituntut untuk mempelajari beberapa hal dibawah ini :

Pertama, harus mengetahui Apa yang menjadi sumber konflik, *Kedua*, Siapa pihak yang terlibat, *Ketiga*, Apa yang menjadi sengketa dan isu konflik, *Keempat*, Apa saja taktik yang digunakan pihak - pihak yang berkonflik, *Kelima*, Apa saja yang

berubah seiring waktu, *Kenamii*, Bagaimana konflik meluas sehingga melibatkan lebih banyak pihak, wilayah yang lebih luas, serta isu yang lebih banyak. *Ketujuili*, Apa saja peran pihak-pihak lain (Seperti Penengah. Sekutu.audien) dalam konflik. *Terakhtir, Kedelapani*, Apa hasil/dampak dan akibat yg ditimbulkan oleh konflik.

Berbicara mengenai teori dan analisis di atas tentu sebagai pisau bedah bagi seorang Sosiolog atau pekerja sosial dalam menganalisa permasalahan sosial yang sedang coba dipecahkan dengan menggunakan berbagai teori. Tentu masih banyak teori lain yang dapat menggambarkan atau menjadi pisau analisa dalam penanganan social problem, tetapi empat teori di atas tidaklah mutlak hanya untuk mengkaji masalah sosial semata tetapi juga mampu menjadi analisis untuk yang lain, khusus pemula teori yang disampaikan dalam buku ini akan mampu membantu seorang Sosiolog atau Pekerja Sosial dalam menyikapi sesuatu hal yang sulit yang ingin dipecahkan.

BAB III PENANGANAN MASALAH SOSIAL MELALUI KEARIFAN LOKAL

A. Pendahuluan

Realitas sosial menunjukkan bahwa pasca tsunami dan konflik yang berkepanjangan yang dialami oleh masyarakat Aceh telah menimbulkan trauma yang mendalam dan telah merusak tatanan kehidupan masyarakat. Berbagai macam bencana sosial dan bencana alam telah membuat banyaknya perubahan pada kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah terjadi balapan liar di perjalanan yang dilakukan oleh anak-anak remaja di kota Banda Aceh pasca tsunami dan konflik (RI dan GAM). Namun masalah ini menyisakan berbagai macam persepsi masyarakat melihatnya, sehingga sangat dituntut pemecahan masalah (problem solving) untuk melihat apakah sumber masalah tersebut ada pada individu anak-anak remaja tersebut atau sumber masalah disebabkan oleh sistem.

Berdasarkan laporan dari media lokal di Aceh bahwa ada beberapa titik jalan yang digunakan oleh para remaja untuk melakukan aksi balapan liar tersebut. Kecamatan Baiturrahman dan Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh merupakan salah satu lokasi yang menjadi sasaran bagi para remaja untuk melakukan aksi balapan liar yang sangat mengganggu jalannya arus lalu lintas. Menurut Armensyah Thay, Balapan liar yang terjadi di Kota Banda Aceh sudah cukup meresahkan, bahkan mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya, seperti yang terjadi seminggu lalu. Seorang ibu bersama bayinya meninggal di jalan setelah ditabrak oleh para pembalap liar. (Serambi Indonesia, Senin, 19 Desember 2011).

Disisi lain aksi balapan liar yang dilakukan oleh remaja ini telah mencapai tingkat yang meresahkan bagi masyarakat dan merupakan problema aktual yang dihadapi orang tua, masyarakat dan terlebih-lebih masalah penting yang dihadapi oleh pemerintah dan negara. Keadaan seperti ini telah memberikan dorongan yang kuat untuk membahas dan mencari alternatif jalan keluar yang terbaik dalam menanggulangi masalah kenakalan remaja. Oleh karena itu penting sekali tanggapan terhadap persoalan mengenai cara dan tindakan guna menghantarkan generasi muda yang bertanggung jawab serta ikut dalam memberikan bantuan yang nyata kepada bangsa dan negara di masa depan.

Untuk menurunkan angka aksi balapan liar dijalanan yang terjadi telah banyak dilakukan penanganannya oleh kepolisian. Tetapi kebanyakan yang dilakukan hanya berkisar pada upaya-upaya pencegahan sesaat dengan tidak adanya pembinaan yang diberikan oleh pihak terkait terhadap anak-anak remaja yang melakukan aksi balapan liar dijalanan. Sehingga inilah yang mendasari pentingnya dibuat penelitian ini, agar aktifitas balapan liar ini bisa terpecahkan secara bersama. Karena kalau tidak dicari akar masalahnya, maka penyakit sosial remaja tersebut akan terus menjadi-jadi sehingga generasi penerus di Kota Banda Aceh akan rusak secara moral. Makanya secara konsep yang harus dikembangkan adalah membangun sinergitas antara kepolisian dan tokoh masyarakat, serta orang tua si remaja yang melakukan penyimpangan, sehingga akan terwujud remaja yang patuh terhadap ketertiban di jalan raya. Hal ini sebagaimana yang akan peneliti gambarkan dalam kerangka pikir dibawah ini:



Aksi Balapan liar yang dilakukan oleh anak-anak remaja dewasa ini semakin meningkat kualitas dan kuantitasnya, dan kita akui hal ini menjadi masalah nasional yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Remaja merupakan generasi penerus dan potensi bangsa dalam pembangunan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Berdasarkan pemaparan masalah yang dibahas pada bab Pendahuluan, maka akan dirumuskan masalah penelitian dengan melihat siapa remaja-remaja yang melakukan aksi balapan liar, dan bagaimana persepsi tokoh masyarakat terhadap aksi balapan liar yang dilakukan oleh anak-anak remaja, dan apa strategi pencegahan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan pencegahan terhadap aksi balapan liar anak-anak remaja di Kota Banda Aceh. Selanjutnya penelitian ini juga tidak hanya melihat persepsi tokoh masyarakat semata, tetapi juga melihat bagaimana pelaksanaan reusam (aturan) *gampong* dalam melihat masalah kenakalan remaja dibidang balapan liar dijalanan. Baik itu yang dilakukan oleh remaja setempat atau remaja lainnya. hal ini-pun jika dilokasi penelitian tersebut telah ada reusam *gampong* yang mengatur tentang penyimpangan yang dilakukan oleh remaja, jika belum ada, maka gagasan reusam *gampong* ini menjadi sebuah pengetahuan baru bagi masyarakat setempat dalam menjaga fungsi ketahanan sosial.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis. Penulis dalam penelitian ini berusaha memahami peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap kegiatan aksi balapan liar yang dilakukan anak-anak remaja. Dan konsep yang akan dikembangkan adalah melihat masalah kenakalan remaja ini apakah bersumber dari individu atau dari sistem. Yang istilah dalam masalah sosialnya disebut *Person Blame Approach* atau *System Blame Approach*.

B. Kajian Pustaka

Telah terdapat beberapa karya, baik itu dalam bentuk penelitian maupun buku, yang mengupas tema tentang berbagai macam masalah yang dihadapi oleh anak-anak remaja, tetapi penulis belum menemukan ada tulisan dalam bentuk karya ilmiah yang menjelaskan secara spesifik membahas tentang persepsi tokoh informal terhadap aksi balapan liar anak-anak remaja, Hal ini yang membuat penulis terdorong untuk melakukan penelitian ini. Namun untuk memper-

kaya akan kajian pustaka dan landasan teori maka penulis melihat beberapa kajian yang relevan dengan penelitian tentang persepsi tokoh masyarakat terhadap aksi balapan liar anak-anak remaja di kota Banda Aceh.

a. Defenisi Persepsi

Mangkunegara (dalam Arindita, 2002) berpendapat bahwa persepsi adalah suatu proses pemberian arti atau makna terhadap lingkungan. Dalam hal ini persepsi mencakup penafsiran obyek, penerimaan stimulus (Input), pengorganisasian stimulus, dan penafsiran terhadap stimulus yang telah diorganisasikan dengan cara mempengaruhi perilaku dan pembentukan sikap. Begitu juga Robbins (2003) mendeskripsikan persepsi dalam kaitannya dengan lingkungan, yaitu sebagai proses di mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Persepsi dalam arti umum adalah pandangan seseorang terhadap sesuatu yang akan membuat respon bagaimana dan dengan apa seseorang akan bertindak. Sedangkan dalam Pandangan yang sempit persepsi itu sebagai penglihatan, bagaimana seseorang melihat sesuatu. Hal inilah yang mendasari kenapa peneliti menginginkan bagaimana melihat persepsi tokoh masyarakat terhadap aksi balapan liar anak-anak remaja.

b. Tokoh Informal

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Junus Melalatoa, yang berjudul *Meneliti Pembangunan Masyarakat Gayo* di Kabupaten Aceh Tengah, dalam Koentjaraningrat dan Donald K. Emmerson, (1982), menjelaskan bahwa faktor kepemimpinan yang tak resmi (*informal leaders*) sangat menentukan situasi kemakmuran di masyarakat. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kepemimpinan pada tokoh informal ini sangat menentukan arah pembangunan masyarakat, karena kepribadian dan kharismatik yang dimiliki oleh tokoh tersebut sangat membantu dalam mengembangkan kenakalan remaja di perkotaan. Berdasarkan kajian pustaka di atas, sangat bermanfaat untuk kawasan perkotaan di berbagai kabupaten yang ada di Aceh, karena rujukan di atas memiliki nilai kearifan lokal yang sangat sesuai dengan kondisi adat istiadat di Aceh yang menganut Syariat Islam.

Menurut Kartini Kartono, (1998:8), pemimpin informal adalah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pem-

impin, namun karena ia memiliki sejumlah kualitas unggul, dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat. Pemahaman Kartini Kartono ini menerangkan bahwa kepemimpinan informal dalam peranan sosial di masyarakat memberi pengaruh berupa sugesti, larangan dan dukungan kepada masyarakat luas untuk menggerakkan atau berbuat sesuatu.

Pendapat di atas juga disampaikan oleh Profesor Kimbal Young, sosiolog terkenal di Amerika Serikat dalam Kartini Kartono, (1998:10) mengatakan bahwa tokoh informal itu bentuk dominasi yang didasari kemampuan pribadinya yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu berdasarkan akseptansi/penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi khusus. Hal senada juga disampaikan oleh sosiolog Universitas Gadjah Mada, Profesor Soedjito, (1987), dalam bukunya yang berjudul *Aspek Sosial Budaya Dalam Pembangunan Pedesaan*, mengatakan bahwa pemimpin informal sangat menentukan keberhasilan suatu program di masyarakat, karena tokoh ini berperan penting dalam masyarakat.

Donald K. Emerson, (1984), mengatakan bahwa pemimpin informal di pedesaan sangat membantu dalam pemecahan persoalan-persoalan yang terjadi ditengah masyarakat untuk meningkatkan perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah. Penelitian yang dilakukan Donald K. Emmerson ini menjelaskan bahwa keberhasilan suatu pembangunan tidak terlepas dari dukungan dari tokoh setempat dalam hal ini pemimpin informal di *gampong* (pedesaan).

c. Ciri-ciri Tokoh (pemimpin) Informal antara lain:

Menurut Kartini Kartono, (1998), ciri-ciri pemimpin informal adalah sebagai berikut:

- 1). Tidak memiliki penunjukan formal atau legitimasi sebagai pemimpin
- 2). Kelompok rakyat atau masyarakat menunjuk dirinya, dan mengakuinya sebagai pemimpin. Status kepemimpinannya berlangsung selama kelompok yang bersangkutan masih mau mengakui dan menerima pribadinya.
- 3). Dia tidak mendapatkan dukungan/backing dari suatu organisasi formal dalam menjalankan tugas kepemimpinannya

- 4). Biasanya tidak mendapatkan imbalan balas jasa, atau imbalan jasa itu diberikan secara suka rela.
- 5). Tidak dapat dimutasikan, tidak pernah mencapai promosi, dan tidak memiliki atasan. Dia tidak perlu memenuhi persyaratan formal tertentu.
- 6). Apabila melakukan kesalahan, dia tidak dapat dihukum, hanya saja respek orang terhadap dirinya jadi berkurang, pribadinya tidak diakui, atau dia ditinggalkan oleh masyarakat.

Ciri-ciri yang disebutkan oleh Kartini Kartono di atas menjelaskan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat peran seorang tokoh informal (tokoh agama) sangat diperlukan dalam pembangunan masyarakat, dan tokoh ini tidak lahir dari proses demokrasi tetapi lahir dari individunya yang baik dan juga memiliki kemampuan lebih, dan tokoh ini juga dalam membantu masyarakat tidak mengharap balas jasa lebih kepada sukarela.

Hal di atas juga sependapat dengan Harun Nasution, (1995), mengatakan bahwa pemimpin informal sangat berperan dalam pembangunan masyarakat, khususnya tokoh agama, hal ini dicontohkan tentang figur seorang Kiai (ustadz/ tengku) masih mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat. Dalam mengubah sikap mental umat, dari sikap yang tidak menguntungkan menjadi sikap yang mendorong bagi pembangunan.

Harun Nasution (2000), menggambarkan bahwa kepemimpinan seorang Kiai (ustadz/ tengku) masih sangat baik dalam mengajak masyarakat untuk menuju perubahan diri, baik itu dalam konteks memberikan pembinaan manusia secara spiritual keagamaan maupun pembinaan manusia sebagai fungsi sosial. Hal ini menurut pemahaman penulis juga sangat relevan dengan arah bagaimana tokoh masyarakat mengarahkan remaja yang telah menyimpang. Seorang kiai (ustadz) kegiatannya sehari-hari adalah di masjid. Lembaga masjid bisa dijadikan sarana untuk menggali potensi remaja yang melakukan perbuatan menyimpang dalam merubah keadaannya, karena masyarakat Provinsi Aceh sekarang menganut hukum Syariah Islam, jadi masjid bisa menjadi salahsatu tempat dalam pembinaan remaja yang menyimpang.

Pendekatan di atas juga merupakan metode yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW, dalam mengembangkan dakwahnya. Masjid Nabawi bukan hanya dijadikan sebagai tempat untuk beribadah tapi juga dijadikan sebagai tempat menggali ilmu pengetahuan agama dan juga sebagai tempat dalam mengatur strategi politik. Tujuan dari seorang pemimpin informal adalah untuk mengatur masyarakatnya dengan baik dan menciptakan kemampuan masyarakatnya untuk peduli terhadap perkembangan pembangunan. Dalam hal ini kemampuan yang sangat dituntut dalam masyarakat untuk kemampuan untuk menjaga kelestarian dan ketertiban lingkungannya.

d. Memahami Kearifan Lokal

Kearifan lokal dalam bahasa asing sering dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*) atau kecerdasan setempat (*local genius*). Menurut Saini, (2005), Kearifan lokal adalah sikap, pandangan, dan kemampuan suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya, yang memberikan kepada komunitas tersebut daya tahan dan daya tumbuh di dalam wilayah dimana komunitas itu berada. Dengan kata lain kearifan lokal adalah jawaban kreatif terhadap situasi geografis-geopolitis, historis, dan situasional yang bersifat lokal.

Menurut Saifuddin Dhuri, dalam Sutoro Eko, (2007:146), mengatakan bahwa pembangunan di Aceh dengan konservasi kearifan lokal akan menjadi ruh dari semangat untuk mengembalikan peradaban besar. Salah satu prinsip yang dipegang dalam filosofi Aceh adalah berorientasi kepada tradisi dan masa lalu. Artinya masyarakat Aceh lebih kuat mengarkankan kehidupan pada tradisi dan masa lalu sebagai hasil kebanggaan. Kearifan lokal yang ada dalam masyarakat mesti digali, dikembangkan, guna dimasukkan dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat, karena dalam pembinaan spiritual keagamaan di *gampong* (pedesaan) ketokohan dari seorang pemimpin informal (tokoh agama) itu yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat.

Bambang Nugroho, (2005), kearifan lokal biasanya dipersonifikasi pada seseorang yang secara kepribadian dinilai matang, konsisten, rela berkorban, tidak menang sendiri, memiliki wawasan yang luas tapi tetap mau menerima kritik orang lain dan mau menegalah. Hal ini yang sering disebut di masyarakat dengan orang bijak-

sana (arif), dan dalam bahasa Inggris orang yang arif disebut *wiseman*.

e. Faktor-faktor Remaja Melakukan Balapan Liar

Berdasarkan hasil penelitian Gigih Bena Rendra, (2009), jelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya aksi balapan liar oleh remaja adalah faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri. Sedangkan kedua adalah faktor eksternal, yang merupakan faktor di luar individu yang berpokok pangkal pada lingkungan yang memiliki korelasi dengan kejahatan. Selanjutnya dalam penelitian tersebut juga dituntut adanya peran serta kepolisian dan stakeholder lainnya dalam pencegahannya.

Selain itu juga penelitian Hendarayatna (2008), menjelaskan bahwa faktor penyebab utama maraknya kenakalan remaja adalah karena kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua, sehingga banyak orang tua memberikan kasih sayang hanya melalui materi semata. Hal ini banyak ditemukan dikota-kota besar di Indonesia, khususnya di kota Medan.

Berdasarkan dari tinjauan pustaka di atas dapat dipahami bahwa pengakuan, perhatian, pujian, dan kasih sayang seorang orang tua dan tokoh masyarakat tersebut sangatlah penting dalam menjaga para remaja yang melakukan penyimpangan, maka apabila kurangnya control social, maka si remaja tersebut akan mencari tempat lain. Salah satu tempat yang paling mudah mereka temukan untuk melakukan perbuatan balapan liar adalah di lingkungan teman sebayanya yang melakukan perbuatan menyimpang.

Dalam penelitian ini yang membedakan strategi yang dilakukan oleh penulis dengan para peneliti ini adalah kalau para peneliti ini hasilnya adalah melihat pada konteks praktis semata, tetapi penulis akan mengarahkan penelitian ini pada konteks teori yang dikemukakan oleh Eltzen (dalam Soetomo, 2009) yang menjelaskan bahwa apakah sumber masalah yang dilakukan oleh remaja itu datang dari individu sendiri atau dari sistem atau istilah lainnya disebut dengan *the person blame Approach and the System blame approach*. Disamping itu juga dalam konteks sosiologi peneliti akan melihat bagaimana pranata social itu berjalan, khususnya pranata keluarga, pranata pendidikan dan pranata agama dalam ilmu struktur social.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa peran tokoh informal masyarakat, dan hambatan-hambatan yang dihadapi tokoh masyarakat *gampong* dalam memberikan pencegahan terhadap aksi balapan liar anak-anak remaja melalui kontrol sosial yang tinggi dari masyarakat setempat. Penelitian ini juga tidak hanya melihat persepsi tokoh masyarakat semata, tetapi juga melihat bagaimana pelaksanaan reusam (aturan) *gampong* dalam melihat masalah kenakalan remaja dibidang balapan liar dijalankan. Baik itu yang dilakukan oleh remaja setempat atau remaja lainnya.

Selanjutnya hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ketahanan sosial masyarakat, dan juga menjadi masukan bagi pihak keamanan dan keteriban bagi pengguna jalan raya. Hal lain yang ingin digali dari penelitian ini adalah membangun sinergisitas antara orang tua yang anaknya melakukan perbuatan menyimpang dan tokoh masyarakat sebagai pembina anak-anak remaja yang melakukan penyimpangan serta muspika (polisi dan camat) setempat. Disamping itu juga penelitian ini sebagai sesuatu yang sangat penting sebagai evaluasi terhadap efektifitas proses pembelajaran yang selama ini telah dikembangkan oleh peneliti sebagai dosen yang mengajarkan matakuliah masalah-masalah sosial.

C. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, (2005:60) penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual atau kelompok. Penelitian kualitatif juga mempunyai dua tujuan yang utama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

Penelitian lapangan ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan, mengungkap dan menjelaskan tentang persepsi tokoh informal dalam melihat aksi balapan liar yang dilakukan oleh anak-anak remaja dalam mewujudkan kawasan kota yang bebas dari aksi brutal

anak-anak remaja dijalankan, dan untuk kebenaran datanya ada proses uji keabsahan data, menggunakan triangulasi dengan sumber data dan triangulasi dengan metode. Karena jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, maka tidak menggunakan berbagai istilah atau metode yang dipakai dalam penelitian kuantitatif. Hal ini perlu ditegaskan sebab seringkali penelitian kualitatif justru menggunakan istilah atau piranti yang dipakai dalam penelitian kuantitatif. Istilah-istilah yang ada dalam penelitian kuantitatif dimaksud, seperti: variabel, instrumen pengukuran, validitas, reliabilitas obyektifitas dan sebagainya.

Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif ini digunakan istilah-istilah seperti kredibilitas (bukan validitas internal), transferabilitas (bukan validitas eksternal). Atau dependabilitas (bukan reliabilitas). Selain itu dan ini yang sering disalah pahami, penelitian ini tidak menggunakan istilah responden (sebagaimana dalam penelitian kuantitatif) akan tetapi informan. (Sanafiah Faisal, 2001:32). Pada tahapan ini penulis menggali informasi dari masyarakat dikawasan wisata yang termasuk korban bencana dengan melihat dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual atau kelompok.

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis. Penulis dalam penelitian ini berusaha memahami peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu. (Lexy J. Moleong, 1993: 9). Jadi yang dibicarakan dalam penelitian ini adalah aspek subyektif perilaku orang sehingga peneliti berusaha masuk dalam dunia subyektif peneliti. Peneliti berusaha untuk masuk kedalam dunia konseptual para subyektif yang diteliti, sehingga peneliti mengerti apa dan bagaimana suatu peristiwa tersebut dalam kehidupan sehari-harinya dengan tujuannya adalah agar peneliti bisa mengetahui kondisi informan dan bisa menggali informasi mendalam.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Baiturrahman dan Meuraxa, Kota Banda Aceh. Kedua Kecamatan ini dipilih karena di kecamatan ini menjadi salah satu tempat para anak remaja melakukan aksi bapalan liar dijalan raya. Waktu penelitian bulan April sampai September 2012.

3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah tokoh informal yang ada dalam wilayah Kecamatan Baiturrahman dan kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi sering disebut sebagai proses pengamatan, dalam istilah yang sederhana adalah proses dimana peneliti atau pengamat terjun langsung ke lokasi penelitian. (Consuelo G. Sevilla, dkk, 1993: 198), Observasi juga dapat dipahami sebagai proses "pemeran serta sebagai pengamat" (Moleong, 2005:326-332) Artinya, peneliti hanya berperan sebagai pengamat dan menafsirkan atas apa yang terjadi dalam sebuah fenomena. Namun demikian untuk memperoleh tujuannya, observasi tidak semudah yang dibayangkan. Sebab, dalam bergaul dengan informan, peneliti harus berhadapan dengan informan yang mempunyai berbagai macam perasaan, keyakinan, pandangan serta sikap tertentu yang tentu saja tidak mudah untuk diungkap.

Sebagaimana Koenjharaningrat, kesulitan ini harus diikuti dengan adanya perhatian yang besar terhadap aspek-aspek kemanusiaan. Hal ini dilakukan karena seorang peneliti akan terikat kepada norma-norma, serta aturan-aturan tertentu dan langsung terkena keyakinan, pandangan serta sikap dari para informannya. Menurut Koenjharaningrat, aspek-aspek kemanusiaan yang perlu diperhatikan dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1). Sikap, pengetahuan serta pandangan peneliti terhadap lingkungan masyarakat yang ditelitinya, pada umumnya dan terhadap para informan, responden serta warga masyarakat lainnya pada khususnya
- 2). Sikap serta pandangan para informan, responden serta warga masyarakat lainnya terhadap diri peneliti (termasuk pandangan mereka terhadap peneliti asing, atau pandangan mereka terhadap peneliti dari jenis kelamin lain)
- 3). Masalah keuntungan maupun kesulitan penelitian tunggal jika dibandingkan dengan penelitian bersama dalam suatu

tim

- 4). Masalah pengembangan *rapport* yang wajar dalam wawancara serta kemampuan peneliti untuk mengenal dirinya sendiri, yang tentu erat sangkut pautnya dengan kedua masalah yang tersebut dalam butir 1, 2 dan 3
- 5). Masalah waktu dalam penelitian masyarakat
- 6). Sikap para pegawai pemerintah di pusat maupun di daerah terhadap peneliti dan proyek penelitiannya
- 7). Masalah penyesuaian pandangan emik dari para informan, responden dan warga masyarakat, dengan pandangan etik dari peneliti terhadap topik serta soal-soal yang sedang ditelitinya (Koentjaraningrat, 1982:8-9).

Observasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini sebanyak dua kali Namun awalnya observasi telah peneliti lakukan sebelumnya, ketika peneliti melihat aksi balapan liar yang masuk kedalam lokasi penelitian. Observasi ini meliputi gambaran umum lokasi penelitian, partisipan (aktor yang terlibat) dalam pembinaan anak-anak remaja dalam wilayah kecamatan Meuraxa dan Baiturrahman.

b. Focus Group Discussion (FGD)

Focus Group Discussion dilakukan untuk menggali lebih dalam lagi persoalan yang dihadapi dalam pembinaan remaja yang melakukan aksi balapan liar di kecamatan Baiturrahman dan Meuraxa. Melalui FGD informan diharapkan menjadi lebih leluasa mengungkapkan pendapatnya dan juga terjadi proses berbagai pengalaman di antara sesama informan. Kegiatan ini dilakukan pada tokoh informal di wilayah penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode mengumpulkan bahan-bahan dalam bentuk dokumen yang relevan dengan tema penelitian. Misalnya dengan melakukan penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, jurnal, surat kabar, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan tema penelitian.

Dokumentasi yang penulis maksud adalah dokumentasi dalam bentuk data sekunder. Tujuan dari perlunya dokumentasi ini adalah agar penulis terbantu dalam menyiapkan data dengan baik dan ada referensi yang mendukung yang sesuai untuk tema penelitian. Sistem

dokumentasi ini bukan hanya memudahkan penulis untuk mencari data lapangan tapi juga untuk menjadi arsip penting bagi penulis dan bagi kelompok tertentu yang membutuhkan.

d. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara dilakukan dengan para informan yang telah dipilih dari berbagai unsur yang menjadi bagian dari objek penelitian. Mengingat penelitian dilakukan di Kecamatan Baiturrahman dan kecamatan Meuraxa kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, maka informan yang dimaksud adalah tokoh informal di kedua kecamatan tersebut. Dan untuk melihat kebijakan yang diterapkan di tingkat kecamatan, maka akan dilakukan wawancara dengan muspika setempat, maka dilakukan wawancara dengan camat, Kapolsek dan *keuchik* yang terlibat dalam penanganan kenakalan remaja di wilayah penelitian tersebut.

Untuk jumlah informan masih tentative belum dapat ditentukan akan tetapi peneliti akan memberikan gambaran yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini, antara lain, untuk tokoh formal adalah camat dan *keuchik* yang ada dilingkungan Kecamatan Baiturrahman dan Kecamatan Meuraxa. Dan untuk melihat model penanganan pembinaan terhadap remaja yang melakukan aksi balapan liar akan dilakukan wawancara dengan tokoh informal yang ada dalam lokasi penelitian. Selanjutnya untuk pertimbangan keamanan di jalan raya akan dilakukan wawancara dengan Kapolsek yang ada dalam wilayah penelitian.

Wawancara dilakukan secara mendalam (*in depth interview*) untuk mendapatkan informasi dan petunjuk-petunjuk tertentu dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian. Jenis wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak berencana. Sedangkan berdasarkan bentuk pertanyaan wawancara, wawancara dalam penelitian ini menggunakan model wawancara terbuka.

Model wawancara tertutup yang menghendaki jawaban-jawaban yang terbatas, model wawancara terbuka menghendaki informan memberikan informasi yang tidak terbatas. Pemilihan ini dilakukan demi memperoleh suatu informasi yang mungkin tidak akan didapatkan melalui model pertanyaan yang tertutup. Sebab tidak jarang informasi-informasi yang sangat berharga akan diperoleh dan ini

tidak akan didapatkan melalui model pertanyaan yang tertutup.

e. Teknik *Sampling*

Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka teknik *sampling* yang digunakan tidak berdasarkan prosentase sebagaimana yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif. Penelitian ini hanya akan menjangkau sebanyak mungkin informasi yang mendalam dari berbagai sumber tanpa berpatokan kepada besarnya jumlah informan yang digali. Dengan demikian, tujuannya bukanlah memuaskan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang nantinya dikembangkan kedalam generalisasi. Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (*purposive sampel*).

Menurut Lexy J. Moleong, (2005: 165), Sampel bertujuan ini dicirikan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Rancangan sampel yang muncul tidak dapat ditentukan atau ditarik terlebih dahulu
- b. Pemilihan sampel yang bervariasi hanya dapat dicapai berdasarkan pertimbangan perolehan sampel sebelumnya. Artinya, informasi dicari dengan tujuan memperluas dan memperdalam atas informasi yang didapat sebelumnya. Pemilihan informasi seterusnya bergantung kepada kebutuhan peneliti. Jadi teknik *sampling* "snowball" (bola salju) sangat tepat dalam hal ini, yaitu mulai dari satu menjadi makin lama makin banyak.
- c. Penyesuaian berkelanjutan dari sampel. Pada mulanya setiap sampel dapat sama kegunaannya. Namun, sesudah makin banyak informasi yang masuk dan makin mengembangkan hipotesis kerja, akan ternyata bahwa sampel makin dipilih atas dasar fokus penelitian.
- d. Pencarian informasi dari informan akan segera berakhir jika informasi yang didapat dari informan terjadi pengulangan. Di sinilah, teknik *sampling* bertujuan tidak berdasarkan jumlah orang yang dijadikan informan, tetapi berdasarkan kejenuhan informasi. Misalnya, apabila informan sudah berjumlah lima (5) orang tetapi informasi yang didapat telah mendalam dan sudah terjadi pengulangan informasi, maka sudah saatnya pemilihan informan dihentikan.

Tujuan dari semua wawancara adalah agar penulis mendapatkan secara akurat data tentang proses penanganan terhadap aksi balapan liar remaja di kecamatan Baiturrahman dan Meuraxa yang dilakukan oleh tokoh informal, Camat, *Keuchik*, Kapolsek, dalam mewujudkan remaja yang tertib dan patuh dalam menggunakan jalan raya.

5. Analisis Data

Untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang obyek penelitian, penulis menggunakan teknis analisis deskriptif. Data yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi, wawancara dan pencatatan dilapangan selanjutnya diolah, diinterpretasikan dengan memfokuskan penajaman makna yang dideskripsikan dalam bentuk kata-kata daripada angka-angka sejauh mungkin dalam bentuk aslinya. Moleong, (2005: 6).

Dalam penelitian kualitatif yakni adanya : (1) Reduksi data, (2) display data, (3) mengambil kesimpulan dan verifikasi. Untuk beberapa tahap di atas untuk lebih jelasnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data kasar dan transformasi data kasar yang muncul dari beberapa catatan yang berhasil dihimpun. Proses reduksi data mengacu pada pengelompokan data yang dipilih untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.
- Pada penelitian ini penulis mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari informan penelitian, dengan menggunakan teknik pengumpulan data, semua dicatat sedetail mungkin. Selanjutnya penulis mengelompokkan informasi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan. Dalam proses ini penulis juga melakukan pemilihan dan pemilahan antara informasi yang relevan dengan subyek penelitian yang tidak sesuai.
- b. Display data adalah penyajian data dan informasi yang telah terkumpul dalam bentuk matrik atau uraian yang memberikan kemudahan dalam memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang diperlukan. Data-data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk uraian setelah melalui proses reduksi data. Penyajiannya dikelompokkan

berdasarkan informasi tentang peran tokoh Informal dalam penanganan masalah sosial yang dilakukan oleh anak remaja di jalan raya. Dan informasi lainnya tentang berbagai hal yang dianggap sebagai pendukung serta penghambat dalam penanganannya.

- c. Penarikan kesimpulan (verifikasi), proses pencarian arti/makna dari data yang terkumpul, memberikan catatan keteraturan, pola-pola yang dapat digunakan untuk menjelaskan, konfigurasi yang mungkin digunakan, alur sebab akibat serta proposisi. Kesimpulan yang diperoleh juga memerlukan verifikasi selama penelitian dilakukan. Penulis selanjutnya berusaha untuk menarik kesimpulan dari berbagai informasi yang telah dihimpun. Melakukan cross-check kembali dengan berbagai sumber. Konfirmasi kembali dengan berbagai pihak tentang hasil penelitian. Dalam hal ini penulis meminta pendapat, saran serta pendapat tentang kesimpulan sementara. Tetapi bukan berarti menghilangkan unsur obyektifitas hasil temuan penulis dilokasi penelitian. Tanggapan berupa masukan, penulis masukkan sebagai tambahan informasi.

Data dan informasi selanjutnya disampaikan secara deskriptif dengan pemaparan berdasarkan temuan-temuan hasil wawancara dan observasi dengan disertai cuplikan wawancara berupa kalimat langsung disertai komentar dari peneliti berdasarkan teori yang mendukung. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah pengumpulan, penyusunan penilaian dan penafsiran serta penyimpulan data. Penafsiran dilakukan dengan pemahaman intelektual, yaitu dengan tetap memperhatikan asas kausalitas dan rasionalitas.

6. Pengecekan Keabsahan data

Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sebagai data pembanding. Moleong, (2005: 178), Adapun triangulasi yang digunakan adalah triangulasi dengan sumber dan dan triangulasi dengan metode. Triangulasi dengan sumber adalah membanding dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber data yang berbeda. Dalam hal ini triangulasi dilakukan dengan jalan: 1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,

2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, 3) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang pada umumnya. Triangulasi dengan metode dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil dari berbagai teknik pengumpulan data dengan metode yang sama.

Tujuan triangulasi adalah untuk mengecek kebenaran data tertentu dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan dan sering dengan menggunakan metode yang berlainan, prosedur ini akan banyak memakan waktu, akan tetapi disamping mempertinggi validitas juga memberi kedalaman hasil penelitian.

Triangulasi dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda, misalnya observasi, wawancara dan dokumentasi. Misalnya hasil observasi dapat dicek dengan wawancara atau membaca laporan. Namun triangulasi bukan sekedar mengetes kebenaran data dan bukan untuk mengumpulkan berbagai ragam data, melainkan juga suatu usaha untuk melihat dengan lebih tajam hubungan antara berbagai data agar mencegah kesalahan dalam analisis data. Dan juga mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan sendirinya memberikan gambaran yang lengkap tentang masalah yang peneliti hadapi. Selain itu dalam triangulasi dapat ditemukan perbedaan informasi yang justru dapat merangsang pemikiran untuk lebih mendalam. Triangulasi dilakukan karena keinginan bersikap hati-hati terhadap data yang disampaikan oleh informan. Dalam hal ini triangulasi dilakukan dengan melakukan wawancara dari berbagai sumber dengan perspektif yang berbeda dari masyarakat dan tokoh muspika setempat yang berada dalam wilayah penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Balapan Liar Remaja Di Lokasi Penelitian

a. Kondisi Balapan Liar Remaja di Kecamatan Meuraxa

Kecamatan Meuraxa adalah salah satu kecamatan di Kota Banda Aceh, dengan luas wilayah Kecamatan 725,8 Ha, terbagi ke dalam 15 (lima belas) desa/*gampong* dan 1 (satu) kelurahan, selain itu Ke-

Pengendalian Masalah Sosial

camatan Meuraxa memiliki 2 kemukiman, yaitu Kemukiman Tgk Chik Lamjabat dan Kemukiman Meuraxa. Jumlah Penduduk Meuraxa, 11.232 Jiwa, diantaranya 6,168 laki-laki dan 5.064 perempuan.

Tabel Lokasi Balapan liar dalam Wilayah Gampong Kecamatan Meuraxa

No	Nama Gampong/Kelurahan
1	Aleu Deah Tengoh
2	Asoe Nanggroe
3	Baru
4	Blang
5	Blang Oi
6	Cot Lamkueweuh
7	Deah Baroe
8	Deah Glumpang
9	Lambung
10	Lamjabat
11	Lampaseh Aceh
12	Pie
13	Punge Jurong
14	Punge Ujong
15	Surien
16	Ulee Lheue

Sumber : Sekretaris Camat Meuraxa

Dari ke enam belas gampong di atas yang menjadi titik lokasi balapan Liar di kecamatan Meuraxa adalah gampong Cot Lamkueweuh, Gampong Lambung dan Gampong Pie.

b. Kondisi Balapan Liar Remaja di Kecamatan Baiturrahman

Baiturrahman merupakan salah satu kecamatan di kota Banda Aceh yang memiliki 9 Gampong dengan luas wilayah 453,90 Ha. Berikut gampong-gampong yang berada dalam lokasi wilayah balapan liar di Kecamatan Baiturrahman.

Masrizal, MA

Penanganan Masalah Sosial Melalui Kearifan Lokal

Tabel Lokasi Balapan liar dalam Wilayah Gampong Kecamatan Baiturrahman

No	Nama Gampong
1	Ateuk Deah Tanoh
2	Ateuk Jawo
3	Ateuk Munjeng
4	Ateuk Pahlawan
5	Neusu Aceh
6	Peuniti
7	Seutui
8	Sukaramai
9	Kampung Baru

Sumber : Sekretaris Camat Baiturrahman

Dari beberapa gampong tersebut yang menjadi lokasi Penelitian adalah di Gampong Setui dan Neusu Aceh. Masyarakat yang tinggal pada lokasi ini sangat merasa terganggu saat terjadinya balapan liar yang dilakukan oleh anak-anak remaja, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Pak Sulaiman, Tokoh masyarakat:

" Ketika puasa tahun lalu 2011, di jalan raya depan terminal lama Setui ini, banyak sekali remaja dari kumpulan geng motor yang melakukan aksinya, bahkan tidak sedikit dari mereka yang luka-luka karena jatuh dari motor. Dan yang menyulitkan warga untuk mengusir mereka adalah karena sebagian dari mereka yang melakukan balapan adalah dari anak TNI/Polri dan sangat sedikit presentasinya dari warga sipil gampong. Dan apabila ada warga kami yang melakukannya maka akan ditegur oleh Kepala lorong masing-masing, dan yang ditegur adalah orang tua nya bukan si remaja tersebut. Namun tidak sedikit dari orang tua yang masih tidak mematuhi nya pada saat itu, tapi sekarang sejak 2012, tidak ada lagi kami lihat balapan di gampong kami, seperti yang saya lihat minggu lalu sekarang sudah pindah ke lokasi jalan depan Terminal Batoh."

Selanjutnya hal senada juga di sampaikan tengku Amin di Gampong Neusu Aceh, yang mengatakan bahwa remaja yang melakukan Balapan liar ini bukanlah warga sekitar gampong kami, tetapi remaja

yang datang dari *gampong* lain yang memang sudah tergabung dalam komunitas geng motor, dan sampai sekarangpun mereka masih beraksi tapi tidak di lokasi ini lagi sudah di *gampong* Batoh, dan sebagian dari mereka anak Pejabat, TNI/Polri, Anak China dan lain-lain. Sedangkan beberapa dari remaja kami yang melakukan balapan liar adalah karena trauma, ayah dan ibunya di bawa tsunami.

Berdasarkan dari pendapat warga di *Gampong* Setui dan Nenui Aceh ini didapatkan bahwa penyebab remaja melakukan balapan liar adalah karena kurangnya kepedulian dari si Orang tua remaja, pengaruh trauma yang dialami oleh si anak, kurangnya control sosial dari masyarakat setempat, dan ditambah ketidak beranian warga setempat menegur si remaja karena berasal dari keluarga TNI/Polri, kemudian belum adanya landasan hukum bagi warga dalam menertibkan remaja yang melakukan aksi balapan liar, semacam reusam *gampong*.

A. Persepsi Tokoh Informal yang Terlibat dalam Penanganan Balapan Liar di Kecamatan Baiturrahman dan Meuraxa

Tokoh Informal yang terlibat dalam penanganan balapan liar Anak Remaja di Kecamatan Baiturrahman dan Meuraxa adalah tokoh agama dan tokoh pemuda dengan membangun kerjasama dengan aparat *gampong* (*Keuchik* dan aparaturnya). Adapun yang menjadi peran utama tokoh agama dan tokoh pemuda di Kecamatan Baiturrahman dan Meuraxa dalam Penanganan Balapan Liar Anak Remaja adalah dengan mendidik anak Remaja untuk tidak lagi melakukan aktifitas balapan liar di jalan raya dengan memberikan peringatan secara tertulis secara simbolik di lokasi yang menjadi lokasi balapan liar dan memanggil satu persatu anak remaja yang terlibat balapan liar dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga keselamatan jiwa sendiri dan berguna jalan raya. Kegiatan sentral dari tokoh informal di Kecamatan Baiturrahman dan Meuraxa dalam penanganan balapan liar tidak hanya berlangsung dua tahun yang lalu (2009-2010) tetapi juga tahun 2006 pasca tsunami telah dipraktikkan Hal ini berdasarkan wawancara dengan bapak Ilyas, seorang tengku Imam di *Gampong* Pie, menearangkan kepada penulis bahwa:

“ Balapan Liar yang terjadi di *Gampong* Pie kecamatan Meuraxa yang dilakukan oleh anak-anak remaja sudah berlangsung

Penanganan Masalah Sosial Melalui Kearifan Lokal

sejak 2006 lalu, sebagian besar mereka adalah anak dari TNI/Polri, namun untuk menjaga agar tidak berpengaruh kepada pemuda di *gampong*, maka kami sepakat dengan pak *keuchik* agar melakukan razia setiap sore hingga pukul 10 malam, khususnya malam minggu, dan kenapa ini masih kami jalankan sampai dengan sekarang, karena hanya itu kekuatan bagi kami dalam menjaga pemuda kami agar jangan terpengaruh dengan budaya balapan liar tersebut.”

Selanjutnya pernyataan Ijal, seorang Pemuda *Gampong* Pie yang ikut terlibat dalam penanganan balapan Liar di *Gampong* Pie menyatakan bahwa :

“Kami sangat berharap adanya kerjasama yang baik terbangun antara pihak kepolisian dengan pemuda *Gampong* sehingga dalam menangani balapan liar ini bisa teratasi dengan baik. Dan tidak merugikan satu kelompok. Kenapa hal ini disampaikan karena pengalaman pahit yang diterima pemuda *Gampong* Pie saat tahun 2006 dimana beberapa pemuda dibawa ke kantor polisi karena memukul salah satu anak remaja yang melakukan balapan liar, padahal disatu sisi mereka mencegah adanya balapan liar tapi disisi lain mereka harus berurusan dengan hukum.”

Berdasarkan dari pernyataan di atas, masyarakat di *Gampong* Pie sangat peduli dengan perkembangan generasi penurusnya (anak remaja) sehingga ini membuktikan bahwa tokoh informal di *gampong* ini peduli dengan keberlangsungan remaja dimasa yang akan datang. Perkembangan remaja dalam penanganan Balapan Liar di Kecamatan Meuraxa berdasarkan pada hasil focus Grupos discussion (FGD) yang dilaksanakan di *Gampong* Lamkewuh yang dihadiri oleh 3 *Gampong* yakni *Gampong* Lambung, *gampong* Pie dan *Gampong* Lamkuweuh, didapatkan beberapa hal: *pertama*, Masyarakat mengharapakan terbangunnya sinergi antara masyarakat dan kepolisian, *ketiga* penting adanya control social yang baik dari masyarakat terhadap aksi balapan liar dan *Ketiga*, adanya pembinaan terhadap remaja yang melakukan balapan liar, khususnya remaja yang berdomisili dalam *gampong* tersebut. Dan *keempat*, diberikannya sanksi social pada remaja yang melakukan balapan liar.

Untuk kecamatan Baiturrahman tidak dilakukan FGD karena keterbatasan waktu dari tokoh informalnya sehingga penggalan in-

formasinya melalui wawancara mendalam, didapatkan beberapa hal yang menjadi penanganan balapan liar bagi remaja: pertama penting adanya pembinaan terhadap remaja yang melakukan balapan liar, kedua pihak kecamatan membuat sebuah reusam atau qanun, peraturan camat dalam bentuk tertulis tidak membolehkan balapan liar dijalanan, karena sangat mengganggu ketertiban dijalan raya. Ketiga, pentingnya peningkatan patroli oleh pihak kepolisian.

Berikut kutipan Pernyataan pemuda *Gampong* Neusu Aceh, yang menerangkan bahwa:

“Di *Gampong* kami dulu pada tahun 2010 pernah ada aksi balapan liar yang dilakukan oleh remaja, tetapi itu tidak berjalan lama karena kami di *gampong* cepat musyawarah dengan pak *keuchik* agar segera mengusir mereka, karena sudah meresahkan masyarakat, dengan suara motor yang begitu keras membuat warga tidak nyaman, sehingga kami dengan beberapa orang pemuda dan orang tua turun kejalan dan menasihati anak-anak tersebut agar tidak mengulanginya lagi untuk balapan diseputaran *gampong*, akhirnya redalah tidak ada balapan lagi, kalau tidak kami turun kejalan maka akan banyak menimbulkan korban luka-luka, dan ada beberapa diantaranya warga kami juga yang ikut dalam balapan.”

Begitu juga pernyataan lainnya dari Pak Muhammad di *Gampong* Setui mengatakan bahwa:

“Anak-anak remaja yang balapan tersebut adalah anak dari orang kaya, anak china, polisi dan juga TNI yang balapan tersebut, awalnya kami tidak peduli tetapi karena sudah menjadi-jadi mereka yang mengakibatkan masalah bagi warga pengguna jalan maka kami sepakat dengan warga agar melaporkan mereka ke Kapolsek Baiturrahman, dan pada satu hari kami bersama tim kapolsek menangkap anak tersebut dan menangkap motornya (hondanya) sehingga setelah itu mulai berkurang tidak ada balapan lagi dilokasi kami, malah kami dengar sudah pindah ke Terminal batoh sekarang.”

Dari beberapa pernyataan di atas jelaslah bahwa tokoh informal dan tokoh formal pada dua Kecamatan (Meuraxa dan Baiturrahman) terlibat dalam memberikan arahan kepada remaja yang melakukan aksi balapan liar, sehingga ini jelas bahwa aksi balapan liar ini harus

dihentikan karena sangat merugikan pengguna jalan raya, dan juga mempengaruhi budaya bagi remaja lainnya.

B. Strategi Penanganan Balapan Liar Anak-anak Remaja di Kecamatan Meuraxa dan Baiturrahman

Strategi yang digunakan tokoh informal dalam penanganan aksi balapan liar anak remaja adalah: Pertama, untuk kecamatan Meuraxa, pemuda dan tokoh masyarakat beserta pak *keuchik* membangun koordinasi dengan menurunkan semua pemuda membawa kayu ke seputaran jalan raya, di antaranya pemuda *gampong* Lambung, *Gampong* Pie dan Cot Lamkueweuh. Selanjutnya, tokoh agama setelah menangkap mereka menasihati agar jangan mengulangi aksi balapan liar dijalan raya. Dan juga membangun kerjasama dengan pihak kepolisian setempat untuk melakukan patroli diseputaran jalan raya tersebut. Kedua, di Kecamatan Baiturrahman, pemuda, tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya melakukan pembinaan anak-anak remaja yang terlibat dalam aksi balapan liar dengan menyurati orang tuannya, dan melakukan patroli bekerjasama dengan kepolisian dan terakhir mengusulkan membuat qanun *gampong* tentang keamanan jalan raya.

Strategi di atas adalah metode tokoh agama, pemuda dan tokoh masyarakat lainnya dalam penanganan aksi balapan liar di kecamatan Meuraxa dan Baiturrahman, yang bertujuan mewujudkan remaja yang tertib di jalan raya dan siap dalam menjaga ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi segala tantangan kebudayaan global yang sekarang sedang berjalan, dengan selalu membangun komunikasi dan koordinasi yang baik antara tokoh agama dengan tokoh formal *gampong* dan kecamatan hingga ke kabupaten. Metode yang dilakukan oleh tokoh agama dan pemuda di atas sesuai dengan kondisi sistem sosial masyarakat Aceh yang memiliki budaya ke timuran.

Sebagaimana yang disampaikan Illiza Sa'aduddin Djamil, wakil walikota Banda Aceh, dalam pidato ringkasnya yang dikutip dalam Harian Serambi Indonesia, menerangkan bahwa ia sangat mendukung pihak kepolisian dan masyarakat dalam menangani balapan liar yang dilakukan oleh anak-anak remaja diwilayah yang dipimpinnya, khusus untuk kawasan yang mejadi titik balapan liar, beliau menginstruksikan kepada dinas terkait agar menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan raya, karena orang islam

tersebut cinta dengan ketertiban dan sesuai dengan tuntunan Syariat Islam. Namun perlu kita ketahui bahwa merubah remaja Aceh sangat sulit, karena konflik yang berkepanjangan telah menyisakan trauma yang mendalam dan telah merusak tatanan kehidupan masyarakat, setelah runtuhnya kerajaan Aceh pada masa penjajahan, kemudian bersama-sama Republik Indonesia melanjutkan perjuangan merebut kemerdekaan pada tahun 1945, kemudian dilanjutkan dengan pemberontakan Darul Islam Indonesia (DI/TII) untuk membentuk Negara Islam Indonesia (NII), dan ditambah lagi dengan gerakan Aceh merdeka (GAM) dari tahun 1973 yang bertujuan untuk menuntut kemerdekaan kepada pemerintah Republik Indonesia (RI), karena telah dianggap telah menjajah Aceh. begitu juga sebelum redanya trauma karena konflik, pada tanggal 26 desember 2004 Aceh mengalami musibah yang maha dahsyat dengan datangnya musibah gempa dan tsunami.

Pejalaran panjang konflik yang dialami masyarakat Aceh telah banyak menyita tenaga dan pikiran yang seharusnya dapat membangun Aceh secara bersama kearah yang lebih baik. Namun perjalanan panjang konflik tersebut akhirnya membuahkan hasil kesepakatan antara Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 15 Agustus 2005, hal ini tidak terlepas dari rahmat tsunami yang membuat Aceh bangkit kembali dari keterpurukan karena konflik dan trauma tsunami.

Sejarah kelam tersebut telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat termasuk remaja yang ogal-ogalan di jalan raya. Pada saat Provinsi Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dari tahun 1989 sampai dengan 1998 dan darurat militer di Aceh tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, kehidupan masyarakat Aceh menjadi tidak menentu, tidak boleh berkumpul-kumpul, setiap kegiatan yang dibuat oleh warga dicurigai, serta adanya kewajiban untuk jaga malam yang telah menyita waktu dan tenaga masyarakat untuk memikirkan kebutuhan keluarga.

Secara umum kehidupan anak remaja di Kota Banda Aceh pasca tsunami sangat memprihatinkan, dimana belum adanya aturan atau ganun yang tegas mengatur tentang larangan balapan liar di jalan raya membuat banyak remaja yang tidak patuh aturan dan lebih memilih melawan aturan, ini membuktikan telah lemahnya nilai control dari orang tua dan masyarakat sekitarnya terhadap perilaku

yang dipertontonkan oleh remaja tersebut. Untuk itu sikap yang ariief perlu dinampakkan oleh orang tua, guru di sekolah dan masyarakat di *gampong*, agar memberikan nilai-nilai moral terhadap remaja agar pentingnya menjaga kenyamanan di jalan raya. Seharusnya Syariat Islam menjadi kekuatan bagi orang tua, guru dan masyarakat Aceh untuk menasahati anak yang berperilaku menyimpang, dan memajukan melestarikan budaya Islam, karena hanya satu-satunya di Indonesia yang memiliki kekhususan undang-undang peraturan daerah yang sudah diakui secara hukum di Indonesia.

Eksistensi budaya lokal dalam pemahaman ajaran islam harus ditegaskan karena memiliki kearifan tersendiri dalam mewujudkan daerah yang *Baldatun Thairiyatun Warrabul Ghinfur* (aman, damai dan sejahtera). Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Masrizal, (2009) yang mengatakan bahwa tokoh informal (tokoh agama dan tokoh adat) sangat berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat pasca bencana gempa dan tsunami di Aceh.

C. Hambatan yang dihadapi Tokoh Informal dalam Penanganan Balapan Liar di Kecamatan Meuraxa dan Baiturrahman

Berdasarkan dari hasil wawancara dan FGD yang dilakukan pada tokoh informal di kecamatan Meuraxa dan Baiturrahman di dapatkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi kendala selama dalam penanganan balapan liar remaja, diantaranya: *pertama*, sebagian remaja yang melakukan balapan liar adalah anak dari TNI/Polri, *kedua*, trauma karena konflik yang mempengaruhi jiwa remaja untuk melakukan aksi balapan liar, *ketiga*, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak remaja yang mengakibatkan adanya balapan liar. *Keempat* belum adanya *gamin* yang mengatur tentang larangan balapan liar di jalan raya.

Keempat masalah di atas menjadi perhatian khusus dari tokoh informal untuk mengulanginya, sebagaimana yang dituturkan oleh pak Ali di *Gampong Cot Lankuweh* kecamatan Meuraxa mengatakan bahwa: " warga kami kenapa sulit memberantas remaja yang balapan liar dikarenakan orang tua dari si remaja tidak mau peduli terhadap anaknya, setelah dibelikan Honda (sepeda motor) tidak pernah ditanyakan dipakai untuk apa Honda tersebut sehingga si Anak karena merasa tidak pernah diperhatikan, jadi sesuka hatinya dalam mengendarai Honda tersebut. Selanjutnya hal senada juga diutarakan

oleh Ibnu warga, Nuesu Aceh, yang mengatakan kenapa banyak remaja yang mengambil jalan pintas untuk hobinya balapan liar, itu diakibatkan karena orang tua yang keluarganya broken home (keluarga yang kacau balau) sehingga si anak memilih jalan tersebut.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Dari pemaparan penelitian ini dapat ditarik beberapa pointer kesimpulan terhadap persepsi tokoh informal dalam penanganan aksi balapan liar anak-anak remaja di kecamatan Baiturahman dan Meuraxa, diantaranya:

1. Belum adanya peraturan tertulis yang dibuat melalui qanun *gampong* dan disosialisasikan kepada masyarakat dan pengguna jalan raya.
2. Trauma karena konflik dan gempa tsunami mempengaruhi sikap dan tingkah laku remaja dalam melakukan aksi balapan liar.
3. Tidak adanya koordinasi yang baik dari pihak kepolisian dan masyarakat sehingga aksi balapan liar tidak terkontrol.

2. Saran

1. Pentingnya pencegahan terhadap Aksi balapan liar Anak-anak Remaja melalui sinergi antara orang tua, guru dan masyarakat, serta pihak kepolisian sehingga akan terwujud remaja yang peduli terhadap ketertiban dan keamanan di jalan raya
2. Perlu adanya qanun *gampong* yang mengatur tentang ketertiban dan keamanan di jalan raya.

BAB IV TOKOH INFORMAL DALAM PENANGANAN BENCANA

A. Pendahuluan

Peran seorang tokoh masyarakat dalam pembangunan sangat penting, karena tokoh adalah seorang "*opinion leader*" yaitu orang yang berpengaruh besar dalam mengambil keputusan. Pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam hal ini adalah kesejahteraan untuk individu maupun kelompok. Provinsi Aceh, berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Tentang Otonomi Khusus Provinsi Aceh, diberikan kewenangan secara luas dan leluasa untuk menata sistem pemerintah daerah sesuai dengan nilai-nilai luhur masyarakat Aceh. Untuk implementasinya diatur dalam *Qanun* (peraturan daerah) Nomor 5 Tahun 2003, tentang Pemerintahan *Gampong*. Oleh karena itu di Provinsi Aceh istilah lain dari desa adalah *gampong*, dan istilah lain dari kepala desa adalah *Keuchik* serta istilah lain dari Badan Perwakilan Desa adalah Tuha Peut.

Setiap program pembangunan dalam bentuk dan jenis apapun yang tujuannya untuk pemberdayaan masyarakat di dalamnya diperlukan dukungan atau partisipasi masyarakat, maka dalam prosesnya kita perlu melakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat agar segala potensi yang dimilikinya dapat dimanfaatkan secara maksimal. Mengingat pentingnya pendekatan terhadap tokoh masyarakat dalam penanganan bencana, maka dalam penelitian ini penekanan penulis lakukan pada pendekatan yang dilakukan oleh tokoh informal. Tokoh informal yang dimaksud adalah tokoh agama dan tokoh adat *gampong*, bukan aktor dari suatu organisasi yang terlibat dalam penanganan bencana. Diakui memang dalam sebuah rekonstruksi *gampong* banyak aktor yang terlibat dalam penanganan bencana

na untuk memulihkan masyarakat menuju ke kondisi normal. Hal ini juga tidak berarti bahwa pendekatan terhadap tokoh formal *gampong* (*keuchik*) harus diabaikan atau tidak penting dilakukan.

Di *gampong* Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, yang merupakan salah satu dari sekian *gampong* yang terkena musibah gempa dan tsunami, diketahui banyak didatangi oleh beberapa *non government organizer* (NGO) dari berbagai organisasi dalam memfasilitasi pulihnya kembali masyarakat dari kondisi yang tidak normal menuju kondisi yang normal. Tetapi tidak semua NGO yang masuk ke *gampong* Rukoh, karena inisiatif dari NGO tersebut, tetapi karena adanya inisiatif yang datang dari tokoh masyarakat setempat. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan Baihaqi¹, yang menjelaskan bahwa pasca tsunami tokoh informal (tokoh agama dan tokoh adat) menjadi ujung tombak masyarakat dalam mengakses bantuan, dengan mengajukan proposal kepada beberapa NGO asing.

Dari hasil penelitian di atas digambarkan bahwa di *gampong* Rukoh adanya kreatifitas yang datangnya dari masyarakat setempat, atau dalam istilah sosialnya disebut dengan adanya kearifan lokal. Masyarakat Aceh dikenal sebagai masyarakat yang taat dan menjunjung tinggi agama dan adat. Sistem penanganan yang dilakukan di atas memberikan makna bahwa dalam mencapai keberhasilan pembangunan di *gampong* tidak hanya terpaku pada tokoh formal, tetapi juga adanya kerjasama dengan tokoh informal. Hal ini dilakukan agar permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dapat teratasi, termasuk menangani masalah kemiskinan dan pengangguran, khususnya di *gampong*.

Dalam Sejarah Kerajaan Aceh Darussalam (KAD), bahwa *keuchik* adalah orang yang dipilih oleh warga *gampong* untuk melindungi warga, karena *keuchik* adalah harapan warga masyarakat *gampong*, karena itu *gampong* menjadi wilayah otonomi terkecil dalam perjalanan sejarah². Sejarah Kerajaan Aceh Darussalam menjelaskan bahwa tokoh formal *gampong* (*keuchik* dan aparaturnya) yang menjadi promo-

1. Baihaqi, 2007, Partisipasi Masyarakat Pasca Gempa dan Tsunami (studi di Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh), IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Skripsi tidak diterbitkan

2. Sutoro Eko dkk, 2007, Bergerak Menuju Mukim Dan *Gampong*, IRE Press, Yogyakarta, hlm. 15

tor untuk memperoleh bantuan, karena hal ini juga merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, di dalamnya juga membahas tentang Pemerintahan *Gampong*, dan Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong*. Peran tokoh informal sangat strategis dalam menunjang/mendukung proses pembangunan *gampong*. Dalam perspektif sosiologis, masyarakat *gampong* Rukoh sangat patuh pada adat istiadat dan sangat mempercayai kepada tokoh yang mengerti agama, terutama pemimpin yang berlatar belakang agama Islam dan mengerti hukum adat dan hukum islam, karena dalam pandangan masyarakat Aceh bahwa antara agama dan adat tidak dapat dipisahkan karena telah menyatu sebagaimana hadih maja yang berkembang di Aceh yaitu Agama ngon adat (hukom), lagee zat ngon sifeut (agama dengan adat bagaikan zat dengan sifatnya).

Masyarakat *gampong* Rukoh pasca musibah gempa dan tsunami sangat loyal pada tokoh informal karena pada saat itu masyarakat bukan hanya membutuhkan bantuan material tapi juga membutuhkan pembinaan spiritual. Kepedulian yang ditunjukkan oleh tokoh informal yang menyebabkan masyarakat menyukainya, padahal tokoh ini juga orang yang terkena musibah.

B. Kerangka Teoritik (literatur inteview)

Dalam kerangka teoritik ini penulis mengutip beberapa teori tentang pengertian tokoh formal, tokoh informal, dan ciri-ciri dari tokoh informal dalam kaitannya dengan kearifan lokal di *gampong* dalam penanganan terhadap dampak gempa dan tsunami dengan melihat strategi-strategi penanganan bencana oleh tokoh informal dengan melakukan analisis konsep peran serta masyarakat dalam mewujudkan pemberdayaan.

a. Tokoh formal

Tokoh formal menurut Katini Kartono,³ adalah orang yang mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin. Menurut Astrid Susanto dalam Elly Irawan,⁴ Tokoh formal di pedesaan diberi

3. Kartini Kartono, 1998, Pemimpin Dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal Itu? Edisi Baru, Raja Grafindo Persada, Jakarta

4. Elly Irawan, 1995, Pengembangan Masyarakat, Universitas Terbuka, Jakarta, hlm. 140

wewenang/kekuasaan untuk mengambil keputusan-keputusan tertentu, khususnya menangani masalah pemerintahan di tingkat desa.

Di Provinsi Aceh tokoh formal ditingkat desa dipilih melalui penunjukan langsung dari kesepakatan bersama para tokoh informal (tokoh adat dan tokoh agama) pada masa kesultanan Iskandar Muda, pada masa orde baru pemilihan *keuchik* dipilih tidak berdasarkan penunjukan langsung dari tokoh informal, dengan adanya intervensi dari masyarakat dibuat musyawarah *gampong*, sedangkan pasca reformasi pemilihan *keuchik* sudah secara demokrasi dengan diadakannya proses pemilihan *keuchik* secara langsung yang disebut dengan *Pilchiksung* (pemilihan *keuchik* secara langsung) yang melibatkan semua lapisan masyarakat dan telah diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan dan pemberhentian *keuchik*.

b. Tokoh Informal

Menurut Kartini Kartono,⁵ pemimpin informal adalah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena ia memiliki sejumlah kualitas unggul, dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat. Pemahaman Kartini Kartono⁶ ini menerangkan bahwa kepemimpinan informal dalam peranan sosial di masyarakat memberi pengaruh berupa sugesti, larangan dan dukungan kepada masyarakat luas untuk mengerjakan atau berbuat sesuatu.

Pendapat di atas juga disampaikan oleh Profesor Kimbal Young, sosiolog terkenal di Amerika Serikat dalam Kartini Kartono, mengatakan tokoh informal itu bentuk dominasi yang didasari kemampuan pribadinya yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu berdasarkan akseptansi/penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi khusus. Pemahaman dari Kimbal Young ini sangat tepat bila dikaitkan dengan apa yang terjadi di daerah yang ingin penulis lakukan penelitian, dimana peran kepemimpinan informal begitu nampak dan khususnya ketika gempa dan tsunami melanda daerah tersebut, dengan sukarela pemimpin informal mencari bantuan un-

⁵ Ibid., hlm 10

⁶ Ibid., hlm 15

tuk warganya yang tertimpa musibah.

Hal senada juga disampaikan oleh sosiolog Universitas Gadjah Mada, Profesor Soedjito,⁷ dalam bukunya yang berjudul *Aspek Sosial Budaya Dalam Pembangunan Pedesaan* mengatakan bahwa pemimpin informal sangat menentukan keberhasilan suatu program di masyarakat, karena tokoh ini berperan penting dalam masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan Yudi Douglas Batubara,⁸ Rencana *gampong* dapat disusun dalam waktu yang relatif singkat dan efektif apabila melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Setiap program pemberdayaan yang dilaksanakan di masyarakat pedesaan tidak hanya bekerjasama dengan tokoh formal namun juga harus mengadakan kerjasama dengan tokoh informal karena tokoh ini menjadi panutan di masyarakat pedesaan.

c. Ciri- ciri Tokoh Informal antara lain:

Menurut Kartini Kartono,⁹ ciri-ciri pemimpin informal adalah sebagai berikut:

- 1). Tidak memiliki penunjukan formal atau legitimasi sebagai pemimpin
- 2). Kelompok rakyat atau masyarakat menunjuk dirinya, dan mengakuinya sebagai pemimpin. Status kepemimpinannya berlangsung selama kelompok yang bersangkutan masih mau mengakui dan menerima pribadinya.
- 3). Dia tidak mendapatkan dukungan/backing dari suatu organisasi formal dalam menjalankan tugas kepemimpinannya.
- 4). Biasanya tidak mendapatkan imbalan balas jasa, atau imbalan jasa itu diberikan secara suka rela.
- 5). Tidak dapat dimutasikan, tidak pernah mencapai promosi, dan tidak memiliki atasan. Dia tidak perlu memenuhi persyaratan formal tertentu.

⁷ Soedjito, 1987, *Aspek Sosial Budaya Dalam Pembangunan Pedesaan*, Tiara Wacana, Yogyakarta

⁸ Yudi Douglas Batubara, *Evaluasi Perencanaan Desa dalam Membangun Kembali Lingkungan Perdesaan Pasca Bencana Alam Tsunami 2004*, (studi di Desa Lam Jabal, *Gampong Baro*, *Gampong Pande* dan *Desa Labuy*), UI (universitas Indonesia), Jakarta, Tesis

⁹ Kartini Kartono, 1998, *Pemimpin Dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal Itu?* Edisi Baru, Raja Grafindo Persada, Jakarta

- 6). Apabila melakukan kesalahan, dia tidak dapat dihukum, hanya saja respek orang terhadap dirinya jadi berkurang, pribadinya tidak diakui, atau dia ditinggalkan oleh masyarakatnya.

Hal di atas juga sejalan dengan pendapat Astrid S. Susanto, dalam Elly Irawan,¹⁰ Tokoh informal memiliki 3 potensi antara lain: pertama, memiliki kecakapan dan pengertian terhadap kehidupan sosial. Kedua, memiliki kepribadian yang dapat memberikan popularitas sosial kepadanya, dan ketiga, mampu berbicara dan pandai dalam mengajukan ide-ide. Astrid S. Susanto juga menambahkan bahwa tokoh informal di desa itu dengan latar belakang agama, khususnya Islam, pada masyarakat pedesaan umumnya adalah pemimpin-pemimpin agama yang secara historis telah memiliki otoritas kepemimpinan yang cukup kuat. Para ulama, ustadz atau yang sejenis, mereka juga tidak saja berkedudukan sebagai pemuka agama tetapi sering juga menduduki kepemimpinan dalam masyarakat secara keseluruhan.

Hal di atas juga sependapat dengan Harun Nasution,¹¹ mengatakan bahwa pemimpin informal sangat berperan dalam pembangunan masyarakat di desa, khususnya tokoh agama, hal ini dicontohkan tentang figur seorang Kiai (ustadz/ tengku) di desa (*gampong*) masih mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat. Dalam mengubah sikap mental umat, dari sikap yang tidak menguntungkan menjadi sikap yang mendorong bagi pembangunan.

Harun Nasution menggambarkan bahwa kepemimpinan seorang Kiai (ustadz/tengku) untuk di pedesaan masih sangat baik dalam mengajak masyarakat untuk menuju perubahan diri, baik itu dalam konteks memberikan pembinaan manusia secara spiritual maupun pembinaan manusia sebagai fungsi sosial. Pendekatan ini juga merupakan metode yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW dalam mengembangkan dakwahnya. Masjid Nabawi bukan hanya dijadikan sebagai tempat untuk beribadah tapi juga dijadikan sebagai tempat menggali ilmu pengetahuan agama dan juga sebagai tempat dalam mengatur strategi politik.

¹⁰ Elly Irawan, 1995, *Pengembangan Masyarakat*, Universitas Terbuka, Jakarta, hlm. 140

¹¹ Harun Nasution, 1995, *Islam Rasional Gagasan Dan Pemikiran*, editor Saiful Muzani, Penerbit Mizan, Jakarta

d. Kearifan Lokal *Gampong* (Desa)

Kearifan lokal dalam bahasa asing sering dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*) atau kecerdasan setempat (*local genius*). Menurut Saini,¹² Kearifan lokal adalah sikap, pandangan, dan kemampuan suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan rohani dan jismaninya, yang memberikan kepada komunitas tersebut daya tahan dan daya tumbuh di dalam wilayah dimana komunitas itu berada. Dengan kata lain kearifan lokal adalah jawaban kreatif terhadap situasi geografis-geopolitis, historis, dan situasional yang bersifat lokal. Diketahui bahwa paradigma pembangunan telah terjadi pergeseran di Indonesia. Pergeseran ini sangat berpengaruh kepada pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial.

Dalam kerangka pembangunan kesejahteraan sosial, potensi-potensi lokal yang dimiliki oleh masing-masing daerah harus dipetakan sebagai modal dasar yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan yang memberikan energi yang kondusif. Kearifan lokal menjadi elemen penting yang signifikan dalam mewujudkan ketahanan sosial masyarakat serta pembangunan kesejahteraan sosial dalam skala mikro. Seperti halnya yang ditunjukkan dalam penelitian penulis,¹³ Hasil survey dan observasi di lapangan bahwa tokoh informal di desa Babah Dua ketika pasca gempa dan tsunami, lebih berperan dari pada tokoh formal. Dibuktikan dengan adanya kepercayaaan penuh dari pendonor (NGO OXFAM) dalam memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat desa Babah Dua. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang tokoh informal di desa Babah Dua berasal dari keturunan raja yaitu raja Po Teumeureudhoem. Pemahaman masyarakat bahwa setiap keturunan raja dihargai, karena sebutan *Teuku* bagi laki-laki dan *Tjut* untuk perempuan, pemahaman budaya dan agama mereka sangat kuat.

Jim Iff,¹⁴ mengatakan bahwa dimensi dalam kearifan lokal meliputi dimensi-dimensi pengetahuan lokal, budaya lokal, keter-

¹² Saini, KN, 'Kearifan Lokal di arus Global', dalam *Pikiran Rakyat*, Edisi 30 Juli 2005

¹³ Masrizal, 2007, *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pembangunan Desa* (studi di Desa Babah Dua Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya), IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, hlm. 55-56, Skripsi.

¹⁴ Jim Iff, 2002, *Community Development Community-Based Alternatives in an Age of Globalisation*, Longman is an Imprint of Pearson education, Australia

ampilan lokal, sumberdaya lokal, mekanisme pengambilan keputusan lokal dan solidaritas kelompok. Sedangkan menurut Bambang Nugroho,¹⁵ kearifan lokal biasanya dipersonifikasi pada seseorang yang secara kepribadian dinilai matang, konsisten, rela berkorban, tidak menang sendiri, memiliki wawasan yang luas tapi tetap mau menerima kritik orang lain dan mau mengalah. Hal ini yang sering disebut di masyarakat dengan orang bijaksana (arif), dan dalam bahasa Inggris orang yang arif disebut *wise man*.

Pandangan hidup tentang kearifan lokal adalah sesuatu yang berharga dalam mewujudkan masyarakat sejahtera, karena setiap kegiatannya dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam hal sistem pemenuhan kebutuhan yang meliputi seluruh unsur kehidupan diantaranya: agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, organisasi sosial, bahasa, komunikasi dan kesenian.

e. Penanganan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam manusia dan/atau keduanya yang mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.¹⁶ Penanganan bencana sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2007, menitik beratkan pada partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana. Masyarakat bukan hanya sekedar menjadi korban/obyek dari bencana namun juga sebagai pelaku dari penanggulangan bencana.¹⁷ Menurut Gunawan,¹⁸ unsur-unsur dalam penanggulangan bencana alam dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok besaran yakni: (1) Public sector, (2) Privat sector, dan (3) Collectif sector. Menyatunya ketiga sector (threepartide) dimaksudkan merupakan kekuatan besar dalam menghadapi berbagai permasalahan

¹⁵ Bambang Nugroho, dkk, 2005, Tinjauan Tentang Kearifan Lokal, Balatbangsos-Depsos RI, hlm. 8

¹⁶ Kabid Banjamsos Aceh, Kebijakan dan Penanggulangan Bencana, disampaikan pada pelatihan pemantapan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) angkatan II di Sarree Aceh Besar tahun 2009

¹⁷ <http://www.depsos.go.id>, diakses 6 Juni 2009

¹⁸ Gunawan, Pemberdayaan Sosial Keluarga Pasca Bencana Alam (Studi tentang Kondisi Sosial Masyarakat Dalam Manajemen Bencana), dalam <http://www.depsos.go.id>, diakses 7 Juni 2009

han termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Membangun persamaan persepsi merupakan langkah awal untuk mengantisipasi timbulnya kekaburan peranan dan konflik kepentingan di kalangan masyarakat, keluarga, tokoh masyarakat dan pemerintah desa. Persamaan persepsi antara sektor publik (pemerintah pusat dan daerah), sektor privat (swasta, LSM) dan sektor kolektif (kelompok organisasi masyarakat) ini merupakan langkah awal untuk membangun kesepahaman dan kesepakatan (Consensus Building).

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing-masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda. Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain didukung dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga disediakan dana siap pakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana.¹⁹

Peraturan di atas juga sesuai dengan Kebijakan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 tahun 2008 Tentang Pedoman penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana pada BAB VII Tentang Alokasi dan Peran Pelaku Kegiatan Penanggulangan Bencana butir B. Yang menjelaskan tentang Peran dan Potensi Masyarakat. Pertama, Masyarakat sebagai pelaku awal penanggulangan bencana sekaligus korban bencana harus mampu dalam batasan tertentu menangani bencana sehingga diharapkan bencana tidak berkembang ke skala yang lebih besar. Kedua Peran swasta harus secara optimal diberdayakan untuk peningkatan ketahanan nasional dalam menghadapi bencana. Ketiga, koordinasi yang baik dengan lembaga Non Pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana mulai dari tahap sebelum, pada saat dan pasca bencana. Keempat, peran perguruan tinggi. Perguruan Tinggi/ Lembaga Penelitian. Kelima, peran media. Media memiliki kemampuan besar untuk membentuk opini publik. Keenam, Lembaga Internasional. Pada dasarnya pemerintah dapat menerima bantuan dari lembaga internasional, baik pada saat pra bencana, saat tanggap darurat maupun pasca bencana.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Namun demikian harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Berdasarkan pendapat di atas maka dalam penanganan bencana sangat dianjurkan adanya kerjasama antar stakeholder dalam mewujudkan masyarakat dari kondisi bencana menuju kondisi normal.

f. Pemberdayaan Masyarakat

Secara harfiah, pemberdayaan diartikan sebagai penguatan daya (*empowering*), dari kondisi tidak berdaya (*powerless*) menjadi berdaya (*powerfull*).²¹ Pemberdayaan dapat dipahami sebagai upaya untuk menolong yang lemah atau tidak berdaya (*powerless*) agar menjadi mampu/berdaya (*powerfull*) baik secara fisik, mental dan pikiran untuk mencapai kesejahteraan hidupnya (*optimalisasi potensi*).

Dari sisi masyarakat korban bencana, partisipasi adalah kata kunci pemberdayaan. Dalam hal ini menurut Sutoro Eko,²² bahwa penguatan partisipasi identik dengan penguatan masyarakat sipil di aras lokal. Untuk ditingkat *Gamping* (desa) ada lima bentuk partisipasi antara lain: *Pertama*, mengeksplorasi nilai-nilai yang berkaitan dengan semangat berpartisipasi. *Kedua*, menghidupkan kembali institusi-institusi volunteer sebagai media kewargaan yang pernah hidup dan berfungsi untuk kemudian dikontekstualisasikan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat terutama dinamika kontemporer (misalnya forum warga atau musyawarah adat).

Ketiga, memfasilitasi terbentuknya asosiasi-asosiasi kewargaan yang baru berbasis kepentingan kelompok keagamaan, ekonomi, profesi, minat dan hobi, dan politik maupun aspek-aspek kultural lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai arena interaksi terbuka. *Kempat*, mengkampanyekan pentingnya kesadaran inklusif bagi warga dalam menyikapi sejumlah perbedaan yang terjadi dengan mempertimbangkan kemajemukan. Dan *Kelima*, memperluas ruang

komunikasi publik atau semacam public sphere yang dapat dimanfaatkan warga untuk melakukan kontak-kontak sosial dan kerjasama.

Pemberdayaan merupakan sebagai cara untuk mencapai tujuan internal dalam mencapai ketahanan sosial, partisipasi dan kepercayaan diri dalam menghadapi situasi krisis (bencana). Diketahui bahwa orientasi dari pemberdayaan ditujukan selain pada target kuantitatif juga pada fungsional. Dalam perspektif sosiologis bahwa pemberdayaan menampilkan peran-peran aktif dan kolaboratif antara masyarakat dan mitranya. Seperti yang dikemukakan Simon, (1990) dalam Asep Sasa Purnama,²³ pemberdayaan adalah suatu aktifitas reflektif suatu proses yang mampu di inisiasikan dan dipertahankan hanya oleh agen atau subyek yang mencari kekuatan dan penentuan diri sendiri (*self determination*). Sementara proses lainnya hanya dengan memberikan iklim, hubungan, sumber-sumber dan alat-alat prosedural yang melaluinya masyarakat dapat meningkatkan kehidupannya.

Pendapat di atas juga senada dengan Edi Suharto,²⁴ yang menjelaskan tentang indikator pemberdayaan dengan menerangkan bahwa prinsip ilmu pekerjaan sosial (*social work*), adalah dengan prinsip "menolong orang agar mampu menolong dirinya sendiri" (*to help people to help themselves*).

Mengacu pada pengertian pemberdayaan di atas, maka pemberdayaan harus memberikan peluang agar inisiatif itu tumbuh dari masyarakat, terutama masyarakat korban bencana dalam menumbuhkan kebanggaan perilaku sosial untuk didukung melalui pengayaan orientasi, motivasi dan perluasan dalam pengambilan keputusan oleh masyarakat itu sendiri. Serta meningkatkan aksesibilitas mereka terhadap sumber kehidupan. Konsep pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu metode penanganan bencana yang mempunyai tujuan agar masyarakat mempunyai kemampuan untuk memotivasi diri untuk kembali dari kondisi bencana kondisi normal. Namun pembahasan yang dilakukan Edi Suharto hanya dalam batas wacana dan tidak diaplikasikan dalam sebuah penelitian terkait

²⁰ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, diakses tanggal 12 Juni 2009

²¹ Jim Ite, 1995, *Community Development, Creating Community Alternatives*, Vision, Analysis and Practice, Longman, Australia

²² Sutoro Eko, 2003, *Pembaharuan Pemerintahan Desa*, JRE Press, Yogyakarta

²³ Asep Sasa Purnama dkk, tanpa tahun, *Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial, Konsep dan Strategi*, Balitbangsos, Depsos RI, Jakarta hlm. 70

²⁴ Edi Suharto, 2006, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Reflika Aditama, Bandung hlm. 63

program pemberdayaan untuk penanganan bencana di masyarakat. Sehingga, karya yang sangat baik ini justru dijadikan sebagai "pisau bedah" dari penelitian yang akan penulis lakukan.

Membangun kembali Aceh pasca bencana terbesar merupakan kerja besar dan akan memakan waktu panjang. Jangka waktu 4 tahun yang direncanakan pemerintah dipandang tidak akan mampu menyelesaikan berbagai hal yang hancur akibat bencana ini. Namun paling tidak, harus menjadi landasan awal perbaikan arah pembangunan kembali Aceh. Karena disamping bencana, Aceh juga merupakan daerah yang baru pulih dari konflik panjang. Dalam kurun waktu 4 tahun proses rehab & rekons ini, sudah banyak lembaga internasional yang berpartisipasi dalam berbagai bentuk untuk membangun kembali Aceh. Seiring dengan waktu pula, satu persatu dari lembaga ini telah meninggalkan Aceh dikarenakan sudah selesainya misi bantuan kemanusiaan mereka.

Pasca tsunami keadaan masyarakat *gampong* Rukoh belum stabil, sehingga menyebabkan banyak masalah di *gampong*, bahkan kondisi administrasi pemerintahanpun kurang berjalan dengan baik. Dalam hal penanganan bencana perlu dilihat adalah 3 sistem dalam memulihkan masyarakat dengan menguatkan administrasi pemerintahan, sistem ekonomi warga bencana dan sistem sosial warga. Pemimpin formal *gampong* (*keuchik*) lumpuh, dan administrasi yang kurang jelas sehingga menyebabkan banyak pengungsi yang tidak tahu harus melakukan apa, dikarenakan keterbatasan kemampuan mereka dalam mengakses bantuan. Begitu juga dengan kegiatan perekonomian masyarakat Rukoh, pada tahun pertama sampai dengan pertengahan tahun kedua pasca bencana masih belum beraktifitas, masih menunggu uluran tangan dari pemberi bantuan.

Kegiatan sosial masyarakat pasca bencana selama di pengungsian sangat baik, Masyarakat *gampong* Rukoh dalam upaya beradaptasi dengan lingkungannya, penduduk selalu bekerjasama dengan sesamanya, dengan kata lain sangat bermasyarakat. Rasa sosial diantara penduduk *Gampong* Rukoh cukup tinggi, Mereka selalu saling tolong menolong, mengutamakan musyawarah dalam mengambil suatu keputusan apabila ada masalah yang timbul di masyarakat. Seperti halnya ketika bantuan masuk ke *gampong* Rukoh, proses awalnya yang dibangun oleh tokoh masyarakat adalah membuat musyawarah *gampong*, atau istilah Acehnya disebut den-

gan *Duek* pakat, yang tujuannya agar masyarakat mengetahui bantuan yang masuk ke *gampong* Rukoh, sehingga tidak menyebabkan kecemburuan sosial di masyarakat.

Modal sosial pada dasarnya mempunyai fungsi sebagai pertahanan sosial. Seorang dalam sebuah keluarga, pertemanan dan perkumpulan melembaga menjadi sebuah *social assets*. Orang yang terikat dalam *social asset* dari sebuah lembaga dan komunitas dapat memanfaatkan *assets* tersebut dalam menghadapi berbagai kesulitan ataupun masalah sosial lainnya. Oleh karena itu komunitas yang mewarisi beragam cadangan jaringan kerja sosial dan perkumpulan kewargaan biasanya berada dalam posisi yang lebih baik dalam mengentaskan kemiskinan dan kerentanan, memecahkan perselisihan, dan mengambil faedah dari peluang-peluang baru.²⁵

Berdasarkan penjelasan ini penulis hanya ingin mengungkapkan bahwa modal sosial mempunyai peranan yang baik, khususnya sebagai bentuk pertahanan sosial pada masyarakat korban bencana dalam mewujudkan pemberdayaan. Sebab pemberdayaan masyarakat membutuhkan modal dan potensi dari masyarakat sendiri, sedangkan modal sosial itu sendiri adalah yang sangat berharga bagi masyarakat. Modal sosial ini sangat mendukung dari pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari mewujudkan pemberdayaan bagi masyarakat korban bencana.

Pola kepemimpinan di Provinsi Aceh memiliki banyak perbedaan dengan daerah lain yang ada di Indonesia, khususnya tentang pola kepemimpinan di tingkat *gampong* (desa). Berikut dibawah ini akan dijelaskan kepemimpinan formal *gampong* pada masa kesultanan Iskandar Muda, masa orde baru dan masa pasca reformasi.

a. Kepemimpinan Formal *Gampong* Masa Ke-Sultanan Iskandar Muda

Pemimpin formal *gampong* pada masa kesultanan Iskandar muda (1607-1636), menarik untuk menyimak buku Snouck Hugronje,²⁶ dengan lima keterangan penting, yakni: (1) *gampong* terdiri dari kelom-

²⁵ Nu'man Nuryana, "Modal Sosial," dalam Edi Suharto (Ed), 2004, *Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi Dan Strategi*, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial RI, Jakarta, hlm. 87

²⁶ Snouck Hugronje, 1985, *Aceh di Mata Kolonial*, Yayasan Soko Guru, California

pok rumah-rumah yang letaknya berdekatan, wilayahnya dibatasi oleh sebuah tanda, semacam gapura; (2) *gampong* adalah bentuk teritorial terkecil dari susunan pemerintahan; (3) *gampong* dipimpin oleh *keuchik/geuchik*, yang dibantu seorang yang mahir dalam masalah keagamaan, *teungku* -posisi mereka ibarat *ku* (ayah) dan *ma* (ibu). *Keuchik* merupakan orang yang membela kepentingan dan keinginan warga, saat berhadapan dengan *uleebalang* maupun *gampong* lain; (4) posisi *tuha peut* dijelaskan sebagai *ureung tuha*, komponen penting dari lembaga legislatif yang berisikan ulama dan cerdik pandai; (5) dikenal posisi *mukim*²⁷ sebagai gabungan dari beberapa *gampong*.

Pemimpin formal *gampong* (*keuchik*) masa kesultanan Iskandar Muda dipilih oleh tokoh informal (tokoh agama dan tokoh adat), pemimpin formal yang dipilih memiliki tanggung jawab untuk wilayah kerjanya, memimpin penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong*, membina kehidupan dan pelaksanaan syariat, memelihara kelestarian adat istiadat, memajukan perekonomian, memelihara ketentraman, menjadi hakim perdamaian, mengajukan Rancangan Reusam mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja *Gampong*, serta mewakili *Gampong*nya di dalam dan di luar Pengadilan; dan *keuchik* bertanggung jawab terhadap rakyat dengan mekanisme tersendiri.

b. Kepemimpinan formal *gampong* (desa) masa Orde baru

Kepemimpinan formal *gampong* di masa pemerintahan di Indonesia (orde baru), yang sentralistik, ditandai dengan penyeragaman konsep kampung di seluruh Indonesia, melalui regulasi undang-undang (UU) nomor 5/1979 tentang Pemerintahan Desa. Dalam masa ini yang dimaksud dengan 'Desa' adalah kesatuan organisasi pemerintahan terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung berada di bawah kecamatan dan merupakan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Suasana sentralistik dari 'Desa' semakin kentara ketika Menteri Dalam Negeri melalui Instruksi No. 9/1980, menginstruksikan pimpinan daerah untuk mengubah semua *gampong* menjadi desa.

Salah satu bentuk tekanan politik yang menonjol terhadap *gampong*

²⁷ Mukim adalah seorang yang memiliki tugas untuk mengontrol kinerja beberapa *gampong* (desa)

pong di Aceh pada negara orde baru²⁸ adalah tentang penyeragaman dari *gampong* menjadi desa. Desa menjadi hirarki birokrasi administrasi pemerintahan yang terbawah, sebagai mana dijelaskan dalam UU. No. 5 tahun 1979, yang menyeragamkan *gampong* menjadi desa diseluruh daerah Indonesia, secara resmi desa menjadi hirarki birokrasi sistem pemerintahan nasional.

Masa orde baru sudah banyak merubah sistem yang ada di masyarakat Aceh secara umum dan *gampong* Rukoh secara khusus, dimana masa kesultanan Iskandar Muda pada saat desa masih diberi nama *gampong* dan di kepalai oleh seorang *keuchik* berubah menjadi kepala desa, dan lembaga *tuha peut* di ubah menjadi lembaga masyarakat desa dan menghilangkan salah satu struktur organisasi yang bernama mukim. Mukim sebenarnya memiliki tugas pada masa kesultanan adalah menjadi pengawas/pengontrol kegiatan *keuchik*, tapi pada masa orde baru *keuchik* tidak perlu mendapatkan persetujuan mukim dalam pembangunan *gampong*, akan tetapi jalur koordinasinya langsung kepihak kecamatan. Sehingga nilai kearifan lokal ditingkat *gampong* di Aceh pada masa orde baru seperti tidak ada sama sekali padahal apabila kita melihat konsep yang ditawarkan pada era orde baru adalah konsep development (pembangunan). Sebenarnya dalam konsep pembangunan menjunjung tinggi nilai partisipasi masyarakat dan nilai-nilai kearifan lokal ditingkat daerah.

c. Kepemimpinan Formal *Gampong* Pasca Reformasi

Gampong pasca reformasi 21 Mei 1998 melalui UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konteks Aceh, dalam gelombang ini, kemudian harus dipisah ke dalam tiga generasi proses regulasi *gampong*, meliputi: Generasi Pertama, *gampong* yang terakomodir dalam UU No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Dalam generasi ini, ada bangunan besar yang dicoba untuk dirumuskan, antara lain tiga keistimewaan yang menjadi dasar pertimbangan dalam konsep pembangunan: syariat Islam, adat-istiadat, pendidikan, dan mulainya memberi ruang bagi ulama untuk menentukan kebijakan publik. Namun demikian dalam perumusannya,

²⁸ Negara orde baru ditandai dengan adanya spesialisasi tugas dan fungsi departemen-departemen di tingkat pusat, dinas-dinas di tingkat kabupaten, di tingkat desa dibentuk kepala desa/lurah, dibantu oleh perangkat desa seperti kaur dan sekretaris desa, sehingga unifikasi yang sifatnya nasional, akhirnya meniadakan fungsi dan wewenang dari lembaga tradisional, meskipun sekarang "nama"nya masih ada.

konsep *gampong* yang ingin dicapai itu tidak tercapai secara optimal. Kerangka pikir sebagai pengaruh dari sentralisme sistem desa masih sangat kentara dalam sistem *gampong*. Antara lain dalam kedudukan *tuha peut* sebagai Badan Perwakilan *Gampong*, masih tidak berbeda dengan Lembaga Musyawarah Desa (UU No. 5/1979) atau Badan Perwakilan Desa (UU No. 22/1999).

Generasi Kedua, *gampong* yang terakomodir dalam UU No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus dengan Nama Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Untuk melihat bagaimana *gampong* dikonsepsikan dalam generasi ini, maka kita harus meneropong aturan pelaksanaannya, Qanun No. 5/2003 tentang Pemerintahan *Gampong* di Aceh. *Gampong* dirumuskan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu yang dipimpin oleh *keuchik* atau nama lain dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Dalam generasi ini, kita dapat menemukan karakteristik, antara lain: (1) penegasan kembali *gampong* yang berada di bawah *mukim*; (2) posisi *keuchik* sudah diatur sedemikian rupa, sehingga wilayah kerjanya menjadi sangat kompleks: memimpin penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong*, membina kehidupan dan pelaksanaan syariat, memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, memajukan perekonomian, memelihara ketentraman, menjadi hakim perdamaian, mengajukan Rancangan Reusam, mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja *Gampong*, serta mewakili *Gampong*nya di dalam dan di luar Pengadilan; (3) *keuchik* bertanggung jawab terhadap rakyat dengan mekanisme tersendiri; (4) sudah ada pembagian kekuasaan dengan *tuha peut* sebagai lembaga legislatif; (5) kedudukan *imuem meunasah*²⁹ tidak disebutkan dengan tegas dalam hal ini saya memandang posisinya sebagai pembantu *keuchik*. Sedangkan dalam sejarahnya, *imuem* seperti *ma*³⁰ dan *keuchik* sebagai *ku*.³¹

Generasi Ketiga, *gampong* yang terakomodir dalam UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam UU ini, *Gampong* atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh *keuchik* atau nama lain yang berhak me-

²⁹ *Imuem meunasah* sama dengan imam masjid

³⁰ *Ma* dalam bahasa Aceh ibu dan "ku" adalah ayah

³¹ Sulaiman Tripa, Pendekatan Pembangunan Yang Berbasis *Gampong*, dalam <http://www.serambinews.com>, diakses 25 November 2009

nyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Pemerintahan *Gampong* terdiri atas *keuchik* dan badan permusyawaratan *gampong* yang disebut *tuha peut* atau nama lain.

Dalam Undang-undang di atas sudah ditegaskan bahwa *keuchik* dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk jabatan enam tahun, dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Qanun tentang tata cara pemilihan *keuchik* secara langsung, sebagaimana ditentukan dalam Qanun Kota Banda Aceh No. 9 tahun 2005, tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan dan Pemberhentian *Keuchik*. Peran *keuchik* sangat penting dalam masyarakat baik dalam syiar agama Islam, memelihara, menjaga, membela, menerapkan dan memberlakukan adat istiadat maupun dalam pelaksanaan hukum adat dalam masyarakat, sehingga *keuchik* haruslah orang yang berwibawa di mata masyarakat. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka pemilihan *keuchik* pada setiap *gampong* harus dapat mengakomodir prinsip demokrasi. *Keuchik* adalah orang pilihan di *gampong* yang diberi kewenangan oleh masyarakat untuk memimpin *gampong* tersebut dalam masa tertentu. Untuk itu pemilihan *keuchik* secara langsung oleh masyarakat yang telah berakar harus diberi jaminan secara yuridis.

Masyarakat *gampong* Rukoh khususnya dan Masyarakat Aceh secara umum sangat percaya kepada tokoh agama dan adat dikarenakan di Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636), memiliki semboyan yaitu: "Adat Bak Poe Teumeuruhom, Hukum Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Pahang, Reusam Bak Lakseumana." (urusan adat dikendalikan oleh Poe Teumuruhom, urusan hukum ditangani oleh Tengku Syiah Kuala, mengenai Qanun³² ditangani oleh Putroe Pahang dan Reusam³³ ditangani oleh Lakseumana) yang senada dengan

³² Qanun adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah dan lembaga legislatif Aceh, dan disebut namanya dengan peraturan daerah, qanun juga merupakan perundang-undangan yang bernilai agama dan adat dari badan legislasi yang terus berkembang, lihat Badruzzaman dkk, dalam: Pendidikan Pelatihan Dan Peradilan, hlm.36-43, Banda Aceh

³³ Reusam adalah tatanan protokoler/seremonial adat istiadat dari ahli-ahli adat yang terus berjalan. Lihat Badruzzaman dkk, Pendidikan Pelatihan dan Peradilan, hlm. 36-43. Reusam juga merupakan aturan tentang beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dalam tumbuh dalam suatu daerah yang tertentu sebagai kelompok sosial yang mengatur tata tertib tingkah laku anggota masyarakatnya. Aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia itu menjadi aturan hukum yang mengikat, kemudian disebut adat, lihat Rusdi sufi, dkk, 2002, Adat Istiadat Masyarakat Aceh, Dinas Kebudayaan Provinsi NAD, hlm. 40

ungkapan hadih maja di ini adalah *Adat Bak Poe Teumuruhom, Hukum Bak Ulama, Qanun Bak Putroe Pahang, Reusam Bak Bintara, Hukum dengan Adat Lage Zat Ngon Sifeut*" kedua hadih maja di atas memiliki makna yang hampir sama yakni: Pertama, *Adat Bak Poetumuruhom* bermakna sebagai pelambang pemegang kekuasaan pelaksana pemerintahan dan kebijaksanaan serta pelaksanaan adat.

Kedua, *Hukum Bak Syiah Kuala* merupakan pelambang pelaksanaan hukum. Ketiga, *Qanun Bak Putroe Pahang* merupakan pelambang orang yang pandai atau seorang cendikiawan yang membuat qanun (peraturan daerah). Keempat, *Reusam Bak Laksamana* atau bintara merupakan pelambang orang yang perkasa, arif dan bijaksana dalam mengatur adat kebiasaan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.³⁴ Pada masyarakat Aceh kepercayaan terhadap tokoh informal memang sudah tumbuh dalam kehidupan manusia sejak masa Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607-1636 sampai dengan sekarang. Setiap kebijakan yang dibuat Sultan tersebut menjadi contoh dalam pelaksanaan adat istiadat dan proses musyawarah dan muafakat yang dilaksanakan di *gampong-gampong* di provinsi Aceh.

Setiap tahapan dalam penanganan bencana yang dilakukan oleh tokoh informal dari masa tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi hingga menuju kondisi normal banyak menghadapi masalah. Pada masa tanggap darurat masalah yang dihadapi seputar administrasi, sulitnya tokoh mendapatkan persetujuan dari tokoh formal (*keuchik*). Pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi hambatannya pada sulitnya musyawarah yang dibangun antara tokoh formal dengan tokoh informal dalam menyatukan ide (gagasan) dan ditambah sulitnya masyarakat menghadiri musyawarah (rapat) yang dibuat oleh beberapa lembaga yang ikut terlibat dalam penanganan bencana.

Dalam proses reintegrasi di *gampong* Rukoh pasca tsunami adalah kurangnya keterlibatan tokoh formal *gampong* mengakibatkan kegiatan yang dilakukan lembaga yang terlibat dalam penanganan bencana kurang maksimal, dalam hal ini lembaga yang memiliki program modal usaha khususnya banyak menghadapi masalah dalam pelaporan, diakibatkan administrasi di *gampong* yang berbelit-belit, seperti lembaga Palang Merah Indonesia, mereka memiliki program

³⁴ Badruzzaman, dkk, 2007, Pendidikan Pelatihan, Peradilan Adat/Hukum Adat Istiadat Bagi Keuchik dan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, MAA Provinsi Aceh, Banda Aceh, hlm. 36

modal usaha yang diberikan untuk korban bencana yang memiliki tujuan untuk memulihkan masyarakat korban bencana mewujudkan kebutuhan mereka kearah yang lebih baik dengan modal usaha yang diberikan.

C. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan ada beberapa hal, sebagai berikut:

1. Kondisi Masyarakat *gampong* Rukoh Pasca Bencana, secara umum berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: Pertama, Masyarakat hampir kehilangan seluruh aset-nya (keluarga dan orang-orang dekat lainnya: pendapatan dan infrastruktur). Kedua, Masyarakat putus harapan akan penghidupan yang cerah. Ketiga, Masyarakat trauma akan laut dan bencana. Keempat, Banyaknya keterlibatan dunia internasional yang memaksa *gampong* menjadi lebih terbuka, sehingga berpotensi terjadinya perubahan sosial dan budaya. Perubahan sosial yang ditimbulkan oleh lembaga internasional, khususnya tentang "cash and carry" pasca tsunami adalah merusak tatanan kearifan lokal yang ada di masyarakat *gampong* Rukoh.
2. Penanganan bencana gempa dan tsunami di *gampong* Rukoh banyak pihak yang terlibat, yaitu lembaga pemerintah (BRR dan P2KP) dan lembaga non pemerintah (Islamic Reliief, PMI, SAN, Beujroeh dan Children Centre), kesemua lembaga tersebut bertujuan untuk menata kembali kehidupan masyarakat yang hancur karena gempa dan tsunami.
3. Pola kepemimpinan formal di *gampong* Rukoh yang tidak mengakomodasi nilai-nilai lokal telah membuat rasa percaya masyarakat terhadap *keuchik* rendah, hal ini juga disebabkan karena sistem negaranisasi yang dibentuk pada masa orde baru, memiliki tekanan politik yang menonjol terhadap *gampong* di Aceh, tentang penyeragaman dari *gampong* menjadi desa. Desa menjadi hirarki birokrasi administrasi pemerintahan yang terbawah, sebagai mana dijelaskan dalam UU. No. 5 tahun 1979, yang menyeragamkan *gampong* menjadi desa diseluruh daerah Indonesia, secara resmi desa menjadi hirarki birokrasi sistem pemerintahan nasional. Bahkan salah satu struktur organisasi *gampong* dihapuskan, yakni struktur mukim. Padahal pada

masa sultan Iskandar muda struktur ini ada, tetapi setelah di sahkan undang-undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, struktur lokal (mukim) ini kembali berfungsi.

Saran

Dari beberapa analisis faktor yang menjadi acuan dalam penelitian serta kesimpulan di atas yang telah penulis rangkumkan, maka ada beberapa hal yang kiranya perlu penulis memberikan saran, sebagai berikut:

1. Tokoh formal (*keuchik*) dalam menjalankan program kerja di masyarakat agar selalu melibatkan tokoh informal, karena keikutsertaan tokoh informal adalah bahagian dari kearifan lokal di *gampong*.
2. Tokoh formal dan tokoh informal diharapkan membangun hubungan yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan *gampong*.

Dalam pemberdayaan masyarakat *gampong* kedepan diharapkan kepada pihak-pihak terkait (pemerintah dan LSM) hendaknya untuk lebih memperhatikan keterlibatan masyarakat, sehingga kekuatan lokal (*social capital*) dapat dibangkitkan untuk sama-sama membangun masyarakat kearah yang lebih baik, dengan konsep menciptakan masyarakat yang produktif, bukan masyarakat yang konsumtif.

BAB V Kebijakan Publik dan Kesejahteraan Sosial dalam Islam (Sebuah Teori dan Analisa)

A. Defenisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang bermamfaat untuk rakyatnya terutama rakyat yang rentan (lemah). Menurut William N. Dunn, kebijakan publik adalah kebijakan yang dilakukan oleh policy makers (pembuat kebijakan) yang diperlukan dalam praktek pengambilan keputusan disektor publik. Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Hal ini dibuktikan dengan sistem pemilihan policy makers, pembuat kebijakan (presiden, gubernur, bupati/walikota dan DPR) dipilih secara langsung oleh rakyat. Namun demokrasi yang ada di Negara Indonesia belum sepenuhnya menunjukkan demokrasi yang berkeadilan. Baik itu keadilan di sektor hukum, ekonomi, pertanian, sosial dan sebagainya. Hal ini seperti salah satu yang penulis kutip dari media cetak dibawah ini.

Sekitar 275 hektare areal persawahan di beberapa desa di Kecamatan Bakongan Timur (Bakotim), Kabupaten Aceh Selatan sudah enam tahun tidak berproduksi. Kondisi ini disebabkan aliran sungai yang mereka andalkan selama ini tidak bisa mengairi karena sudah tersumbat. Camat Bakotim, Sarmiadi, kepada Serambi, Minggu (10/1) mengatakan, kini sawah-sawah itu ditelantarkan oleh pemiliknya. Kondisi ini disebabkan belum tersedianya bendungan irigasi yang dapat mengairi sawah mereka. Padahal, dulu petani mengandalkan hasil sawah mereka guna mendongkrak perekonomian. "Dulu

sawah-sawah itu sangat produktif. Namun lantaran pembangunan aliran sungai yang tidak sempurna mengakibatkan sungai itu kembali tersumbat," kata Sarmiadi. Begitupun, pihaknya memastikan pada musim tanam tahun ini, sawah-sawah itu sudah kembali digarap oleh pemiliknya, setelah mereka bergotong royong membersihkan saluran-saluran itu. Adapun sawah yang telantar itu meliputi, Desa Simpang, Sibadeh, Ladang Rimba, Sawah Tingkeum. "Kita sudah pernah mengusulkan pembangunan irigasi di kawasan itu, baik tingkat provinsi maupun tingkat pusat, namun hingga kini belum ada realisasinya. (Serambi Indonesia, 10 Januari 2010)

Nasib serupa juga terjadi di kecamatan Kluet Selatan, Sekitar 300 hektare sawah di beberapa desa Dalam Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, tidak bisa diproduktifkan lagi menyusul intrusi air laut. Kondisi ini terjadi setelah kawasan itu diterjang gempa bumi dan gelombang tsunami akhir Desember 2004. Deni Irmansyah, anggota DPRK Aceh Selatan, kepada Serambi, Sabtu (2/1) mengatakan, meskipun gempa bumi dan gelombang tsunami telah berlalu lima tahun, namun peristiwa itu masih menyisakan kepedihan sebagian para petani dalam Kecamatan Kluet Selatan. (Koran Serambi Indonesia, 03 Januari 2009)

Membaca cerita camat Bakongan Timur dan camat Kluet Selatan di atas sangat menyedihkan kita semua, seakan-akan kurangnya kepedulian dari pemerintah kabupaten dan provinsi dalam memberikan kesejahteraan bagi petani sawah di kecamatan tersebut. Apakah memang pejabat tidur saja melihat penderitaan rakyatnya? areal persawahan 275 hektar (Bakongan Timur), dan 300 hektar (Kluet Selatan), bukanlah lahan yang sedikit, berapa banyak masyarakat bisa terbantu apabila lahan tersebut digarap dan bisa membantu perekonomian masyarakat. Sawah adalah tempat masyarakat untuk mencari nafkah dalam menghidupi kebutuhan keluarga. Waktu lima sampai dengan enam tahun bukanlah waktu yang pendek, untuk perbaikan irigasi areal persawahan.

Bagi petani waktu lima sampai dengan enam (5-6) tahun dapat menggarap sawah mencapai 12 kali panen, apabila di daerah tersebut panennya dalam 1 tahun 2 kali (enam bulan sekali). Hal lain juga terjadi untuk petani kakao di kecamatan Trumon Timur yang mengakibatkan petani kakao kecewa karena sebelum ditanam bibitnya sudah mati duluan. Sebagaimana laporan camat Trumon Timur, H Lah-

muddin, yang mengatakan, hampir setengah dari 17.819 bibit Kakao bantuan otonomi khusus (otsus) tahun 2009 yang dibagikan untuk tiga kelompok tani di kecamatannya mati. Kelompok tani yang menerima bantuan tersebut adalah, Kasih Bumi Desa Jambo Dalem, Jasa Rakan Desa Kapa Sesak, dan kelompok tani Usaha Ingin Jaya Desa Pintu Rimba. "Kita belum tahu angka pastinya, namun bibit kakao yang mati hampir setengah dari jumlah yang diterima petani. (Koran Serambi Indonesia, 08 Januari 2010).

Harold D. Laswell: 1971, mengatakan bahwa Analisis kebijakan adalah bentuk aktifitas menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan analisis kebijakan meneliti sebab, akibat dan kinerja kebijakan dan program publik. Analisis kebijakan adalah bermamfaat untuk merumuskan masalah sebagai bagian dari pencarian solusi. Dalam hal ini yang sangat dituntut adalah bagaimana kebijakan yang di ambil oleh seorang policy makers (pembuat kebijakan) dalam mengatasinya. Melihat pengalaman yang di pakai oleh Amerika Serikat dalam mengatasi krisis yang terjadi di negaranya, persoalan antara sektor korporat dan sektor sosial (masyarakat) dalam pengentasan kemiskinan. Untuk keluar dari krisis tersebut, Presiden AS, Roosevelt, membangkitkan semangat rakyat melalui program yang terkenal, yaitu New Deal (keepakatan baru). New Deal yang layak digarap adalah sektor pertanian dan perkebunan yang ternyata memiliki pertumbuhan yang stabil dibanding dengan manufaktur. Jika melihat fakta demikian, mestinya sektor ini mendapat perhatian dalam program pemerintahan.

Padahal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam disertasinya: Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran: Analisis Kebijakan Ekonomi Fiskal Menyebut Bahwa Pembangunan di Sektor Pertanian atau Pedesaan adalah Usaha Penting Untuk Mengentaskan Kemiskinan dan Bukan Pasar Modal (Tim Peneliti PSIK Universitas Paramadina: 2008). Begitu juga dengan policy makers kita di Aceh, juga memiliki latar belakang pertanian dan perkebunan, sebenarnya langkah utama yang harus diberikan adalah tentang dua hal ini, karena sebagian besar penduduk di Aceh bermata pencaharian di sektor pertanian dan perkebunan.

William N. Dunn, mengatakan bahwa dalam tahapan proses

pembuatan kebijakan ada lima fase yang perlu diperhatikan policy makers, (1) Fase penyusunan agenda, pada fase ini para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik. (2) Fase formulasi kebijakan, para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. (3) Fase adopsi kebijakan, fase ini alternatif kebijakan dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas dan/atau konsensus kelembagaan. (4) Fase implementasi kebijakan, disini kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisir sumber daya yang dimilikinya, terutama finansial dan manusia. (5) Fase penilaian kebijakan, pada fase ini unit-unit pemeriksaan dan akuntansi menilai apakah lembaga pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan telah memenuhi persyaratan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditentukan.

Kelima tahapan pembuatan kebijakan di atas dinilai sangat paralel dengan tahapan analisis kebijakan, berbicara mengenai kebijakan, kita mengetahui bahwa kebijakan terletak ditangan eksekutif dan legislatif, yang disebut dengan kebijakan publik. suatu kebijakan publik, pertama-tama berisi kepentingan publik, bukan kepentingan negara, pemerintah, penguasa, apalagi elit politik, jadi sepanjang mempunyai nilai untuk meningkatkan kehidupan publik, that is public policy. Menurut Dwijowijoto dalam Riant Nugroho: 2006, ada tiga hal pokok yang perlu dilihat dalam kebijakan publik antara lain: pertama, kebijakan tersebut bersifat cerdas, dalam arti memecahkan masalah pada inti permasalahannya. Kedua, kebijakan tersebut bersifat bijaksana, dalam arti tidak menghasilkan masalah baru yang lebih besar daripada masalah yang dipecahkan. Ketiga, kebijakan publik tersebut memberi harapan kepada seluruh warga bahwa mereka dapat memasuki hari esok lebih baik dari hari ini.

Isu kesejahteraan adalah isu yang sering digunakan oleh para pejabat pemerintah, seperti halnya dalam tulisan penulis di Artikel Aceh Institute, yang dimuat 01 Januari 2010, yang berjudul "Membumikan Isu Kesejahteraan Sosial" Topik kesejahteraan tampaknya menjadi magnet yang sangat memikat sebagai materi komunikasi para pejabat, apakah itu eksekutif dan legislatif. Bahkan ketika kampanye pemilihan umum (Pemilu) April 2009 yang lalu, iklan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang ditayangkan di Televisi secara gencar menjadikan isu kesejahteraan salah satu materi kontrak politiknya. Akan tetapi, jika ditelisik lebih mendalam se-

jatinya kata "sejahtera/kesejahteraan" adalah sebuah konsep yang "melangit". Tidak semua kalangan tahu apa sesungguhnya yang dimaksud sejahtera itu, bahkan mungkin dipahami secara keliru. Karena itulah di sini sangat diperlukan upaya untuk membumikan isu kesejahteraan tersebut.

Begitu juga dengan tulisan penulis lainnya di rubrik opini koran Harian Aceh, 06 Agustus 2009, yang berjudul "Pentingnya Kebijakan dalam Kesejahteraan Sosial" Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang mendapatkan perlindungan sosial dan dapat pelayanan sosial dari negara. Sudahkah masyarakat Indonesia sejahtera? Jawaban atas pertanyaan ini sangat sulit untuk dijawab. Namun apabila dilihat pada undang-undang dasar 1945 pasal 34 ayat (1), mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Oleh karena itu kebijakan publik sangat penting dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, karena hal ini juga tercantum dalam Undang-undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. UU yang merupakan pengganti UU No 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial ini telah berusaha mendefinisikan kesejahteraan sosial secara lebih kongkrit. Dalam pasal 1 UU tersebut disebutkan bahwa, "Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya". Meskipun begitu, definisi ini belum banyak dipahami oleh masyarakat secara luas karena kurangnya sosialisasi, lebih-lebih UU tersebut baru satu tahun disyahkan.

Masalah kesejahteraan atau kemakmuran menjadi persoalan baik di negara maju maupun negara berkembang. Kecenderungan di negara-negara kapitalis untuk menerapkan sistem pajak progresif. Sistem ini merupakan upaya untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Seperti halnya di negara maju seperti Jerman yang sudah

menganut konsep kesejahteraan dan sudah diketahui sebagai sebuah negara sosial yang menggunakan ekonomi pasar sosial (social market economy). Pertama, prinsip sentralnya adalah pengembangan ekonomi adalah cara terbaik dalam mencapai kesejahteraan sosial. Prinsip ini secara jelas diwujudkan dengan banyak kebijakan yang dikaitkan dengan pendapatan, dan bagi mereka yang tidak memiliki catatan resmi kerja maka tidak akan mendapatkan layanan disaat darurat. Kedua, ekonomi Jerman, dan sistem ekonomi dikembangkan melalui struktur korporatis. Prinsip ini dikembangkan oleh Bismarck, dengan dasar asosiasi saling bantu-membantu (mutual aid association), dan terus menjadi dasar bagi perlindungan sosial. Asuransi sosial, yang mencakup biaya kesehatan, dan beberapa perawatan sosial (social care) dan sistem tunjangan untuk pendapatan (income maintenance system) ditangani dengan dana terpisah.

Ketiga, ada tekanan yang kuat pada prinsip "subsidiaritas". Prinsip ini diartikan negara Jerman sebagai layanan yang ditangani secara terdesentralisasi atau secara independen, dan ditingkat negara harus diberikan secara residual, yaitu dibatasi pada lingkungan kebijakan yang belum dicakup. Warga negara yang dengan pendapatan tinggi tidak dicakup dengan sistem asuransi sosial, tetapi diserahkan kepada mereka sendiri untuk memilih cara dan layanan. Begitu juga dengan Swedia yang menjadi salah satu negara yang berhasil menganut sistem negara kesejahteraan (welfare state). Di negara tersebut kebijakan publiknya berjalan dengan baik seperti halnya pendidikan, dimana warga negara berhak mendapatkan sekolah bebas biaya, dan seluruhnya dibiayai melalui pajak, termasuk pendidikan 9 tahun dan 3 tahun pendidikan lanjut, begitu juga ditingkat pendidikan universitas dibebaskan biaya. Hibah dan hutang juga disediakan bagi seluruh mahasiswa. Mengenai asuransi kesehatan, sistem asuransi kesehatan menjamin semua layanan kesehatan bagi penduduk secara gratis, dan subsidi untuk pengobatan dan perawatan gigi. Untuk pelayanan sakit (sickness benefits) memberi kompensasi hilangnya pendapatan (sampai pada tingkat tertentu) ketika tidak bisa bekerja akibat sakit. Dan juga ada perawatan untuk warga yang usia lanjut dan anak-anak.

B. Sejahtera dalam Konteks Islam

Berbicara mengenai kesejahteraan, secara normatif konsep ajaran Islam sangat jelas. Seperti halnya pendapat Syed Nawab Haeder

Nagvi, yang mengatakan bahwa "ajaran Islam memang dekat dengan ajaran ekonomi kesejahteraan". Oleh karena itu dalam tulisan ini kita mencoba melihat periode Nabi Muhammad SAW (570-624M) dan periode khalifah Empat dalam pemahaman kesejahteraan.

- Periode Nabi Muhammad Saw

Pada masa Nabi Muhammad Saw, Nabi memperkenalkan sistem distribusi pendapatan dan kekayaan dalam bentuk zakat, shadaqah, infaq dan waqaf. Dengan sistem tersebut Nabi mencita-citakan masyarakat yang egaliter, yang didukung oleh solidaritas. Berbeda dengan Mekkah yang masyarakatnya sangat hirarkis berdasarkan kategori kekuatan fisik dan kepemilikan kekayaan, di Madinah tiap warga kota memiliki persamaan hak didepan hukum, egaliter serta didukung oleh keadilan distributif. Mahmud Muhammad Thaha, mengatakan kebijakan Nabi yang egaliter tersebut adalah Nabi menjalani kehidupan puncak komunisme ketika syariat berada dalam tataran ayat zakat yang agung (QS. Albaqarah: 219) yang dimaksud komunisme menurut Thaha adalah seluruh hasil bumi dinikmati secara merata dikalangan masyarakat.

Nabi Muhammad Saw, adalah "kepala negara" pertama yang memperkenalkan konsep genuine dibidang keuangan negara di abad ke- 7 yaitu semua hasil pengumpulan harta harus dikumpulkan terlebih dahulu, lalu dikeluarkan sesuai kebutuhan negara. Hasil pengumpulan tersebut adalah milik negara bukan milik individu. Walaupun demikian pemimpin negara dan gubernur bisa mengambil bagian darinya untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Itulah yang disebut Baitul Mal. Baitul Mal bertempat dimasjid Nabawi. (Sabrawi: 37-38). Namun menariknya dalam buku-buku sejarah tidak disebutkan adanya seorang bendahara. Hal ini mungkin disebabkan lingkungan masa Nabi telah memiliki pengawasan yang ketat. Kadim As-sadri mengatakan bahwa fungsi utama Baitul Mal adalah menjamin kebutuhan hidup dan kesejahteraan sosial minimum bagi setiap orang, muslim dan non muslim yang hidup dalam pemerintahan Islam.

- Periode Empat Khalifah

Pertama, Pemerintahan pada masa Abu bakar tidak banyak terjadi perubahan kecuali pemasukan yang melimpah (80.000 dirham)

bagi Baitul Mal yang berasal dari Bahrain. Masa pemerintahannya sangat singkat, kurang lebih dua tahun. Pada masa itu ketika Abu Bakar melihat ada masalah dalam pembayaran zakat, akhirnya Abu Bakar membuat tindakan represif. Dalam sejarah, kelompok-kelompok masyarakat yang tidak menyetorkan zakat ke pemerintah pusat disebut dengan murtad. Penyebutan istilah murtad ini adalah merupakan sebuah politik identitas Abu Bakar untuk menjustifikasi penumpasan kelompok pembangkang zakat.

Kedua, Pada masa Umar Bin Khatab, pendapatan negara terbagi menjadi empat, pertama, pendapatan yang diperoleh dari zakat, dan ushr dikenakan terhadap muslim. Kedua, pendapatan dari kumus dan sadakah. Ketiga, pendapatan yang diperoleh dari karaj, fay, jizya, ushr, dan sewa tetap tahunan tanah-tanah negara. Keempat, sumber-sumber lainnya. Pendapatan bagian pertama didistribusikan pada tingkat lokal. Jika kelebihan penerimaan sudah disimpan di Baitul Mal pusat dan sudah dibagi-bagikan ke delapan kelompok yang berhak menerima. Bagian kedua, dibagikan kepada orang yang membutuhkan, terutama fakir miskin untuk membiayai aktifitas ekonomi. Pendapatan jenis ketiga, digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan, serta menutupi pengeluaran operasional administrasi, kebutuhan militer dan sebagainya. Pendapatan bagian ke empat digunakan untuk para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya.

Secara umum, sumber pendapatan negara masih berasal dari pendapatan tradisional meskipun dengan kuantitas yang lebih banyak. Catatan terpenting dalam pemerintahan Umar, adalah kebijakan sosialnya untuk memberi tunjangan bagi warga negaranya. Tunjangan dari negara tersebut diperuntukkan bagi janda, anak yatim, membiayai penguburan orang miskin, membayar hutang orang-orang yang bangkrut, membayar diyat atau denda untuk pembunuhan yang tidak disengaja oleh pasukan muslim, serta memberikan pinjaman tanpa bunga untuk urusan komersial. Selain baitul Mal Umar membentuk Al-diwan: sebuah lembaga yang mengatur tunjangan-tunjangan untuk tentara-tentara dan pensiunannya.

Ketiga, pemerintahan khalifah Usman sebagai pengganti khalifah Umar Bin Khatab meyambung kegiatan pemerintahan pada masa Umar dan tidak banyak kebijakan yang baru, hanya ada kebijakan tentang gaji pribadinya tidak ditarik dari uang negara, namun ia me-

nyimpan uang di Baitul Mal memicu kontroversi, dan Usman tidak mengontrol dengan baik (ketat) lembaga Baitul Mal, sehingga memunculkan para pengumpul zakat yang nakal. Kebijakan lain yang diterapkan pada masa Usman adalah kebijakan tentang kenaikan dana pensiun menjadi seratus dirham namun tidak ada rinciannya. Begitu juga dengan lahan yang pernah di dapatkan pada masa Umar tanpa membagi-bagikannya. Sehingga pada masa Usman membagi-bagikannya kepada individu-individu untuk reklamasi dan untuk Baitul Mal, lahan yang ada pada masa Umar 9 juta dirham tersebut, di masa Usman berhasil ditingkatkan menjadi 50 dirham. Dan usman juga membolehkan untuk menukarkan lahan tersebut dengan lahan Hijaz (M.A Sabzwari:56-59).

Keempat, pemerintahan Ali Bin Abi Thalib, khalifah Ali mulai menata ulang sistem pemerintahan yang ada pada masa Usman terutama tentang sistem distribusi Baitul Mal. Khalifah Ali memberlakukan distribusi kekayaan publik tanpa diskriminasi. Ali membagikan dana Baitul Mal pada fakir miskin non muslim sama seperti fakir miskin muslim. Ali juga menekankan bahwa setiap individu mendapatkan bagian dari pendapatan nasioanl. Ali menekankan distribusi yang benar, dana Baitul Mal dibagikan secara proporsional. Hal ini dilakukan terjaminnya kesejahteraan dan keadilan dan sekaligus menstimulasi kegiatan ekonomi. Khalifah Ali Bin Abi Thalib adalah khalifah yang dalam sejarahnya mengambil kebijakan untuk melawan korupsi, penindasan, pengontrolan pasar, memberantas tukang catut, penimbun barang dan pasar gelap. (M.A Sabzrawi: 59)

Menurut Kuntowijoyo, 1993, dalam ajaran Islam pemihakan terhadap kelas diakui sah adanya, namun elan vital yang dijadikan dasar pemihakan itu harus didasarkan pada semangat untuk menegakkan keadilan, dan bukan pada perjuangan kelas untuk melenyapkan kelas yang lain. Islam menurut Kuntowijoyo adalah mengakui adanya diferensiasi dan bahkan polarisasi sosial. Alquran melihat fenomena ketidaksamaan sosial itu sebagai sunnatullah, sebagai hukum alam, sebagai realitas empiris yang ditakdirkan terhadap dunia manusia. Ayat alquran banyak yang memaklumkan dilebihkannya derajat sosial, ekonomi atau kapasitas-kapasitas lainnya dari sebagian orang atas sebagian lainnya. Namun tidka berarti bahwa Alquran mentoleransi ketidak setaraan sosial. Menurut Kuntowijoyo, mengakui tidak sama dengan mentoleransi. Sebab, ajaran Islam memiliki cita-cita sosial untuk secara terus- menerus menegakkan egalitarian-

isme. Keterlibatan untuk menegakkan cita-cita egalitarianisme dan keadilan merupakan tanggung jawab bagi setiap muslim, karena hal itu dipandang sebagai nilai ibadah.

Isu Kesejahteraan di dalam Islam memang sudah diterapkan oleh Nabi Muhammad Saw, hingga dilanjutkan kepada empat khulifah Islam. Kebijakan publik untuk kesejahteraan masyarakat memang harus digalakkan untuk di Negara Indonesia khususnya, karena kebijakannya memiliki dasar hukum yang ada dalam UUD 1945 dan UU No. 11 tahun 2009. Apabila Indonesia menganut sistem welfare state, maka tingkat pengangguran dan kemiskinan yang ada akan semakin menurun. Begitu juga dengan angka kriminalitas dan korupsi yang selalu meresahkan negara. Oleh karena itu kita semua sangat mengharapkan kepada policy makers agar betul-betul melihat kebijakan publik untuk kesejahteraan sosial, karena khususnya kita di Aceh telah menganut sistem Syariat Islam, jadi sudah sepatutnya kita mengikuti tauladan kita Nabi Muhammad Saw, dalam menentukan kebijakan. Apabila itu semua tidak dilakukan maka jangan diharapkan kesejahteraan sosial tersebut terwujud.

C. Memahami Teori Analisa Kebijakan

Schermerhorn, mengatakan teori adalah *a set of concept and ideas that explains and predic physical and social phenomena*.³⁵ Teori terbagi atas dua pemahaman, yaitu *Lay theory* dan *scientific theory*. *Lay theories* adalah teori yang dikembangkan dari pengalaman atau disebut dengan *developed by themselves or learned from others over time and as a result of their experiences*, sementara *scientific theories* adalah teori yang dikembangkan melalui metode-metode ilmiah, atau *that are developed through scientific methods*.

Teori analisis kebijakan, sebagian besar teori manajemen, baik sektor publik maupun bisnis, dikembangkan dari *best practices* yang kemudian diverifikasi, divalidasi kemudian dikodifikasikan. Berbeda dengan teori-teori dalam ilmu alam atau non sosial, yang dikembangkan dari penelitian ilmiah, kemudian dikembangkan menjadi praktik. Pemahaman *lay theory* ini banyak diperdebatkan, apakah layak disebut teori. Banyak penentangannya biasanya berlatarbelakang positivis

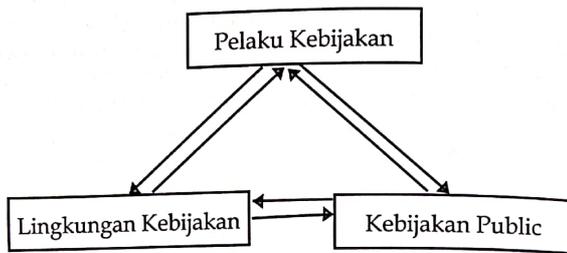
³⁵ John R. Schermerhorn, 1993, *Management for productivity*, 4th edition, hlm 118

yang sangat dipengaruhi oleh pendekatan pembenaran ilmiah ilmu-ilmu alam atau non sosial. Jadi analisis kebijakan adalah teori yang berasal dari pengalaman terbaik, bukan diawali dengan temuan, kajian akademik atau penelitian ilmiah. Artinya teori tentang analisis kebijakan adalah *lay theory*, bukan *academical theory*. Dengan demikian pengembangan teori analisis kebijakan dimasa mendatang akan semakin ditentukan oleh keberhasilan dan kegagalan-kegagalan yang terjadi dilingkungan administrasi publik.

Disiplin kebijakan publik sudah berkembang sejak pada tahun 1920-an yang dipelopori oleh Woodrow Wilson dengan kredonya *When politic and administration begin*, namun masih jarang para pengambil keputusan politik yang bersedia mengurangi ego politiknya dengan mengundang masuk analisis kebijakan. Sebagaimana yang diungkapkan Hank C. Jenkins-Smith, analisis kebijakan harus diakui mengerosi "kekuatan politik" termasuk didalamnya "demokrasi". Pada tingkat tertentu kelompok analisis kebijakan bekerja dilingkaran pertama penguasa politik, tidak hanya bekerja dengan pendekatan teknokratis, tetapi juga pendekatan politik karena memasuki ranah politik.

Menurut Dunn,³⁶ analisis kebijakan adalah aktifitas kegiatan intelektual dan praktis yang ditunjukkan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan. Analisis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multi-pel dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Analisis kebijakan adalah suatu aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik. Analisis kebijakan tidak dimaksudkan menggantikan politik dan membagnuan elit teknokratis. Analisis kebijakan diletakkan pada konteks sistem kebijakan yang menurut Dunn dengan mengutip Thomas R. Dye dapat digambarkan sebagai berikut:

³⁶ William N. Dunn, 1999, (1994, 2nd edition) pengantar analisis kebijakan publik, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, p. xxi+667 hlm, lihat juga Thomas R. Dye, 1995, *Understanding public policy* New Jersey Prentice Hall



William N. Dunn, menjelaskan bahwa dalam metode Analisis Kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim digunakan dalam pemecahan masalah manusia, yaitu:

1. Definisi: Menghasilkan informasi mengenai kondisi- kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan
2. Prediksi: Menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk jika tidak melakukan sesuatu.
3. Preskripsi: Menyediakan informasi mengenai nilai konsekuensi alternatif kebijakan dimasa mendatang
4. Deskripsi: Menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan
5. Evaluasi: Kegunaan alternatif kebijakan dalam memecahkan masalah

Untuk menjawab Analisis kebijakan kita dapat menggunakan salah satu kombinasi dari ketiga pendekatan analisis ini: yaitu Empiris, valuatif, dan normatif.

Pendekatan	Pertanyaan Utama	Tipe Informasi
Empiris	Adakah dan akan- kah ada (fakta)	Deskriptif Dan Preskriptif
Valuatif	Apa mamfaatnya (nilai)	Evaluatif
Normatif	Apa yang harus diperbuat (aksi)	Preskriptif

D. Proses Analisis Kebijakan

Memahami proses analisis kebijakan public atau kebijakan sosial, banyak hal yang perlu diperhatikan oleh seorang Sosiolog, pekerja sosial dan analisis kebijakan, dan untuk itu diharuskan mampu mengurai lebih dalam apa yang paling utama diperhatikan, berikut dijelaskan beberapa hal penting yang perlu dilakukan:

Pertama, merumuskan masalah. Masalah kebijakan adalah nilai kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi yang dapat diidentifikasi, untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. Masalah kebijakan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Terdapat saling kebergantungan antar masalah kebijakan
2. Mempunyai subjektifitas
3. Buatan manusia, karena merupakan produk penilaian subjektif dari manusia.
4. Bersifat dinamis

Sementara itu, ada tiga kelas masalah kebijakan sebagaimana yang digambarkan berikut:

Elemen	STRUKTUR MASALAH		
	Sederhana	Agak Sederhana	Rumit
Pengambilan keputusan	Satu atau beberapa	Satu atau beberapa	Banyak
Alternatif	Terbatas	Terbatas	Tidak terbatas
K e g u n a a n (nilai)	Konsensus	Konsensus	konflik
Hasil	Pasti atau beresiko	Tidak pasti	Tidak diketahui
Probabilitas	Dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung

Fase-fase perumusan masalah kebijakan dapat disusun sebagai berikut:

1. Pencarian masalah
2. Pendefinisian masalah

3. Spesifikasi masalah
4. Pengenalan masalah

Kedua, peramalan masa depan kebijakan. Peramalan atau forecasting adalah prosedur untuk membuat informasi aktual tentang situasi sosial di masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan. Peramalan ada tiga bentuk:

1. Peramalan ekstrapolasi, yaitu ramalan yang didasarkan atas eksplorasi hari ini kemasa depan, dan produknya disebut proyeksi. Teknik yang digunakan antara lain analisis antar waktu, estimasi tren linear, pembibitan eksponensial, transformasi data, dan katastrofi metodologi. Peramalan ini menggunakan tiga asumsi dasar persistensi (pola yang diamati dimasa lampau akan tetap ditemui di masa depan), keteraturan (visi dimasa lalu sebagaimana ditunjukkan oleh kecendrungan terulang secara ajek di masa depan) dan reliabilitas-validitas data
2. Peramalan teoritis, yaitu ramalan didasarkan pada suatu teori, dan produknya disebut prediksi teknik yang digunakan antara lain pemetaan teori, model kausal, analisis regresi, estimasi titik dan interval dan analisis korelasi. Apabila peramalan ekstrapolatif menggunakan logika induktif, peramalan teoritis menggunakan logika eduktif.
3. Peramalan penilaian pendapat, yaitu ramalan yang didasarkan pada penilaian para ahli atau pakar dan produknya disebut perkiraan (conjecture). Teknik yang digunakan antara lain delphi kebijakan, analisis dampak silang dan penilaian fisibilitas (kelayakan). Teknik peramalan penilaian pendapat (judgemental forecasting) berusaha memperoleh dan menyintesiskan pendapat-pendapat para ahli. Peramalan mempunyai sejumlah tantangan, yaitu berkenaan dengan isu (1) akurasi ramalan (2) kondisi komparatif masa depan, dan (3) konteks, yaitu konteks intituasional, temporal, dan histrokal. Masa depan pun terdiri atas tiga jenis, yaitu masa depan yang potensial atau sering disebut masa depan laternatif, masuk akal (plausible) dan normatif, yang merupakan gabungan antara potensial dan plausibel.

Ketiga, Rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan mengharuskan analisis kebijakan menentukan alternatif yang terbaik, karena prosedur dari analisis kebijakan berkaitan dengan masalah

etika dan moral. Rekomendasi pada dasarnya adalah pernyataan dari advokasi.

Dalam memutuskan alternatif kebijakan, salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan adalah rasionalitas.

Selanjutnya Edi Suharto³⁷, mengembangkan analisis kebijakan dengan enam langkah:



Edi Suharto menjelaskan bahwa dalam memahami kebijakan sosial hal yang harus diperhatikan adalah: pertama, mendefinisikan masalah kebijakan, dalam tahapan ini seorang pekerja sosial atau seorang sosiolog yang ingin menganalisa masalah, maka harus tau terlebih dahulu masalahnya. Kedua, mengumpulkan bukti tentang masalah, pada tahap ini seorang penganalisa dituntut mengumpulkan segala bukti yang didapatkan di lapangan dan disimpan. Ketiga, mengkaji sebab masalah, pada tahap ini seorang penganalisa diminta untuk mengkaji sebab masalahnya, apakah masalah tersebut datang dari individu atau dikarenakan oleh sistem. Keempat, mengevaluasi kebijakan yang ada, pada tahap ini seorang penganalisa kebijakan dituntut untuk mengevaluasi kebijakan yang telah ada. Kelima, mengembangkan alternatif yang ada, pada tahap ini penting adanya

³⁷ Edi Suharto, 2005, Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial, Alfabeta, Bandung

proses evaluasi terhadap kebijakan yang telah dikembangkan, dengan melihat manfaat dan dampak dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Dan terakhir, menyelektif alternatif kebijakan yang terbaik, pada tahapan terakhir ini diharapkan seorang penganalisa kebijakan dituntut mengetahui apa saja bentuk alternatif kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah yang dinilai baik dalam pelayanan publik dan dapat direplikasi kewilayah lainnya.

BAB VI MEDIA DAN PERUBAHAN SOSIAL

A. Pendahuluan

Perubahan sosial menjadi tema yang sangat menarik dalam konteks kehidupan sosial dan politik. Terlebih masalah ini apabila dikaitkan dengan keberadaan negara Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang membutuhkan perubahan sosial untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dengan adanya berbagai krisis sosial maupun ekonomi yang melanda negeri ini menuntut adanya perubahan, khususnya terkait sistem-sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah yang sedang terjadi di Indonesia, karena mengalami krisis ekonomi sejak tahun 1997, maka pada dasarnya Indonesia membutuhkan perubahan sosial untuk keluar dari krisis ekonomi yang berlanjut pada krisis sosial tersebut.

Sayangnya, tidak semua kalangan sepakat tentang terjadinya perubahan sosial ini. Hal ini salah satunya disebabkan bahwa perubahan sosial tersebut dapat mengakibatkan kerugian beberapa kelompok masyarakat tertentu. Misalnya, ketika perubahan sosial menuntut perubahan rezim pemerintahan, maka tentu saja rezim pemerintah yang sedang berkuasa menolak tuntutan adanya perubahan tersebut. Inilah yang mengakibatkan perubahan sosial itu seringkali sulit untuk dilakukan.

B. URGENSI PERUBAHAN SOSIAL

Untuk konteks Indonesia, memang sangat membutuhkan ter-

jadinya perubahan sosial. Kebutuhan ini karena kehidupan sosial maupun ekonomi bangsa Indonesia berada dalam krisis yang harus segera dituntaskan. Besarnya jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia menjadi salah satu faktor yang mendesak dilakukannya perubahan sosial. Bank Dunia melaporkan jumlah penduduk miskin Indonesia pada 2007 sebanyak 105,3 juta jiwa atau 45,2 persen dari total penduduk Indonesia sebanyak 232,9 juta jiwa. Sedangkan Badan Pusat Statistik menyebut angka kemiskinan sebesar 37,2 juta jiwa. Pada tahun 2008 sendiri, data resmi kemiskinan per Maret 2008 adalah 34,96 juta jiwa (Koran Tempo, 9 September 2008). Perubahan sosial menyangkut kondisi krisis ini tentunya adalah perubahan yang positif, yakni perubahan menuju masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Sebab hidup sejahtera pada dasarnya adalah hak dasar dari setiap warga negara.³⁸

Memperbincangkan tema perubahan sosial tidak bisa lepas dari para pemikir besar seperti Karl Marx, Max Weber atau Emile Durkheim. Pemikiran Karl Marx, Emile Durkheim dan Max Weber awalnya hanya melihat perkembangan masyarakat di Benua Eropa, tetapi mereka masing-masing juga mencari relevansi dengan benua lain dalam batas-batas kemampuan generalisasi yang wajar. Bagi akademisi di Indonesia, ketiga tokoh itu akan selalu ditampilkan mana kala membicarakan beragam fenomena sosial yang melintas sebagai masalah kemasyarakatan.

Salah satu pemikiran yang terkenal adalah pemikiran Marx tentang historical materialism, yang mengungkap bahwa perilaku manusia ditentukan oleh kedudukan materinya, bukan pada ide karena ide juga merupakan bagian dari materi pula.³⁹ Dengan adanya pemikiran ini, maka perubahan sosial tidak akan terjadi dengan baik jika tidak dimulai dari sistem itu sendiri. Misalnya, adanya kemiskinan dan masalah sosial lainnya adalah akibat terjadinya sistem sosial, ekonomi atau sistem politik yang salah. Oleh karena itu, jalan terbaik untuk melakukan perubahan adalah merubah sistem itu sendiri, bukan manusianya. Inilah salah satu pengaruh dari pemikiran tersebut terhadap konteks perubahan sosial.

³⁸ Budi Yuni (Editor), 2006, Pengantar Memahami Hak Ekosob, Pusat Telaah dan Informasi Regional dan EIDHR Uni Eropa, Jakarta, hlm. 5

³⁹ Agus Salim, 2002, Perubahan Sosial Sketsa Teori Dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia, Tiara Wacana, Yogyakarta, hlm. 30

Kebanyakan literatur tentang perubahan sosial belum secara pasti dan terang mendefinisikan apa yang dimaksud dengan perubahan sosial. Banyak para ahli bersilang pendapat mengenai hal tersebut, terutama berkenaan dengan spirit yang dikandung di dalamnya. Wilbert Moore berpendapat bahwa perubahan sosial sebagai perubahan penting dari struktur sosial. Dan struktur sosial itu adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial. Sedangkan rober H. Lauer berpendapat bahwa perubahan sosial itu sangatlah rumit untuk dijelaskan, sebab banyak hal yang mesti dikaji terutama berkenaan dengan seluruh tingkat dan aspek kehidupan sosial, yang jelas perubahan itu sendiri pasti adanya, namun yang berbeda hanyalah tingkat perubahannya itu sendiri, ada yang lambat, ada yang cepat.

Konsepsi para ahli tentang perubahan sosial memang berbeda-beda, namun pada dasarnya mereka bersepakat bahwa perubahan di dalam struktur masyarakat itu pasti ada, dan itu terjadi ketika ada perubahan di dalam mentalitas masyarakatnya. Pada umumnya perubahan mentalitas atau struktur masyarakat pasti akan berpengaruh pada proses interaksi sosial di dalam masyarakat. Adapun penyebab perubahan sosial masyarakat bisa bersumber pada banyak hal, yang terpenting mampu merubah pola pikir dan perilaku masyarakat di dalam melakukan interaksinya.

Perubahan sosial merupakan gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat dan merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan sosial di masyarakat meliputi beberapa orientasi, antara lain (1) perubahan dengan orientasi pada upaya meninggalkan faktor-faktor atau unsur-unsur kehidupan sosial yang mesti ditinggalkan atau diubah, (2) perubahan dengan orientasi pada suatu bentuk atau unsur yang memang bentuk atau unsur baru, (3) suatu perubahan yang berorientasi pada bentuk, unsur, atau nilai yang telah eksis atau ada pada masa lampau.

Menurut Cristian Debora,⁴⁰ dalam memantapkan orientasi suatu proses perubahan, ada beberapa faktor yang memberikan kekuatan pada orientasi perubahan tersebut, antara lain adalah sebagai berikut: (1) sikap, dalam hal ini baik skala individu maupun skala kelompok yang mampu menghargai karya pihak lain, tanpa dil-

⁴⁰ Cristian Debora, Pengaruh Media Terhadap Perubahan Sosial, dalam <http://christinpisces.wordpress.com>, di akses tanggal 6 Januari 2010

puan untuk memotivasi dirinya untuk kembali dari kondisi tidak normal ke kondisi normal. Kita ambil contoh pada masyarakat korban bencana, dimana mereka memiliki sifat malas untuk kembali memenuhi kebutuhan hidupnya, dikarenakan masyarakat korban bencana sudah menjadi masyarakat yang konsumtif bukan produktif, sehingga konsep ini menjadi metode yang tepat untuk merubah sikap tersebut. Oleh karena itu metode ini sangat tepatnya dilakukan oleh orang yang mengerti, seperti pekerja sosial (social work) atau community worker.

Masrizal, MA

BAB VIII Penanggulangan Pengangguran Dalam Perspektif Pembangunan Sosial

A. Pendahuluan

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, dan kemudian berkembang menjadi krisis yang bersifat multidimensional telah menghancurkan struktur bangunan ekonomi, politik dan sosial yang dibangun oleh rezim orde baru. Krisis tersebut membuktikan bahwa rezim orde baru telah membangun pondasi yang rapuh bagi kesinambungan berbangsa dan bernegara. Dari sejumlah Negara di Asia yang mengalami krisis, Indonesia termasuk salah satu negara yang sampai saat ini belum mampu keluar dari krisis tersebut.

Kondisi keuangan ini juga bukan hanya bergejolak bagi pemegang modal dan tenaga kerja, tapi juga berimbas pada krisis multidimensi yang mengakibatkan gejolak sosial di tengah masyarakat. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah penganggur yang semakin meningkat, pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata. Sebaliknya pengangguran merupakan pemborosan-pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang.

Krisis ekonomi yang terjadi dewasa ini telah membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disibukkan oleh upaya mencari jalan keluar untuk menghentikan kondisi ekonomi yang terus semakin memburuk yang mengakibatkan bertambahnya pengangguran diberbagai

daerah di Indonesia. Salah satu alternatif yang diambil oleh Presiden SBY adalah mengajak pihak pemegang modal agar merundingkan segala masalah yang dihadapi oleh perusahaan. (Republika, 29 Desember 2008)

Mengarah ke Aceh, mengutip ungkapan wakil gubernur (Muhammad Nazar) dalam jumpa pers dengan Wartawan Serambi Indonesia mengatakan jumlah pengangguran di Aceh selama tahun 2008 lebih kecil dibanding dengan tahun 2007 dan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2008 tingkat pengangguran di Aceh sebesar 9,8 persen, sedangkan pada tahun 2007 mencapai 12 persen lebih. Bahkan, angka 9,8 persen itu masih di bawah tingkat pengangguran secara nasional pada tahun 2008 yaitu mencapai 14 persen lebih, dan ditambah ungkapan Kasubdin Hubungan Industrial dan Perindungan Tenaga Kerja, Anwar TM Ali, ia menyebutkan, tingkat pengangguran di Aceh saat ini 9,8 persen. Jumlah pengangguran di Aceh saat ini mencapai 171.424 orang yang terdiri dari 90.621 wanita dan 80.803 laki-laki. Sedangkan angkatan kerja mencapai 1.742.185 orang (www.serambinews.com)

Berdasarkan pemberitaan di media lokal Aceh, Pemerintah Aceh dalam mengatasi pengangguran mengambil alternatif menyediakan sejumlah program seperti Bantuan Langsung Mandiri serta membuka lahan perkebunan seluas 15 ribu hektar yang ditanami serwit, cokelat, dan karet. Pengangguran di Provinsi Aceh bukan hanya faktor krisis ekonomi global dewasa ini tapi juga disebabkan oleh akibat masa konflik dan gempa tsunami. Angka pengangguran di Aceh sejak tahun 2006 sudah bisa ditekan sebesar 48 persen, 2007 menjadi 26 persen, dan 2008 menjadi 23,3 persen. Namun data ini juga tidak jauh beda dari data Kasubdin Hubungan Industrial, M Yunan, mengatakan jumlah pengangguran di Aceh hingga posisi September 2007 berjumlah 183.822 jiwa. Menurut disbanding angka sebelumnya 331.949 jiwa. Selanjutnya Data Dinas Tenaga Kerja dan Mobilisasi Penduduk (Disnakermobduk) Aceh, mengatakan bahwa jumlah pengangguran hingga Juli 2009 tercatat sebanyak 137.920 orang. Diketahui angka berarti mengalami peningkatan jumlah pengangguran sekitar 3.199 orang (Serambi Indonesia, 29 Juli 2009). Tingginya angka pengangguran disebabkan karena terbatasnya lapangan pekerjaan itulah yang menyebabkan karena terbatasnya lapangan pekerjaan pada golongan yang baru saja menyelesaikan pendidikan dan gol-

gan yang kehilangan pekerjaan. "Sangat disayangkan bagi mahasiswa dan mahasiswa yang baru menyelesaikan pendidikannya dan masih terkandung-kandung mencari pekerjaan. Kepergian LSM lokal dan asing dari Aceh sangat berpengaruh terhadap hilangnya lapangan pekerjaan ini, dengan jumlah penduduk Aceh yang mencapai 4,5 juta jiwa.

Para akademisi dan politisi di Aceh berhipotesa bahwa penyebab pengangguran adalah Akibat masa konflik dan gempa tsunami. Dimana masyarakat yang sebelum masa konflik bekerja dengan giat, namun ketika konflik harus berhenti total dalam bekerja, khususnya bagi petani gunung, tetapi pasca damai masyarakat kembali melakukan aktifitasnya. Tetapi mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang semasa konflik hanya memegang senjata tidak memiliki keahlian. Sebagian mantan anggota GAM ada yang berhasil menjadi pengusaha atau terlibat dalam partai. Tetapi tidak sedikit anggota yang menjadi pekerja serabutan dan pengangguran. Pengangguran di Aceh bukan hanya orang-orang yang berpendidikan sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA) saja, tapi juga para lulusan perguruan tinggi di Banda Aceh banyak yang selesai kuliah harus pulang kampung dan kembali ber-tani dan kegiatan aktifitas lainnya di daerah masing-masing. Fenomena semacam ini memang sudah turun temurun dari masa kemasa.

Sehingga stigma yang muncul dimasyarakat tidak boleh di-alahkan apabila ada mereka mengatakan kepada anak-anak mereka "untuk apa kalian sekolah tinggi-tinggi yang jadi pegawai dan lainnya memang sudah disiapkan oleh orang-orang penting daerah". Sehingga akibat stigma tersebut mengakibatkan banyak anak-anak usia produktif selesai SMA sangat sedikit yang melanjutkan ke bangku perguruan tinggi.

Perihal yang seperti ini harus menjadi kajian mendalam dari pihak pemerintah kabupaten/kota dan provinsi karena percuma saja dianggarkan untuk pendidikan mencapai 20 % kalau hanya dirasa-pendidikan untuk kelas menengah keatas, kalau kita merujuk kembali ke amandemen UUD 45 Pasal 31 ayat (1) "bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak). dan ayat (2). Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Dan pasal 33 ayat (3). "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

Pengendalian Masalah Sosial

besar kemakmuran rakyat.”

Pada dasarnya pemerintah daerah telah khawatir akan meningkatnya pengangguran selesainya program-program kemanusiaan di Aceh dari beberapa Non Governance Organizer (NGO) Asing dan program dari Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR). Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Irwandi Yusuf khawatir selesainya masa tugas Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) tahun depan (2009) dapat menimbulkan pengangguran. Namun ia menargetkan dapat menekan jumlah pengangguran (Koran Tempo, 18 Desember 2008)

Program penanggulangan pengangguran sebenarnya sudah menjadi perhatian pemerintah sejak rezim orde baru berkuasa sampai dengan sekarang. Yang kita ketahui adalah program Gerakan Nasional Penanggulangan Pengangguran (GNPP). Digulirkannya program-program tersebut memang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pemenuhan-pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Namun, komitmen ini belum menjawab persoalan utama bagi pemenuhan hak-hak itu. Ada program-program yang hanya bersifat insidental, sehingga kurang mampu memberdayakan masyarakat, serta dalam kenyataannya banyak program yang salah sasaran.

Pembangunan Provinsi Aceh kedepan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang sehat fisik dan mental serta mempunyai ketrampilan dan keahlian kerja, sehingga mampu membangun keluarga, masyarakat dan bangsa untuk mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan layak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan.

Beranjak dari masalah diatas tentang kondisi konflik, gempa tsunami dan krisis global menyebabkan pengangguran dan efeknya pada pembangunan, maka dalam tulisan ini penulis akan mencoba memberikan alternatif pendekatan pembangunan sosial sebagai salah satu solusi dalam menangani dampak dari berbagai persoalan pengangguran.

B. Memahami Masalah Pengangguran dan Pembangunan Sosial

Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau

Penanggulangan Pengangguran Dalam Perspektif Pembangunan Sosial

bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan. (Payaman Simanjuntak, 1985). Selain daripada itu, Pengangguran di definisikan juga sebagai orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah SMP, SMA, Mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak/ belum membutuhkan pekerjaan.

a. Jenis dan Macam-macam Pengangguran

1. Pengangguran Friksional/ Frictional Unemployment

Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang ada. Kesulitan temporer ini dapat berbentuk sekedar waktu yang diperlukan dalam prosedur pelamaran dan seleksi, atau terjadi karena faktor jarak atau kurangnya informasi. Jenis pengangguran ini sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan.

2. Pengangguran Struktural/Structural Unemployment

Pengangguran struktural adalah keadaan dimana pengangguran yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju perekonomian suatu daerah maka semakin meningkatkan kebutuhan sumber daya manusia yang dimiliki. Pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan dalam struktur atau komposisi perekonomian. Kurangnya keterampilan tenaga kerja menyebabkan tenaga kerja tersebut tidak bisa diterima di dunia kerja. Seperti halnya tenaga kerja disektor pertanian tradisional yang tidak mampu menggunakan teknologi pertanian, yang dalam perspektif masyarakat tradisional menolak adanya teknologi. Untuk menjadi tenaga kerja dibidang industri dibutuhkan keterampilan kerja, dalam hal ini keahlian tertentu dalam bidang teknologi baru. Sehingga jenis inilah yang membuat adanya penganggur struktural.

3. Pengangguran Musiman / Seasonal Unemployment

Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek yang me-

Pengendalian Masalah Sosial

nyebabkan seseorang harus menganggur. Contohnya seperti petani yang menanti musim tanam, tukang jualan durian yang menanti musim durian dan lain-lain.

Akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga menyebabkan permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Untuk di Aceh pengangguran sudah kompleks semuanya mulai dari pengangguran jenis Friksional, Struktural, hingga Musiman. Pemerintah dalam hal ini telah berusaha mencari pemecahan masalahnya. Pemerintah ingin merubah masyarakat dari yang ill fare (tidak sejahtera) ke welfare (sejahtera) sesuai amanat undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.", dan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial. Seperti Undang-undang Nomor 11 tahun 2011, tentang Kesejahteraan Sosial.

Meningkatnya bantuan pemerintah untuk program kesejahteraan sosial dapat dijadikan sebagai dasar perkiraan bahwa jumlah dan persentase pengangguran semakin bertambah. Sebaliknya semakin menurun bantuan pemerintah untuk Program-program bantuan kesejahteraan sosial berarti jumlah dan persentase pengangguran miskin juga semakin berkurang. Menurut Midgley dalam Miftachul Huda, 2009 definisi sejahtera adalah:

Pertama, ketika masalah-masalah sosial dalam masyarakat dapat diatasi dengan baik. Misalnya pengangguran, kelaparan, kekeringan, musibah banjir dan lain sebagainya. Baik itu masalah pada level individu, keluarga, kelompok dan level masyarakat. Masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan ataupun berbagai musibah tidak tertangani secara baik di negeri ini menandakan bahwa kesejahteraan masyarakat belum terpenuhi.

Kedua, kesejahteraan juga ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Tidak ada lagi penduduk miskin dan gelandangan yang terlantar, tidak ada lagi warga yang terabaikan sehingga terpaksa mengemis dan lain sebagainya. Pemenuhan kebutuhan ini bisa dalam bentuk kebijakan sosial yang memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat kurang beruntung (disadvantage groups)

Terakhir, peluang-peluang sosial seperti lapangan kerja yang

Masrizal, MA

Penanggulangan Pengangguran Dalam Perspektif Pembangunan Sosial

luas, kesempatan akses pelayanan public (misalnya pendidikan, pertanian dan kesehatan) yang lebar bagi penduduk miskin adalah hanya sekelumit contoh indikator kesejahteraan.

Sehingga sangat aneh apabila ingin berusaha mensejahterakan masyarakat tetapi justru pemerintahnya menciptakan harga sembaiko, dan harga pupuk yang mahal, yang tidak terjangkau rakyat miskin, khususnya masyarakat miskin di pedesaan.

b. Pembangunan Sosial

Pembangunan sosial didefinisikan sebagai sebuah proses perubahan sosial yang terencana yang didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk menyeluruh dengan menggabungkannya dengan proses pembangunan ekonomi yang dinamis, (Midgley, 2005). Melihat fenomena pembangunan yang maju dan mundur itu adalah faktor yang memang sebelumnya dijamin dahulu kala memang sudah ada. Karl Marx melihat maju dan mundur nya perubahan di masyarakat adanya pengaruh dari sistem kapitalisme. Analisis Marx dalam karyanya Das Kapital mengatakan bahwa ada hal yang tidak mengesankan dari sistem kapitalisme yakni tentang komoditi. (Mansur Faqih, 2001).

Bagi Marx pada komoditilah tersimpan rahasia ketidakadilan kapitalisme. Komoditi selain selain memiliki sifat kegunaan atau used value juga mengandung sifat exchange value, yakni sifat untuk dijual belikan.

Dalam analisisnya Marx ditemukan bahwa prinsip yang digunakan dalam masyarakat untuk mengatur dan menetapkan rasio tukar adalah berdasar pada kuantitas kerja yang terkandung dalam komoditi. Marx mencontohkan analisisnya tentang buruh, dimana individu buruh dapat dihitung, dan untuk menghitungnya diperlukan suatu model relasi yang dikenal dengan made of production kapitalisme. Atas dasar analisis ini pula marx menilai bahwa kapitalisme adalah sistem sosio- ekonomi yang dibangun untuk mencari keuntungan yang didapat dari proses produksi, bukan dari dagang, riba, memeras, ataupun mencuri secara langsung, tapi dengan cara mengorganisasikan mekanisme produksi secara tertentu sehingga mengurangi biaya produksi seminimum mungkin, atau melalui made of production tertentu (Mansur Faqih, 2001)

Pemahaman Marx tentang kapitalisme sangat jelas mengatakan bahwa pemegang ekonomi dibelahan dunia manapun yang menganut sistem kapitalisme adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun jika di Indonesia paham seperti ini terus berjalan membuat masyarakat terjauh dari kultur (budaya) yang ada dimasyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Salah satu sistem tradisional yakni sistem barter. Fenomena pengangguran sekarang terjadi itu adalah tak terlepas dari sistem kapitalisme yang dianut oleh pemegang saham di negara kita. Para aktifis Hizbur Tahrir Indonesia menyarankan kepada pemerintah agar Indonesia menganut sistem ekonomi islam. Aktifis hizbur tahrir mengatakan gelombang pemutusan hubungan kerja(PHK) yang terjadi saat ini adalah akibat dampak dari penerapan sistem ekonomi kapitalis yang membuat lemahnya struktur ekonomi pasar yang dianut. Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam negaralah yang mengelola sumber kekayaan yang menjadi milik rakyat. Alhasil, dikembalikan lagi kepada rakyat, dengan demikian jaminan sosial bagi masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan akan terpenuhi. Dalam kondisi seperti ini juga daya beli masyarakat akan sangat kuat dan stabil.

Fenomena pengangguran memang merupakan masalah yang sangat rumit. Banyak dimensi yang harus dipahami untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang masalah pengangguran. Kondisi ini juga menuntut pemerintah agar dalam menentukan kebijakan untuk mempunyai wawasan yang cukup luas dengan penuh kejelian. Namun menurut Mudiono banyaknya pengangguran (masalah sosial) diasumsikan sebagai pemicu munculnya revolusi sosial oleh buruh.

Dalam sejarah pembangunan Ekonomi Pancasila sepanjang berdirinya Republik ini, praktek-prakteknya sangat jelas dalam usaha pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Dalam hal ini ekonomi Pancasila telah pula membuat tata kelola dan peran masing-masing tiga pelaku ekonomi (Koperasi-BUMN-Swasta) yang melaksanakan amanat UUD-45. (Siswono Yudo Husodo, dalam <http://www.damandiri.or.id>)

Masalah pengangguran semakin serius dan rumit, serta butuh langkah penyelesaian konkret dan terobosan. Salah satunya dengan memanfaatkan keberadaan ratusan BUMN, baik yang sepenuhnya masih milik pemerintah, maupun sebagian sahamnya telah dilepas

kepada investor swasta. Pemerintah dapat memanfaatkan fungsi sosial strategis badan usaha milik negara (BUMN) untuk mengurangi angka pengangguran melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peran strategis Selain bertugas menghasilkan barang dan atau jasa untuk kemakmuran masyarakat, BUMN memiliki peran strategis dalam membantu pembinaan dan pengembangan UMKM (termasuk koperasi). Dalam konteks ini, BUMN harus dapat dipisahkan dari peran tradisionalnya sebagai penyedia barang dan jasa kebutuhan publik.

Sebab dalam kondisi seperti saat ini, peranan BUMN sangat dibutuhkan untuk membantu pembangunan nasional, khususnya menekan angka pengangguran. Meski demikian, peran tradisional tersebut tetap harus dapat dijalankan. Terkait pelaksanaan fungsi strategis BUMN tersebut, pemerintah melalui PP No 3/1983 telah menugaskan BUMN agar turut membantu pengembangan UMKM. Sebagai tindak lanjutnya, telah terbit berbagai keputusan menteri maupun peraturan menteri sebagai pedoman. Salah satunya Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep.236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Pelaksanaan Bina Lingkungan.

Bagaimanapun, BUMN tidak bisa menanggalkan peran dan fungsi strategisnya. Sebab BUMN didirikan bermodal dana pemerintah. Penyertaan modal pemerintah ini bersumber dari APBN, di mana dananya dikumpulkan dari setoran pajak rakyat maupun pinjaman luar negeri yang ujung-ujungnya juga menjadi beban rakyat untuk membayarnya kembali. Pemberdayaan UMKM merupakan langkah penting untuk menekan angka pengangguran. Sebab hingga kini sektor UMKM telah mempekerjakan dua pertiga dari seluruh angkatan kerja yang berjumlah 106,9 juta orang. Hal ini dapat terjadi mengingat keberadaan UMKM selama ini terkonsentrasi pada sektor produksi yang bersifat padat karya.

Dalam perkembangan globalisasi seperti kita saksikan saat ini ternyata tidak makin mudah menyajikan pemahaman tentang adanya sistem ekonomi Indonesia. Kaum akademisi Indonesia terkesan makin mengagumi globalisasi yang membawa kemenangan sistem kapitalisme Barat. Sikap kaum akademisi semacam ini ternyata membawa pengaruh besar terhadap sikap kaum elit politik muda Indonesia, yang mudah menjadi ambivalen terhadap sistem ekonomi.

c. Urgensi Pendekatan Pembangunan Sosial Dalam Penanggulangan Pengangguran

Melihat perkembangan pembangunan di Indonesia selama pemerintahan rezim presiden soeharto (orde baru) pembangunan ekonomi menjadi satu-satunya jalan keluar dalam arah pembangunan negara dengan mengenyampingkan Pembangunan sosial.

Pembangunan ekonomi memang mendongkrak pembangunan bangsa tapi apabila tidak diseimbangi dengan pembangunan sosial maka kemajuan pembangunan hanya dirasakan oleh pemegang saham saja dan tidak pada kelas buruh.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, ternyata belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. dengan kata lain, pembangunan telah gagal memenuhi janjinya untuk mensejahterakan rakyat, yang terjadi sebaliknya, pembangunan telah membawa dampak negatif, diantaranya pembangunan telah melanggengkan pengangguran, menumbuhkan ketidak merataan dan menaikkan kemiskinan absolute. (Mansur Faqih, 2002) Suparjan mengatakan bahwa implementasi sistem kapitalisme mengandung berbagai kelemahan dan implikasi negatif. Sistem kapitalisme yang berkembang di Negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia adalah kapitalisme semu (*ersatz capitalism*), selain juga kapitalisme birokrat (*beaurocratic capitalism*). Dalam bentuk kapitalisme seperti ini, terlihat bahwa banyak pemimpin-pemimpin politik, anak-anak dan sanak keluarga mereka terlibat dalam bisnis.

Para ahli sejarah sosial seperti Rollin Chambliss, mengemukakan bahwa para filsuf Yunani telah banyak menulis tentang perubahan sosial dan sebelumnya ide-ide perubahan sosial telah muncul dalam bentuk mitos-mitos, legenda, dan agama-agama dari peradaban kuno. Contohnya, orang China kuno percaya bahwa masyarakat pertama sekali tumbuh dan menjadi semakin terorganisir dan membaik, tetapi selanjutnya menurun ke arah ketidakteraturan dan kehancuran. Namun James Midgley mengatakan bahwa perubahan sosial adalah sebuah proses yang berputar (*cyclical process*) yang terdiri dari proses yang berubah-ubah antara kemajuan dan kemunduran (James Midgley, 2005).

Dalam pembangunan sosial menurut Midgley (2005), strategi pembangunan sosial dapat dilakukan pada 3 level, yaitu: 1)

strategi pembangunan sosial yang menempatkan individu sebagai penanggung jawab utama dalam usaha mengangkat pembangunan sosial, 2) strategi yang menekankan pada peran masyarakat local dalam menunjang pembangunan sosial, dan 3) strategi-strategi yang tergantung

pada pemerintah dalam usaha mengangkat pembangunan sosial. Dari ketiga bentuk strategi ini bisa menjadi alternatif untuk menanggulangi pengangguran di Negara Indonesia karena pemerintah dapat mengangkat pembangunan sosial dengan didukung birokrasi yang efisien.

Konsep partisipasi masyarakat dan konsep pemberdayaan masyarakat juga menjadi alternatif dalam pembangunan sosial dalam menyelesaikan masalah pertumbuhan ekonomi yang telah banyak merusak alam dan tempat tinggal manusia. (Suparjan dan Hempry Suyatno, 2004) WHO dan Bank Dunia juga memberikan tekanan lebih pada keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan sosial. Di negara Skandinavia khususnya Swedia menggunakan kebijakan sosial sebagai alternatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pasar buruh yang efektif sehingga menyerap tenaga kerja. Pemerintah Swedia menggunakan pendekatan pembangunan sosial sebagai jalan keluar dalam menangani masalah pembangunan.

Pemerintah Indonesia melalui Gerakan Nasional Penanggulangan Pengangguran (GNPP) yang diadakan di Jakarta 29 Juni 2004, Mengingat 70 persen penganggur didominasi oleh kaum muda, maka diperlukan penanganan khusus secara terpadu program aksi penciptaan dan perluasan kesempatan kerja khusus bagi kaum muda oleh semua pihak. Berdasarkan kondisi diatas perlu dilakukan Gerakan Nasional Penanggulangan Pengangguran (GNPP) dengan mengerahkan semua unsur-unsur dan potensi di tingkat nasional dan daerah untuk menyusun kebijakan dan strategi serta melaksanakan program penanggulangan pengangguran. Salah satu tolok ukur kebijakan nasional dan regional haruslah keberhasilan dalam perluasan kesempatan kerja atau penurunan pengangguran dan setengah pengangguran.

Pembangunan sosial berupaya untuk mengintegrasikan proses sosial dan proses ekonomi dalam kegiatannya. Marjuki (2004) sebagaimana dikutip dalam Edi Suharto (2004) menjelaskan bahwa dalam

proses sosial dan ekonomi sama-sama berfungsi sebagai pendorong terciptanya pertumbuhan dan perubahan masyarakat kearah yang lebih baik (Edi Suharto, 2004,) Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Faurie dan Vanden Bogaerde (1989) yang menjelaskan bahwa terdapat adanya sumberdaya manusia yang memadai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di masyarakat.

Menurut Mudiono, pembangunan bukan sekedar fenomena ekonomi semata bukan pula pertumbuhan ekonomi saja melainkan kesejahteraan jika mengabaikan pembangunan sosial. Pengangguran adalah salah satu dari masalah sosial yang rumit untuk dipecahkan, berbagai macam program pemerintah dicanangkan dalam mengatasi masalah ini mulai dari rezim orde baru sampai dengan sekarang, salah satu jalannya pemerintah memberikan jaminan sosial kepada penganggur yang tujuannya agar para penganggur bisa mandiri dan mampu mencoba menciptakan lapangan kerja sendiri.

Korten, (1998) sebagaimana dikutip dalam Sumaryadi (2005) mengemukakan bahwa strategi program pengembangan masyarakat berorientasi pada pembangunan yang tercermin dalam empat generasi. pertama mengutamakan relief and welfare, yaitu dengan berusaha segera memenuhi kekurangan atau kebutuhan tertentu yang dialami individu atau keluarga seperti kebutuhan makanan, kesehatan dan pendidikan.

Kedua, memusatkan kegiatan small scale reliant local development atau disebut dengan community development, yang antara lain meliputi pelayanan kesehatan, penerapan teknologi tepat guna, dan pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, penyelesaian persoalan masyarakat bawah (grassroot) tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan atas bawah (top-down approach) melainkan membutuhkan pendekatan bawah atas (bottom-up approach).

Ketiga, mereka yang terlibat dalam sustainable system development, mulai memperlakukan dampak pembangunan dan cenderung melihat jauh keluar daerahnya, ketingkat regional, nasional, dan internasional. Pada tahap ini terdapat usaha untuk mempengaruhi perumusan kebijakan pembangunan. Strategi ini mengharapkan perubahan pada tingkat regional dan nasional. Keempat, merupakan fasilitator gerakan masyarakat (people movement). Hal

ini dilakukan untuk membantu rakyat mengorganisasi diri, mengidentifikasi kebutuhan lokal, dan memobilisasi sumberdaya yang ada pada mereka. Pada gerakan ini membuat generasi tidak sekedar hanya mempengaruhi perumusan kebijakan saja tetapi mengharapkan adanya perubahan dalam pelaksanaannya.

Terakhir yaitu pemberdayaan rakyat (empowering people). Pada era globalisasi ini dan perkembangan teknologi, masalah persaingan dan kerjasama menjadi isu penting. Generasi ini cenderung memperjuangkan ruang gerak yang lebih terbuka, dan untuk menciptakan pengakuan pemerintah terhadap arti penting inisiatif lokal.

Kartasasmita (1995:19) sebagai mana dikutip dalam Sumaryadi (2005) mengemukakan Hakikat dari kemandirian dan keberdayaan rakyat adalah keyakinan bahwa rakyat memiliki potensi untuk mengorganisasi dirinya sendiri dan potensi kemandirian tiap individu perlu diberdayakan. Max Weber juga mengatakan beberapa hal antara lain: 1) tidak mungkin mengembangkan kapitalisme tanpa adanya kelas atau kelompok wirausahawan, 2) tidak mungkin ada kelas wirausahawan tanpa satu dasar moral (moral charter), dan 3) tidak ada dasar moral tanpa keyakinan keagamaan (religious premises), memastikan bahwa dasar moral kapitalisme (Barat) adalah Ajaran Protestan. Dikaitkan dengan kegagalan kapitalisme Barat di Negara-negara muslim tersebut, kesadaran bahwa akar kapitalisme bukanlah dari Islam kemudian membangkitkan keinginan untuk merekonstruksi sistem ekonomi yang dianggap "otentik" berasal dari Islam. Apalagi sejarah memperlihatkan bahwa pemikiran ekonomi, telah pula dilakukan oleh para ulama Islam, bahkan jauh sebelum Adam Smith menulis buku monumentalnya The Wealth of Nations.

Di samping itu, iklim perdagangan yang akrab dengan munculnya Islam, telah menempatkan beberapa tokoh dalam sejarah sebagai pedagang yang berhasil. Keberhasilan tersebut ditunjang oleh kemampuan skill maupun akumulasi modal yang dikembangkan.

Dalam pengertiannya yang sangat umum, maka bisa dikatakan bahwa dunia kapitalis sudah begitu akrab dengan ajaran Islam maupun para tokohnya. Kondisi tersebut mendapatkan legitimasi ayat al-Qur'an maupun sunnah dalam mengumpulkan harta dari sebuah usaha secara maksimal. Selama ini telah banyak yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kehidupan penduduk miskin, na-

mun hasilnya masih diragukan oleh banyak kalangan karena jumlah penduduk miskin justru makin bertambah, dan ketimpangan distribusi pendapatan juga makin dipertanyakan terutama indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Indikator itu mulai dari input ke proses sampai dengan outputnya. Dengan melihat pada input dan output saja, begitu banyak dana, pikiran dan tenaga yang telah dikorbankan, output yang dicapai sangat tidak seimbang. Dengan menggunakan istilah ekonomi populer

Benefit Cost Ratio "yang dicapai masih lebih kecil dari satu, yang berarti bahwa manfaat yang diperoleh masih lebih kecil dari biaya yang dikorbankan.

Kondisi seperti ini dapat ditelusuri atau dievaluasi dimana letak kesalahannya. Perencanaan mungkin benar tetapi kalau prosesnya salah, hasilnya minim atau tidak sesuai dengan yang telah diperhitungkan, apalagi kalau dari perencanaannya sudah salah. Salah satu sumber kegagalan program pembangunan adalah apabila dalam perencanaan selalu muncul "vested interest" dari para pihak yang terlibat dalam perencanaan. Demikian pula apabila proses yang dilaksanakan menyimpang dari apa yang telah di gariskan oleh sebuah perencanaan yang benar, hasilnya juga nihil.

Berdasarkan pada pengamatan empiris dan hasil-hasil penelitian kegagalan mengentaskan kemiskinan dan pengangguran yang dilaksanakan oleh pemerintah, tergantung dari kejujuran pelaksanaan dilapangan serta kesediaan penduduk miskin untuk merubah prilakunya dan merubah nasibnya sendiri. Disamping itu belum terjadi kerjasama antara pemerintah dan ulama dalam berbagai upaya perbaikan ekonomi umat khususnya berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran penduduk. Sehubungan dengan itu semua, maka untuk memperbaiki ekonomi umat kedepan, pemerintah dan ulama perlu kerjasama dalam memanfaatkan dana pajak zakat dan wakaf sehingga hasil yang dicapai menjadi optimal.

Kejayaan Islam, salah satunya ditopang oleh sistem logistik dan keuangannya yang begitu canggih, yaitu "Baitul Mal" (Ahmad Syailabi, 1983). Melalui inilah proyek-proyek raksasa dan prestisius mendapat backing finansial. Ketika perjuangan Nabi, Khulafaurra-syidin, hingga era kekhalfahan Islam. Islam mendapat simpati dan

dukungan di kalangan warga di Jazirah Arab karena melalui sistem Baitul Mal itulah Nabi dan para sahabat membuat suatu sistem ekonomi yang berkeadilan dan membantu dhuafa. Bila Nabi mendapat amanah zakat dari umat Islam di waktu pagi hari, maka ba'da dhuhur, zakat tersebut sudah terbagi habis kepada mustahiq, terutama fakir miskin.

Dana Baitul Mal juga banyak dipergunakan untuk memerdekakan budak, sehingga Baitul Mal ini berjasa besar dalam menghapus sistem perbudakan di wilayah Islam.

Pada fase awal Islam, terutama era Khalifah Umar Ibnul Khattab, Baitul Mal sudah membiayai sarana dan prasarana umum seperti pembangunan jalan raya, jembatan, dan irigrasi pertanian. Disamping itu pemerintah dan ulama wajib mengawasi proses dan menempatkan aparat yang disiplin dan paling jujur. Demikian pula kontrol dari masyarakat dan lembaga pengawasan independen lain tak boleh diabaikan peranannya. Walaupun belum seluruhnya, kebijakan dan langkah pemerintah berikut akan sangat mendukung keberhasilan program-program pengentasan kemiskinan dan perbaikan ekonomi umat.

Globalisasi adalah suatu proses yang multi-dimensi, meliputi ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologi. Fenomena globalisasi terwujud dalam bentuk penyempitan waktu dan ruang dalam hubungan sosial. Artinya hubungan sosial antara individu dengan masyarakat maupun antar masyarakat dalam suatu negara bahkan antar negara telah menjadi begitu transparan, tidak lagi mengenal batas-batas politik. Perkembangan yang begitu cepat dalam teknologi informasi, perdagangan internasional, serta mobilitas tenaga kerja, modal dan keuangan antar negara sejak tiga dasawarsa terakhir telah mengakibatkan peran ekonomi suatu negara secara individual terhadap perekonomian global menjadi semakin kurang penting atau kurang berarti. Tentunya, proses ini telah dan akan mempengaruhi suatu konstruk sistem sosial suatu masyarakat yang telah mapan selama ini. Sejauh mana pengaruh ini, ditentukan oleh bagaimana sebuah masyarakat atau negara itu memberikan respon terhadap globalisasi tersebut.

d. **Merancang Pembangunan Sosial Pada Tingkat Lokal: Sebuah Alternatif Penanggulangan Pengangguran Di Pedesaan**

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pendekatan pembangunan sosial berupaya untuk mensinergikan tujuan dari pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. Dalam program penanggulangan pengangguran di pedesaan yang berbasis pada pembangunan sosial, dimensi sosial perlu dikedepankan pada aktifitas ekonomi yang didesain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Para pendukung pendekatan pembangunan sosial percaya bahwa pemerintah harus membangun iklim yang kondusif bagi pengembangan usaha ekonomi kecil lokal yang dapat memberikan kesempatan bagi orang pengangguran untuk mengelola sumber yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi mereka.

Menurut Soedjito, urgensi masyarakat dalam pembangunan nasional hendaklah mengambil pilihan yang lurus dengan berpijak pada tata nilai yang berorientasi pada kepentingan masyarakat pedesaan. Pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mempengaruhi perubahan sosial berdasarkan atas serangkaian tata nilai tertentu. Dan ini juga dikuatkan oleh pendapat Moeljarto (1985) sebagaimana dikutip dalam Soedjito (1987) yang mengatakan dalam waktu yang lama juga masyarakat pedesaan masih akan merupakan determinan structural pembangunan nasional yang menentukan keberhasilan atau kegagalan pembangunan nasional kita. Apabila kita cermati dua pendapat tokoh sosial diatas bahwa keberhasilan dalam sebuah pembangunan adalah tak terlepas beranjak dari pedesaan, karena desa mencerminkan arah pembangunan bangsa.

Maka oleh sebab itu hendaklah kita memperhatikan bagaimana nasib dari para pengangguran di pedesaan sekarang ini, memang benar kita ketahui lewat mass media bahwa pengangguran sudah bisa ditekan bumi Aceh, tapi kenyataan yang kita lihat bahwa masih banyak para pengangguran di pedesaan, apakah tim survey yang turun kelapangan menggunakan kalender musim ketika melakukan survey?, jawaban atas pertanyaan ini adalah bisa saja survey dilakukan pada waktu panen di masyarakat, tapi itu semua adalah dugaan dari penulis. Namun yang perlu kita harapkan sekarang adalah kita harapkan kepada policy makers agar benar-benar melakukan per-

Masrizal, MA

anggulanan pengangguran ini dengan serius.

Pemilihan program pengembangan ekonomi lokal untuk penanggulangan pengangguran bukan tidak beralasan. Pengembangan ekonomi lokal yang berbasis pada kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah harus difokuskan bukan hanya pada individu atau keluarga tetapi juga masyarakat. Thomas Ditcher (1989) memberikan pikiran kritis dalam menekankan pengembangan masyarakat dalam aktifitas yang tidak meluas pada aktifitas ekonomi namun lebih terfokus pada aspek non materi seperti meningkatkan hubungan dan aktifitas masyarakat, juga meningkatkan kualitas kepemimpinan masyarakat. Dalam konteks ini strategi partisipasi masyarakat harus berusaha menciptakan usaha produktif yang dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan.

Intervensi sosial dapat dilakukan dengan mengadvokasikan program pengembangan ekonomi lokal dengan program-program bantuan sosial atau pelayanan sosial secara sinergis sehingga masyarakat dapat mengembangkan aktifitas ekonominya sekaligus hak-hak sosialnya juga dapat terpenuhi.

Konsep dasar pengembangan ekonomi lokal adalah suatu proses dimana pemerintah setempat (local governments) mengatur sumber daya setempat dan menciptakan pola kemitraan dengan sektor swasta atau sektor publik untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan merangsang aktifitas ekonomi pada suatu wilayah ekonomi. (Suparjan, 2008). Pengembangan ekonomi lokal bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat local untuk mengembangkan sumber-sumber yang ada secara lebih mandiri dengan inisiatif yang tumbuh secara lokal pula. Masyarakat harus dapat memanfaatkan sumberdaya manusia, institusi dan fisik mereka untuk membangun system ekonomi yang self-sustaining.

Pengembangan sumberdaya ekonomi local merupakan penumbuhan suatu lokalitas secara sosial, ekonomi dengan lebih mandiri berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki baik sumberdaya alam, geografis, kelembagaan, maupun kewiraswastaan yang dilakukan pada skala kecil (skala komunitas). Mengorganisasi dan mentransformasi potensi-potensi tersebut merupakan titik sentral penggerak bagi pembangunan lokal.

Pemerintah lokal dapat ikut terlibat pada pengembangan

ekonomi dalam berbagai cara. Pemerintah dapat berfungsi sebagai pemrakarsa aktifitas pengembangan melalui pola kemitraan dengan pengembang swasta atau sebagai pemegang posisi kepemilikan seimbang atau juga sebagai coordinator dan stimulator dari aktifitas ekonomi dalam wilayahnya.

Sedangkan tujuan dari pengembangan ekonomi lokal adalah untuk meningkatkan jumlah variasi dan ketersediaan kesempatan kerja untuk penduduk setempat. Hal ini memerlukan tipe pekerjaan yang sesuai dengan komunitas atau keahlian sumberdaya manusia dan keahlian dasarnya. Dalam menjalankan aktivitas ini pemerintah sebagai partisipan atau leader harus berinisiatif dan lebih aktif. Sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan ekonomi lokal adalah: pertama, Tersedianya lapangan pekerjaan yang lebih banyak, kedua, Peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat dan ketiga, Peningkatan kesempatan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan personal dengan perbaikan komunitas (Edward J. Blakely, 1994).

Mengimplementasikan pengembangan ekonomi lokal berarti membangun secara langsung kapasitas daerah lokal untuk memperbaiki masa depan ekonominya. Prioritas terhadap ekonomi lokal dalam meningkatkan kapasitas produktif usaha ekonomi lokal, penguisaha dan pekerja merupakan hal yang sangat penting. Kemampuan masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya saat ini tergantung pada kemampuan untuk beradaptasi dalam lingkungan pasar yang cepat berubah dan makin kompetitif.

Dimensi sosial dalam Penanggulangan pengangguran di pedesaan dapat ditempuh melalui penyusunan perencanaan sosial di tingkat local serbagai pendamping dalam program pengembangan ekonomi local. Disamping itu juga perlu disusun indikator keberhasilan yang lebih bersifat sosial daripada indikator keberhasilan secara ekonomi.

C. Penutup

Berdasarkan dari uraian diatas maka dapat disimpulkan beberapa alternatif dalam mengatasi pengangguran dikaitkan dengan pendekatan perspektif pembangunan sosial dalam mewujudkan pembangunan, antara lain:

Penanggulangan Pengangguran Dalam Perspektif Pembangunan Sosial

1. Pendekatan pembangunan yang menyeimbangi antara pembangunan ekonomi dengan pembangunan sosial, dikarenakan pada masa rezim orde baru satu dimensi pertumbuhan ekonomi gagal mensejahterakan rakyat secara keseluruhan.
2. Implementasi pendekatan pembangunan sosial dalam penanggulangan pengangguran perlu didukung dengan komitmen politik mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah ditingkat lokal. Hal ini perlu dilakukan adalah untuk menjaga konsistensi kebijakan penanggulangan pengangguran dengan kebijakan pembangunan lainnya, sehingga tidak terjadi pertentangan antara satu program dengan program lainnya.
3. Pendekatan Pemerintah Indonesia melalui Gerakan Nasional Penanggulangan Pengangguran (GNPP) dengan mengerahkan semua unsur•unsur dan potensi di tingkat nasional dan daerah untuk menyusun kebijakan dan strategi serta melaksanakan program penanggulangan pengangguran menjadi salah satu tolak ukur kebijakan nasional dan regional dengan birokrasi yang efisiensi sesuai dengan sustainable system development.
4. Pemerintah dapat memanfaatkan fungsi sosial strategis BUMN untuk mengurangi angka pengangguran melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Karena BUMN memiliki Peran strategis menghasilkan barang dan atau jasa untuk kemakmuran masyarakat, dan juga dapat membantu pembinaan dan pengembangan UMKM (termasuk koperasi).
5. Pendekatan pembangunan yang mencoba merubah pendekatan sistem ekonomi kapitalis ke sistem ekonomi Islam (syariah). Dengan didukung kerja sama antara pemerintah dengan ulama dalam memanfaatkan dana pajak zakat dan wakaf sehingga hasil yang dicapai menjadi optimal, dengan merealisasikan Baitul Mal dan pengelolaan bank-bank syariah, sistem Baitul Mal merujuk kepada sejarah perjuangan Nabi, Khulafaurrasyidin, hingga era kekhalifahan Islam. Islam mendapat simpati dan dukungan di kalangan warga di Jazirah Arab karena melalui sistem Baitul Mal itulah Nabi dan para sahabat membuat suatu sistem ekonomi yang berkeadilan dan membantu dhuafa.
6. Keberhasilan program penanggulangan pengangguran di

pedesaan/*gampong* yang berbasis pada pembangunan sosial tidak cukup hanya diukur dengan indikator-indikator yang sifatnya ekonomik kuantitatif tetapi perlu juga diukur dengan indikator-indikator sosial kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim, 2002, *Perubahan Sosial Sketsa Teori Dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*, Tiara Wacana, Yogyakarta,
- Bambang Nugroho, tanpa tahun, dkk, *Tinjauan Tentang Kearifan Lokal*, Balatbangsos-Depsos RI, Jakarta
- Bryan S. Turner, 1984, *Sosiologi Islam (suatu telaah analitis atas tesa sosiologi Weber)*, Rajawali Pers, Jakarta
- David Korten, 1983, *Social Decelopment*, Hartford, CT Kumarian Press
- Donald K. Emmerson, 1984, *Metodologi Penelitian Pedesaan : Masalah-Masalah Besar Di tempat Kecil: Merencanakan Penelitian Pembangunan Daerah Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Edi Suharto, 2005, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*, Alfabeta, Bandung
- Pajar Hatma Indra Jaya, 2008, *Analisis Masalah Sosial*, Senter, Yogyakarta
- G. Sevilla Consuelo, dkk., 1993, *Pengantar Metode Penelitian*, Terj. Al-imudin Tuwu, UI Press, Jakarta
- Harun Nasution, 1995, *Islam Rasional Gagasan Dan Pemikiran*, Penerbit Mizan, Jakarta
- Ibnu Khaldun, 2000, *Muqaddimah*, Penerjemah Ahmadi Thoha, Pustaka Pirdaus, Jakarta
- Irawan, Elly, 1995, *Pengembangan Masyarakat*, Universitas Terbuka, Jakarta
- James Coleman, 1994, *Fondation of Social Theory*, The Belknap Press of Harvard University Press
- James Midgley, 2005, *Pembangunan Sosial Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial*, Diperta Depag. RI, Jakarta
- Jim Ife, 2002, *Community Development Community-Based Alternatives in an Age of globalisation*, Longman is an Imprint of Pearson education, Australia

Pengendalian Masalah Sosial

Masrizal, MA

- Kartini Kartono, 1998, *Pemimpin Dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal Itu?*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Koentjaraningrat dan Donald K. Emmerson, 1982, *Aspek Manusia Dalam Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta
- Lexy J. Moelong, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung
- Mansur Faqih, 2001, *Runtuhnya Teori pembangunan dan Globalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Miftachul Huda, 2009, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial (sebuah Pengantar)*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Nana Syaodih Sukmadinata, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Riant Nugroho, 2007, *Analisis Kebijakan*, PT Elex Media, Jakarta
- Robbins, 2003, *Perilaku Organisasi*, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jilid I Jakarta
- Sabirin, 2012, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kearifan Lokal*, Editor Masrizal, Ar-Raniry Press, Banda Aceh
- Sanafiah Faisal, 2005, *Format-Format Penelitian Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soedjito, 1987, *Aspek Sosial Budaya Dalam Pembangunan Pedesaan*, Tiara Wacana, Yogyakarta
- Soerjono Sukanto, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soetomo, 2009, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sutoro Eko, dkk, 2007, *Bergerak Menuju Mukim Dan Gampong*, IRE Press Yogyakarta
- Sutrisno Hadi, 2000, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset
- Sztompka, 2003, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta
- Tay K Mc Namara and John B. Williamso, 2002, *Welfare State*, dalam David, J. Ekerdt (editor in chief), *Encyclopedia of Aging*, Volume 3, USA: Macmillan

Daftar Pustaka

- William N. Dunn, 1999, (1994, 2nd edition) *Pengantar analisis kebijakan publik*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, p.xxi+667 hlm, lihat juga Thomas R, Dye, 1995, *Understanding public policy* New Jersey Prentice Hall
- Y.Wibowo, *Media Cernin Dinamika Global*, Penerbit Matakata, Lampung, tanpa tahun

Tesis/ Skripsi:

- Arindita, 2003, *Hubungan antara Persepsi Kualitas Pelayanan dan Citra Bank dengan Loyalitas Nasabah*, Fakultas Psikologi UMS, Surakarta, Skripsi
- Baihaqi, 2007, *Partisipasi Masyarakat Pasca Gempa dan Tsunami (studi di Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)*, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Skripsi
- Masrizal, 2010, *Peran Tokoh Informal Dalam Pemberdayaan Masyarakat (studi terhadap penanganan dampak gempa dan tsunami di Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Tesis
- Yudi Douglas Batubara, *Evaluasi Perencanaan Desa dalam Membangun Kembali Lingkungan Pedesaan Pasca Bencana Alam Tsunami 2004, (studi di Desa Lam Jabal, Gampong Baro, Gampong Pande dan Desa Labuy)*, UI (universitas Indonesia), Jakarta, Tesis

Jurnal

- Masrizal, *Penanggulangan Pengangguran di Pedesaan Dalam Perspektif Pembangunan Sosial, (Rural Unemployment Eradication from a Social Development Perspective)*, Jurnal Sosiologi USK FISIP Unsyiah, Banda Aceh Volume 1, No.1, Desember 2012
- , *Media dan Perubahan Sosial (Media and Social Change)*, Jurnal Komunikasi STAI Dirundeng Meulaboh edisi November 2009-Februari 2010
- , *Mengenal Pekerjaan Sosial dan Metode Pemberdayaan Masyarakat (On Social Works and Society development methods)*, Jurnal Al-bayyan Fak. Dakwah IAIN Ar-Raniry, Edisi Januari- Juni 2010

———, *Kebijakan Publik dan Kesejahteraan Sosial dalam Islam (Public Services and Social welfare in Islam)*, Jurnal Komunikasi STAI Dirundeng Meulaboh edisi Juli- Oktober 2009

Website/ Koran

Saini, KM, *Kearifan Lokal di arus Global*, dalam *Pikiran Rakyat*, Edisi 30 Juli 2005

Masrizal, *Dilema Kebijakan Sosial*, Serambi Indonesia

———, *Masalah Sosial di Negeri Syariat*, Koran Raja Post, edisi 17-21 Januari 2011

———, *Saatnya Model Kesejahteraan Sosial*, Koran Waspada 16 Mei 2011

———, *Pileg Kesejahteraan Untuk Siapa*, Koran Waspada, 28 Maret 2014

Tentang Penulis



Masrizal, MA, TTL: Keumumu Hilir, Aceh Selatan, 15 April 1984, Pendidikan terakhir, S2 Sosiologi, Kosentrasi Kebijakan dan Kesejahteraan sosial UGM Yogyakarta, Istri, Ewi Mauliza, A.Md, Anak: Daffa Maulana, Pekerjaan: Dosen Sosiologi Fak. Ilmu social dan Ilmu Politik Univ. Syiah Kuala. Dan Koordinator Program WDC Kota Banda Aceh.

Pernah menjadi Koord. Peneliti pada Penelitian tentang Dampak Bantuan Rumah Muslim Aid terhadap Masyarakat Kampung Jawa, Banda Aceh, Kerjasama ARC dan Muslim Aid (Sept 2006- May 2007), Peneliti pada Penelitian Tentang Keterlibatan Masyarakat dalam mengakses bantuan Pasca Tsunami. AIPRD- ACARP di Aceh Besar, Aceh Jaya And Aceh Barat.(August-September 2007), Asisten Peneliti pada Penelitian tentang Penyelesaian Sengketa Tanah pasca Tsunami di Kecamatan Lhoknga, A. Besar, Max Planck Institute Germany (Oktober 07 - February 2008), Peneliti pada Penelitian tentang melihat Tingkat keterlibatan masyarakat rentan terhadap bantuan Multi Donor Fund In PascaTsunami di Banda Aceh. (Agust-Sept 2008), Peneliti pada Penelitian Maskulinity, kerjasama PSW dan UNIFEM (April- Agustus 2010), Asisten Peneliti pada Penelitian Tentang Pemetaan Sosial Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan, Kerjasama Aceh Institute dan ICAIOS Unsyiah (Januari - Maret 2010), Peneliti pada Penelitian pemetaan social untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat rentan di Kab. AcehTamiang kerjasama Fisip Unsyiah dan Pertamina Field Rantau Aceh Tamiang (Januari- Februari 2011), peneliti pada Penelitian Tentang Sistem Dampingan LSM terhadap Usaha mikro Pemberdayaan Perempuan Kota Banda Aceh. WDC- Ford Foundation.(Maret- Juni 2012), Peneliti pada Penelitian tentang Program Good Practise Kota Banda Aceh (Musrena, GSI dan KPTSP) UNFGI (University Network For

Governance Innovation), Unsyiah, Unhas, Untan, UGM dan Unair. (Januari- Februari 2012), Konsultan pada Penelitian Pemetaan Daerah Rawan Bencana Sosial di Aceh, Kemensos - RI- Dinsos Provinsi Aceh, (April- Agustus 2013)

Buku yang pernah diterbitkan yaitu *Tokoh Informal Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, dalam Buku Wajah Nanggroe Endatu : Percikan Pemikiran Intelektual Aceh- Jogja, Diva Press, Yogyakarta, (2011). Analisis Pengembangan Usaha Ekonomi Perempuan di Kota Banda Aceh, 2012, Samudra Biru, Yogyakarta
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kearifan Lokal (editor), 2012, Ar-Raniry Press, Banda Aceh, Selain itu juga menulis sejumlah jurnal ilmiah yaitu : 1) Kebijakan Publik dan Kesejahteraan Sosial dalam Islam, Jurnal Komunikasi STAI Dirundeng Meulaboh edisi Juli- Oktober 2009. 2) Media dan Perubahan Sosial, Jurnal Komunikasi STAI Dirundeng Meulaboh edisi November 2009- Februari 2010. 3) Mengenal Pekerjaan Sosial dan Metode Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Albayyan Fak. Dakwah IAIN Ar-Raniry, Edisi Januari- Juni 2010, Penanggulangan Pengangguran di Pedesaan Dalam Perspektif Pembangunan Sosial, (Rural Unemployment Eradication from a Social Development Perspective), Jurnal Sosiologi USK FISIP Unsyiah, Banda Aceh Volume 1, No.1, Desember 2012

Artikel/Opini yang ditulis juga sering menghiasi sejumlah media masa seperti Harian Aceh, Aceh Institute, Raja Post, Waspada dan Serambi Indonesia serta di beberapa website seperti Website Aceh Institute.

Komentar

Saya mengenal dan berteman dengan Masrizal, sudah cukup lama, dan saya tahu beliau cukup intens mengkaji isu-isu masalah sosial dan pemberdayaan perempuan terkait pengetahuan lokal. Artikel-artikel yang dituliskannya di media cetak dan elektronik baik lokal maupun nasional, spesifik dalam bidang kajiannya masalah sosial. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukannya berkenaan dengan berbagai isu-isu yang berhubungan dengan masalah sosial atau konflik sosial, dalam buku ini saya sangat memberikan apresiasi yang dalam karena beliau mampu menampilkan sesuatu yang bermuansa akademik untuk dibaca oleh kalangan mahasiswa yang mengambil bidang studi sosial (Sosiologi, Pekerjaan sosial, Pengembangan Masyarakat Islam, Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan dan ilmu Sosial lainnya). Dan juga bagi akademisi dan praktisi serta politisi yang memiliki kepekaan terhadap permasalahan sosial, khususnya di Aceh dan umumnya di Indonesia apa yang diutarakan dalam karya ini menjadi rujukan awal untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap masyarakat marjinal.

(Khairulyadi MHSc, Sekretaris Program Studi Sosiologi FISIP Unsyiah Banda Aceh)

Saya sangat berharap kepada mahasiswa bidang studi sosial untuk membaca buku ini, sebab karya ini menawarkan perspektif penanganan masalah sosial melalui kearifan lokal. Disamping itu saya memberikan apresiasi yang dalam kepada sosiolog muda yang produktif ini, disamping kesibukan sebagai dosen juga pengamat sosial, beliau menyempatkan menulis karya yang berharga ini, yang lahir dari pengalaman penelitian individunya sendiri, dengan dirangkum menjadi sebuah buku rujukan. Atas alasan itu menurut hemat saya sangat baik untuk dijadikan referensi oleh para akademika, politisi, dan praktisi yang bergerak dibidang sosial kemasyarakatan.

(Dr. Kusmawati Hatta, MPd, Direktur Women Development Centre Kota Banda Aceh, dan Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Perkembangan masalah sosial di zaman kontemporer ini perlu direspon secara cepat, dengan pendekatan yang tepat, buku yang ditulis Masrizal ini memberikan upaya pemecahan masalah sosial dengan berbagai pendekatan teori dan analisis penyelesaiannya. Untuk itu saya menyarankan kepada mahasiswa, akademisi, dan praktisi agar membaca karya ini, karena menawarkan perpektif baru dalam penanganan masalah sosial berbasis kearifan lokal.

(Dr. Ishak Hasan, M.Si, Dosen Pendidikan Ekonomi FKIP Unsyiah dan pernah menjabat Pembantu Dekan II Fisip Unsyiah Periode 2007-2014)



Diterbitkan Oleh:
Percetakan & Penerbit
Syiah Kuala University Press
Darussalam, Banda Aceh

ISBN 978-602-1270-22-6



9 786021 270226